



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**PARTISIPASI *FEMALE PEACEKEEPER* INDONESIA DALAM
MISI *UNITED NATIONS INTERIM FORCES IN LEBANON*
TAHUN 2015-2017: DAMPAK TERHADAP DIPLOMASI
PERTAHANAN INDONESIA**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**SARAH ASTRIED
120170103022**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI DIPLOMASI PERTAHANAN**

**BOGOR
DESEMBER 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Sarah Astried
NIM : 120170103022
Program Studi : Diplomasia Pertahanan
Judul Tesis : Partisipasi *Female Peacekeeper* Indonesia dalam Misi *United Nations Interim Forces in Lebanon* Tahun 2015-2017: Dampak terhadap Diplomasia Pertahanan Indonesia

Tesis berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Pertahanan pada Program Studi Diplomasia Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Mayjen TNI (Purn)
Dr. I Gede Sumertha, KY., PSC.



(.....)

Pembimbing II : Dr. Herlina Juni Risma Saragih



(.....)

Penguji I : Letjen TNI (Purn)
Dr. Yoedhi Swastanto, MBA.



(.....)

Penguji II : Dr. Drs. Sutrimo, M.M., M.Si



(.....)

Penguji III : Kolonel Caj.
Dr. Surryanto D.W., M.H., M.M



(.....)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 18 Desember 2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 18 Desember 2018



Sarah Astried

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Sarah Astried
NIM : 120170103022
Program Studi : Diplomasia Pertahanan
Fakultas : Strategi Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Partisipasi *Female Peacekeeper* Indonesia dalam Misi *United Nations Interim Forces in Lebanon* Tahun 2015-2017: Dampak terhadap Diplomasia Pertahanan Indonesia”

beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formalkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, 18 Desember 2018



Sarah Astried

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul: “Partisipasi *Female Peacekeeper* Indonesia dalam Misi *United Nations Interim Forces in Lebanon* Tahun 2015-2017: Dampak terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini turut didukung oleh bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Letnan Jenderal TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP selaku Rektor Universitas Pertahanan;
2. Mayor Jenderal TNI Dr. Hipdizah, S.Adm, M.Si selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan;
3. Kolonel Arh Dr. Jonni Mahroza, S.IP., M.Sc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Diplomasi Pertahanan;
4. Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. I Gede Sumertha KY, PSC, M.Sc dan Dr. Herlina Juni Risma Saragih selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan tesis ini;
5. Dosen-dosen Universitas Pertahanan yang sangat berjasa mengkonstruksi pemikiran peneliti terkait topik penelitian ini: Aris Arif Mundayat, Ph.D; Dubes Dian Wirengjurit; Kolonel Caj Dr. Surryanto D.W, M.H., M.M, dan seluruh dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
6. *Female Peacekeepers* Indonesia, Letkol Sus. Ratih Pusparini, M.A., Mayor Caj. (K) Erna Nuraeni, S.E., Mayor Ckm. (K) dr. Sarah Tidar, Mayor Laut (S/W) Nani Kusmiyati, S.Pd., M.M., dan AKBP Yuli

Cahyanti, serta perempuan pemerhati *female peacekeeper*, Mutia Zakia Salma, M.Han yang turut berbagi informasi dan masukan terkait penelitian ini.

7. Mama dan Papa yang selalu mendukung anaknya baik secara materil maupun non-materil, pahlawan terhebat peneliti yang senantiasa mengalirkan doa dan semangat. Terima kasih juga untuk Ika Kartika Sari dan Rudi Wicaksono selaku kakak peneliti yang selalu memberi semangat dan dukungan serta Adam Al Adli selaku adik yang menjadi motivasi peneliti untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
8. Moh. Irvan Septiar Musti, M.Si, *a very supportive partner to share, to listen, and to gain valuable experiences*. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan dukungannya. Apresiasi peneliti karena selalu mendukung peneliti sebagai perempuan untuk meraih pendidikan tinggi.
9. Teman-teman Prodi Diplomasi Pertahanan Cohort 4 khususnya Fiany Intan Vandini dan Siska Azhari sebagai *support system* peneliti serta seluruh rekan-rekan seperjuangan, dan
10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala pintu kebaikan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti sehingga terbuka kemudahan-kemudahan lainnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas setiap kebaikan yang diberikan. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mendukung kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat baik kepada pengembangan ilmu pertahanan, para *stakeholder* terkait, dan para pembaca.

Bogor, 18 Desember 2018

Sarah Astried

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi *United Nations Interim Forces in Lebanon* tahun 2015-2017 dan dampaknya terhadap diplomasi pertahanan Indonesia. Hal ini dihadapkan dengan adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 Tahun 2000 tentang *Women, Peace and Security*, dan target gender 15% untuk personel militer perempuan dalam mewujudkan misi pemeliharaan perdamaian yang ramah gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui teknik pengumpulan data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017 mengalami peningkatan secara kuantitas dengan jumlah 100 personel dari total 134 yang tersebar di sembilan misi. Namun, posisi penugasan *female peacekeeper* Indonesia masih mendominasi satuan tugas kontingen daripada posisi *military staff*. Untuk meningkatkan partisipasi, Indonesia masih mengalami hambatan utamanya berkaitan dengan kurang siapnya institusi militer dalam menyiapkan Wan-TNI termasuk kurangnya pendidikan dan pelatihan, aturan terkait ijin suami/atasan, dan absennya kebijakan komposisi gender. Akhirnya, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia berdampak terhadap *bargaining power* Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanan untuk meningkatkan *Confidence Building Measures* dan membantu *capacity building* Wan-TNI dalam hal profesionalisme tugas.

Kata Kunci: Partisipasi, *female peacekeeper* Indonesia, misi UNIFIL, Diplomasi Pertahanan

ABSTRACT

This research aims to analyze participation of Indonesian female peacekeeper in United Nations Interim Forces in Lebanon 2015-2017 and its impact to Indonesia's defense diplomacy. It is correlated with the existence of United Nations Security Council Resolution No. 1325 year 2000 about Women, Peace, and Security, as well as gender target of 15% female military personel to implement gender based mission. This research uses qualitative research method and descriptive analytic approach, with interview and literature study as the data collection technique. The results show that participation of Indonesian female peacekeeper year 2015-2017 increased in quantity with 100 personnel out of total 134 females around nine missions. However, their job positions still dominated in contingent task forces rather than military staff. In order to increase participation, Indonesia still experiences some obstacles that mainly related to the lack of preparedness of military institution in preparing female military personnel including the lack of education and training, regulation about permit from officer and/or husband, and the absent of gender composition policy. Finally, participation of Indonesian female peacekeeper affected to Indonesia's bargaining power in conducting defense diplomacy to enhance Confidence Building Measures and help female's capacity building in term of task professionalism.

Keywords: Participation, Indonesian Female Peacekeeper, UNIFIL, Defense Diplomacy

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| <i>ABSTRACT</i> | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian | 8 |
| 1.3 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.5.1 Manfaat Teoritis..... | 9 |
| 1.5.2 Manfaat Praktis | 10 |
| BAB 2 KAJIAN TEORITIK | 11 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 11 |
| 2.1.1 Partisipasi..... | 11 |
| 2.2 Deskripsi Konseptual..... | 16 |
| 2.2.1 Konsep Feminis Internasionalisme..... | 16 |
| 2.2.2 Diplomasi Pertahanan | 18 |
| 2.2.3 Konsep <i>Peacekeeping</i> PBB | 25 |
| 2.2.4 Pengarusutamaan Gender (<i>Gender Mainstreaming</i>) | 27 |
| 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan | 30 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran | 39 |
| BAB 3 METODE PENELITIAN | 41 |
| 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian | 43 |

| | | |
|---------|--|----|
| 3.1.1 | Tempat Penelitian | 43 |
| 3.1.2 | Waktu Penelitian | 43 |
| 3.2 | Subyek dan Narasumber Penelitian | 44 |
| 3.2.1 | Subyek Penelitian..... | 44 |
| 3.2.2 | Narasumber | 45 |
| 3.3 | Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| 3.4 | Pemeriksaan Keabsahan Data | 49 |
| 3.5 | Teknik Analisis Data | 51 |
| BAB 4 | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 53 |
| 4.1 | Gambaran Umum Penelitian | 53 |
| 4.1.1 | Perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian . | 54 |
| 4.1.2 | Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) | 57 |
| 4.1.2.1 | Kementerian Luar Negeri | 59 |
| 4.1.2.2 | Kementerian Pertahanan..... | 61 |
| 4.1.3 | Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI)..... | 61 |
| 4.1.4 | Wanita Tentara Nasional Indonesia (Wan-TNI)..... | 63 |
| 4.2 | Hasil Penelitian..... | 64 |
| 4.2.1 | Partisipasi <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia dalam Misi UNIFIL Tahun 2015-2017 | 64 |
| 4.2.1.1 | Penyiapan <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia | 67 |
| 4.2.1.2 | Posisi Penugasan <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia dalam Misi UNIFIL 2015-2018..... | 77 |
| 4.2.1.3 | Keterlibatan <i>Female Peacekeeper</i> Indonesia dalam Program Kegiatan UNIFIL 2015-2017 | 83 |
| 4.2.2 | Dampak Partisipasi <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia | 93 |

| | | |
|---|---|-----|
| 4.2.2.1 | <i>Confidence Building Measure: Komunikasi Indonesia terkait Misi Pemeliharaan Perdamaian</i> | 94 |
| 4.2.2.2 | <i>Capacity Building: Partisipasi Female Peacekeepers Indonesia dalam Pelatihan</i> ... | 98 |
| 4.3 | Pembahasan | 103 |
| 4.3.1 | Partisipasi <i>Female Peacekeeper</i> Indonesia dalam Misi UNIFIL Tahun 2015-2017..... | 103 |
| 4.3.2 | Dampak Partisipasi <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia | 116 |
| BAB 5 | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI | 129 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 129 |
| 5.1.1 | Partisipasi <i>Female Peacekeeper</i> Indonesia dalam Misi UNIFIL 2015-2017..... | 129 |
| 5.1.2 | Dampak Partisipasi <i>Female Peacekeeper</i> Indonesia terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia | 130 |
| 5.2 | Rekomendasi..... | 130 |
| 5.2.1 | Rekomendasi Teoritis..... | 130 |
| 5.2.2 | Rekomendasi Praktis | 131 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 132 |
| LAMPIRAN | | 142 |
| LAMPIRAN 1. SURAT KETERANGAN PENELITIAN | | 142 |
| LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA | | 144 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|-----|
| Gambar 2.1 | Tangga Partisipasi Menurut Arnstein | 14 |
| Gambar 2.2 | Kerangka Pemikiran | 40 |
| Gambar 3.1 | Komponen Analisis Data: Model Interaktif | 51 |
| Gambar 4.1 | Organisasi PMPP TNI..... | 63 |
| Gambar 4.2 | Perbandingan Jumlah <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia secara keseluruhan dengan yang berada di UNIFIL (2015-2017) | 74 |
| Gambar 4.3 | Komposisi <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia di UNIFIL (2015-2017) berdasarkan Kepangkatan | 75 |
| Gambar 4.4 | Peta Sebaran Pasukan UNIFIL..... | 79 |
| Gambar 4.5 | Posisi <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia di UNIFIL (2015-2017) | 80 |
| Gambar 4.6 | Komposisi Matra <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia di UNIFIL (2015-2017)..... | 81 |
| Gambar 4.7 | Porsi <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia dari total <i>Female Peacekeepers</i> di UNIFIL..... | 82 |
| Gambar 4.8 | <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia, Sertu Ertikasari, Melaksanakan Program <i>Community Outreach</i> (2017)..... | 88 |
| Gambar 4.9 | Tingkatan <i>Capacity Building</i> | 125 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu | 35 |
| Tabel 3.1 Jadwal Penelitian | 43 |
| Tabel 3.2 Subyek dan Sampel Penelitian | 45 |
| Tabel 4.1 Instansi dan Lembaga dalam Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) | 58 |
| Tabel 4.2 Aktor dan Perihal Kegiatan Perencanaan Perekrutan Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian | 68 |
| Tabel 4.3 Jabatan Penugasan Konga di UNIFIL 2015-2017..... | 78 |
| Tabel 4.4 Persentase Female Peacekeepers Indonesia dalam Total Female Peacekeepers di UNIFIL (2015-2017)..... | 81 |
| Tabel 4.5 Hasil Penelitian Partisipasi Female Peacekeeper Indonesia dalam Misi UNIFIL tahun 2015-2017..... | 92 |
| Tabel 4.6 Materi <i>Induction Training</i> UNIFIL | 99 |
| Tabel 4.7 Hasil Penelitian Dampak Partisipasi Female Peacekeeper Indonesia terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia..... | 102 |
| Tabel 4.8 Diskusi Teori dan Temuan Penelitian Partisipasi Female Peacekeeper Indonesia dalam Misi UNIFIL tahun 2015-2017 | 114 |
| Tabel 4.9 Diskusi Konsep dan Temuan Penelitian Dampak Partisipasi Female Peacekeepers Indonesia terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia | 127 |

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Misi pemeliharaan perdamaian PBB (*UN Peacekeeping Mission*) merupakan tindakan kolektif yang dilakukan dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan di dunia.¹ Hal ini menjadi alat yang digunakan PBB untuk membantu negara tujuan misi atau *host countries* dalam mengarahkan konflik menuju perdamaian. Lebih lanjut, misi pemeliharaan perdamaian PBB memiliki kekuatan termasuk legitimasi, *burden sharing*, dan kemampuan untuk mengerahkan serta memperpanjang pasukan baik tentara maupun polisi dari seluruh dunia yang terintegrasi dengan *peacekeeper* dari sipil untuk menjalankan mandat.

Dalam perkembangan *peacekeeping operations*, PBB telah mengagendakan keseimbangan gender dalam misi perdamaian PBB. Hal ini ditunjukkan dengan diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tahun 2000 tentang "*Women, Peace and Security*".² Resolusi tersebut menandakan bahwa isu gender telah menjadi fokus perhatian dalam agenda perdamaian dan keamanan dunia. Kehadirannya mengajak seluruh negara anggota PBB untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian dimana fokus utamanya adalah partisipasi, proteksi, bantuan dan pemulihan. Di dalamnya juga menyinggung tentang partisipasi perempuan dalam level negara seperti polisi, kepemimpinan politik, rekrutmen *military officers* dan prajurit.³

Menurut PBB, penerangan perempuan ke berbagai wilayah telah dilakukan untuk pemeliharaan perdamaian maupun untuk memastikan hak

¹ United Nations, *United Nations Peacekeeping Operations Principle and Guidelines*, (New York: United Nations, 2008), hlm. 24.

² Isabelle Geuskens, "Introduction" dalam *Gender and Militarism: Analyzing the Links to Strategize for Peace*, (Den Hag: Women Peacemakers Program (WPP), Mei 24 Action Pack 2014), hlm. 3.

³ Bishwambhar Ghimire, "Contributions and Challenges: Female Participations in UN Peacekeeping Missions", *International Journal of Humanities and Social Sciences*, USA: Center for Promoting Ideas, Vol. 7, No. 3, Maret 2017, hlm 207-213.

perempuan. Isu keseimbangan dan kesetaraan gender ini bahkan diakui menjadi fokus misi pemeliharaan perdamaian dalam *Windhoek Declaration and the Namibia Plan of Action* tahun 1999.⁴ Ini diperkuat dengan Resolusi 1325 tersebut di atas yang berkontribusi terhadap peningkatan kewaspadaan perempuan dalam situasi konflik dan upaya membangun perdamaian secara inklusif. Sayangnya, partisipasi perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia masih mengalami keterbatasan dengan dinamika kuantitas.

Berdasarkan statistik PBB, partisipasi perempuan dalam misi penjaga perdamaian mengalami peningkatan. Dalam sejarahnya, perempuan pemelihara perdamaian diperkenalkan sejak tahun 1957.⁵ Sayangnya, pasukan pemelihara perdamaian ini masih didominasi oleh laki-laki. Dalam periode 1957-1979 hanya terdapat 5 orang perempuan dari 6.250 personil. Angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 20 dari 20.000 personil militer pada tahun 1989. 1% dari personil perempuan berseragam dikerahkan di misi perdamaian PBB tahun 1993, dimana 1.235 dari 65.555 (1,8%) adalah perempuan di militer tahun 2006. Adapun pada tahun 2007 terdapat 1.034 perempuan dari 71.673 (1,7%).

Lambatnya peningkatan partisipasi perempuan dalam misi penjaga perdamaian ini tidak terlepas dari terasosiasinya dunia militer dengan pendekatan maskulin.⁶ Wilayah militer dianggap sebagai ruang yang lebih tepat untuk laki-laki sehingga personel militer juga didominasi oleh laki-laki. Maskulinitas wilayah militer ini salah satunya terbingkai dalam kegiatan misi yang disebut membutuhkan kesiapan fisik. Padahal, perempuan dalam militer juga dibutuhkan dalam rangka membangun perdamaian, memberikan akses dan dukungan kepada perempuan lokal, mendukung kebutuhan spesifik dari perempuan dan anak-anak, menggali

⁴ *Ibid.*, hlm. 207.

⁵ *Ibid.*, hlm. 208.

⁶ Irene Jung Fiala, "Unsung Heroes: Women's Contributions in the Military and Why Their Song Goes Unsung", dalam Hellena Carreiras dan Gerhard Kummel (ed.), *Women in the Military and in Armed Conflict*, (Wiesbaden: VS Verlag, 2008) hlm. 52.

informasi mengenai kekerasan berbasis gender serta membuat misi menjadi lebih ramah gender.⁷ Tidak dapat diabaikan bahwa perempuan rentan menjadi korban kejahatan perang seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan sebagainya. Bahkan, menjadi hal yang ironis dimana pemerkosaan dilakukan pada saat perang secara sengaja sebagai alat dalam melemahkan lawan.⁸ Untuk itu, perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian merupakan suatu kebutuhan.

Untuk kali pertama dalam sejarah PBB, unit polisi perempuan dikirim ke Liberia oleh *UN Peacekeeping* pada Januari 2007.⁹ Saat itu juga merupakan pengiriman pertama batalyon perempuan ke wilayah Liberia dari pemerintah India untuk membantu bangsa Afrika memelihara perdamaian dan keamanan. Mereka mendorong partisipasi perempuan Liberia bergabung dalam misi UNMIL (*United Nations Mission in Liberia*) dan pasukan polisi nasional. Sejak itu, perempuan Liberia mengakui bahwa inisiatif PBB ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membentuk identitas dan memperbaiki standar kehidupan. Selain di Liberia, sejak tahun 2007 juga dikirim personil untuk misi perdamaian PBB yang melibatkan perempuan yaitu di Libya, Sudan, Afghanistan, dan Ivory Coast. Sayangnya, jumlah perempuan dalam misi PBB masih memiliki keterbatasan, pada tahun 2015 misalnya hanya ada 69 *military experts* di 16 misi yang tersebar di dunia.¹⁰

Bagaimanapun, kesuksesan pengiriman batalyon perempuan pertama kali yang dilakukan oleh India dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk meningkatkan partisipasi dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Indonesia sendiri pertama kali mengirimkan pasukan perdamaian pada tahun 1957 ke misi *United Nations Emergency Force*

⁷ Simon Allison, "Are Women Better Peacekeepers? These UN Officers Think So", *theguardian*, 17 September 2015, dalam <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/17/women-better-peacekeepers-un-officers-think-so>, diakses pada 30 April 2018.

⁸ Andrew Heywood, "Gender in Global Politics", dalam *Global Politics*, (London: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 412-431.

⁹ Bishwambhar Ghimire, *op.cit.* hlm. 210.

¹⁰ Simon Allison, *loc.cit.*

(UNEF) di Mesir sedangkan pengiriman *female peacekeeper* Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2008 ke Misi *United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)*.¹¹ Bagi Indonesia, pengiriman perempuan pemelihara perdamaian ini merupakan bagian dari strategi pertahanan negara. Hal ini sesuai dengan Konstitusi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkomitmen untuk ikut serta dalam perdamaian dan ketertiban dunia.¹² Partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian juga dilakukan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berdasar pada hak dan kedudukan, serta prinsip non-intervensi terhadap urusan domestik negara lain. Terlebih, Indonesia juga memiliki visi 4.000 *peacekeepers* yang ingin dicapai dalam periode tahun 2015-2019.¹³ Untuk itu, Indonesia melalui koordinasi Kementerian dan Lembaga (termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Markas Besar TNI) yang tergabung dalam Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) upayanya berperan dalam menentukan kebijakan dan strategi pengerahan pasukan pemelihara perdamaian dunia, termasuk dalam hal *female peacekeeper* di Lebanon Selatan.

Di Lebanon Selatan, misi perdamaian PBB terbentuk dalam kerangka UNIFIL (*United Nations Interim Forces in Lebanon*). UNIFIL dibentuk sejak tahun 1978 oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar Resolusi No. 425 dan 426 untuk memastikan penarikan pasukan Israel dari Lebanon, mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional dan membantu Pemerintah Lebanon dalam memulihkan otoritas efektifnya

¹¹ PMPP TNI, *TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian: Peran PMPP TNI dalam Menyiapkan Kontingen Garuda*, (Jakarta: PMPP-TNI, 2011), hlm. 3.

¹² Kementerian Pertahanan, "*Strategi Pertahanan Negara*", (Jakarta, Edisi Tahun 2014).

¹³ David Capie, "Indonesia as an Emerging Peacekeeping Power: Norm Revisionist or Pragmatic Provider?", *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* Vol. 38, No. 1, 2016, hlm. 1-27.

di wilayah tersebut.¹⁴ Mandat ini kemudian diperluas sejak tahun 2006 di bawah Resolusi 1701 yaitu mengawasi penghentian permusuhan, mendampingi dan mendukung *Lebanese Armed Forces (LAF)* di Lebanon Selatan, memberikan asistensi untuk memastikan akses kemanusiaan terhadap penduduk sipil dan relawan serta pengembalian secara aman terhadap displaced persons. Tentara UNIFIL pertama tiba di Lebanon pada 23 Maret 1978. Hingga saat ini hadir para *peacekeepers* dari 41 negara kontributor, termasuk Indonesia baik di dalam Kontingen maupun *military staff*.¹⁵

Indonesia bergabung dalam misi UNIFIL sejak tahun 2006 pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹⁶ Pengerahan *female peacekeeper* Indonesia ke dalam misi ini umumnya ditempatkan pada bagian pendukung di dalam Kontingen dan belum banyak menempati posisi substansial. Posisi substansial dalam hal ini dimaksudkan pada *Military Observer* dan *military staff* sebagaimana diharapkan oleh PBB. Faktanya, menurut salah satu *female peacekeeper* Indonesia yang pernah bertugas di Lebanon, Letkol Sus. Ratih Pusparini, pasukan perempuan lebih ditempatkan pada urusan sipil.¹⁷ Posisi ini dapat ditemukan dalam bagian administrasi, koordinasi sipil-militer, logistik, kesehatan, dan hubungan dengan masyarakat sipil. Hal ini tidak terlepas dari adanya hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia.

Tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia dapat berkaitan dengan beberapa hal seperti kurangnya pelatihan, budaya ketimuran yang melihat perempuan sebagai sistem pendukung utama dalam mengurus

¹⁴ [unifil.unmissions.org](https://unifil.unmissions.org/unifil-mandate), "UNIFIL Mandate", dalam <https://unifil.unmissions.org/unifil-mandate>, diakses pada 23 April 2018.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ UNIFIL, "Press Release Indonesia Joins UNIFIL", Naqoura, 11 November 2006, dalam https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/docs/pr072_2.pdf, diunduh pada 10 September 2018.

¹⁷ Tama Salim, "Chances rare for Indonesian women peacekeepers", The Jakarta Post, 28 Februari 2018, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/28/chances-rare-for-ri-women-peacekeepers.html>, diakses pada 26 April 2018.

keluarga, perspektif maskulin dalam dunia militer sehingga kuantitas perempuan di dalamnya mengalami keterbatasan, hingga kurangnya perhatian terhadap pengembangan kapasitas personel.¹⁸ Kemampuan bahasa Inggris disebut sebagai salah satu alasan sedikitnya jumlah *female peacekeeper* Indonesia. Namun, hal lain yang menjadi keunikan tersendiri sekaligus hambatan dan tantangan untuk perempuan militer adalah syarat memperoleh izin suami dan atau atasan. Ini berarti bahwa perempuan masih mengalami kesulitan mendapati posisi strategis dalam PBB seperti *Military Observer* hingga *Special Representative of the Secretary General* dan *Deputy Special Representative of the Secretary General*.

Dalam perkembangannya, PBB turut menentukan target gender dalam misi pemeliharaan perdamaian yaitu 15% untuk perempuan militer (*military observer* dan *military staff*) dan 20% untuk perempuan polisi.¹⁹ Hal ini menarik dimana PBB meletakkan target 15% *female peacekeeper* dalam komponen militer namun seperti diketahui bahwa setiap negara kontributor, termasuk Indonesia, memiliki keunikan hambatan dan tantangan tersendiri yang menyebabkan keterbatasan partisipasi perempuan. Lebih dari itu, partisipasi perempuan juga cenderung ditempatkan pada posisi pendukung saja seperti administrasi. Padahal, untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam misi pemeliharaan perdamaian, setiap negara kontributor sudah seharusnya terus berupaya meningkatkan partisipasi *female peacekeeper* dalam posisi yang menjangkau masyarakat. Indonesia sendiri melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) memiliki peran masing-masing baik secara strategis maupun operasional untuk meningkatkan

¹⁸ Bishwambhar Ghimire, *op.cit.*, hlm. 207-213.

¹⁹ United Nations Peacekeeping, "UN Peacekeeping sets new targets for female police, military observers and staff officers", 20 September 2017, dalam <https://peacekeeping.un.org/en/un-peacekeeping-sets-new-targets-female-police-military-observers-and-staff-officers>, diakses pada 26 April 2018.

partisipasi *female peacekeeper* Indonesia. Untuk itu, penelitian ini berawal dari pertanyaan tentang bagaimana partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017 dan berlanjut pada dampak apa yang didapat bagi diplomasi pertahanan Indonesia melalui pengiriman pasukan perempuan secara umum.

Misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon dipilih dalam penelitian ini mengingat pasukan perdamaian terbesar yang dikirim Indonesia untuk sembilan misi perdamaian PBB adalah untuk misi UNIFIL. Hal ini dijustifikasi oleh Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, Ibu Grata Endah Wedaningtyas.²⁰ Terlebih, dari 41 negara kontributor pengirim pasukan pemelihara perdamaian, Indonesia adalah negara pengirim pasukan terbesar di Lebanon diikuti Italia dan India. Adapun tahun 2015 dipilih sebagai titik awal mengingat terbitnya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019. Ini menjadi titik awal dalam melihat tren pengiriman *female peacekeeper* Indonesia dalam mendukung visi 4.000 personel tersebut. Sedangkan tahun 2017 dipilih sebagai titik akhir periode penelitian memperhatikan pelaksanaan kegiatan *community outreach* yang diimplementasikan dan kali pertama dilakukannya *female patrol* dalam kerangka "*Female Assessment/Analysis and Support Team (FAST)*". Hal ini merefleksikan komitmen UNIFIL terhadap perspektif gender di dalam misi yang dibuktikan dengan inisiatif pembentukan tim khusus pada tahun 2016. Konsentrasi ini menunjukkan *female peacekeeper* tidak bisa diabaikan begitu saja dalam diplomasi pertahanan Indonesia.

Sebagai bagian dari sistem internasional, Indonesia sudah sepatutnya meningkatkan perhatian terhadap partisipasi perempuan. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Indonesia terhadap resolusi DK PBB.

²⁰ Victor Maulana, "Indonesia Masuk 10 Besar Negara Penyumbang Pasukan Perdamaian PBB", 22 Februari 2018, dalam <https://international.sindonews.com/read/1284306/40/indonesia-masuk-10-besar-negara-penyumbang-pasukan-perdamaian-pbb-1519291328>, diakses pada 26 April 2018.

Terlebih, partisipasi perempuan ini dapat menjadi salah satu aspek penting yang turut mendukung diplomasi pertahanan Indonesia dalam rangka memperkuat *Confidence Building Measures (CBM)* dan *capacity building female peacekeeper* Indonesia. Untuk itu, penelitian ini akan meninjau lebih lanjut terkait dampak partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian terhadap diplomasi pertahanan Indonesia sebagai pertanyaan penelitian kedua.

Ini tidak terlepas dari upaya komunikasi Indonesia sehingga terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode tahun 2019-2020. Terpilihnya Indonesia ini didukung oleh 114 dari total 190 negara anggota PBB. Ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia untuk menempati posisi anggota tidak tetap DK PBB yang keempat kalinya setelah menjabat pada tahun 1963-1964, 1995-1996 dan 2007-2008. Periode 2019-2020 mengusung enam agenda utama dimana salah satunya adalah memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Agenda ini akan diupayakan melalui budaya dialog, penyelesaian konflik dengan cara damai dan tanpa kekerasan, serta meningkatkan peran perempuan dalam menjaga perdamaian di berbagai misi PBB.²¹

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017. Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah:

- a. Partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017, dan
- b. Dampak partisipasi *female peacekeeper* Indonesia terhadap diplomasi pertahanan Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Partisipasi *female peacekeeper* Indonesia termasuk salah satu perhatian Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian, komitmen

²¹ Retno LP Marsudi, "Indonesia dan Perdamaian Dunia", 11 Juni 2018, dalam <https://kompas.id/baca/opini/2018/06/11/indonesia-dan-perdamaian-dunia/>, diakses pada 18 Juni 2018.

dalam mendukung perspektif gender dan bagian dari pencapaian 4.000 *peacekeepers* 2015-2019. Partisipasi terbesar Indonesia dalam mengirimkan *female peacekeeper* ini dilakukan ke misi UNIFIL. Sayangnya, posisi *female peacekeeper* Indonesia belum menempati posisi substansial tetapi lebih kepada posisi pendukung. Komitmen Indonesia berdasarkan politik luar negeri bebas aktif ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan untuk mendukung pencapaian target gender 15% dari PBB. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017?
- b. Bagaimana dampak partisipasi *female peacekeeper* Indonesia terhadap diplomasi pertahanan Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017.
- b. Menganalisis dampak partisipasi *female peacekeeper* Indonesia terhadap diplomasi pertahanan Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan studi diplomasi pertahanan khususnya dalam perspektif gender. Penelitian ini membahas tentang partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017. *Female peacekeeper* dalam hal ini dilihat sebagai representasi Indonesia yang mendukung implementasi diplomasi pertahanan Indonesia. Diplomasi

pertahanan dalam penelitian ini menggarisbawahi posisi perempuan dalam upaya penjaga perdamaian di wilayah konflik dan pendukung dalam diplomasi pertahanan Indonesia untuk *confidence building measure* dan *capacity building*. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan dan pengembangan kajian diplomasi pertahanan, serta dapat digunakan dalam kajian lanjutan terkait penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis untuk pemerintah dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, dan Markas Besar TNI untuk dapat bekerjasama dalam meningkatkan partisipasi *female peacekeeper* sehingga membawa dampak positif terhadap diplomasi pertahanan Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan kebijakan terkait pentingnya perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian.

BAB 2

KAJIAN TEORITIK

2.1 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi. Teori ini akan digunakan dalam analisis data dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam bab ini selanjutnya juga akan disajikan deskripsi konseptual yang akan digunakan peneliti. Di bagian akhir dalam kajian teoritik ini juga akan dilakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang menyajikan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian ini dan berlanjut kepada kerangka pemikiran. Mengingat fokus penelitian ini adalah partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017, untuk itu teori pertama yang dibahas berikut adalah tentang partisipasi.

2.1.1 Partisipasi

Menurut Aristoteles, partisipasi dalam urusan negara sebagai warga negara merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan dan pemenuhan kepribadian manusia.²² Dalam pandangannya, negara terbaik adalah dimana ada partisipasi luas tanpa kelas yang mendominasi orang lain. Hal ini dapat ditunjukkan dengan distribusi kekayaan yang merata, pendidikan yang meluas, serta pembangunan. Aristoteles juga menyebutkan partisipasi hadir dalam persoalan memilih, memegang jabatan, menghadiri pertemuan publik, membayar pajak, dan membela negara.²³ Membela negara menjadi partisipasi penting yang dapat diilustrasikan salah satunya dengan distribusi kesempatan yang merata baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Partisipasi secara umum merupakan peran serta atau keterlibatan individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu sendiri akan membawa keberhasilan jika pihak yang terlibat secara aktif ikut serta dimulai sejak tahap awal, proses pelaksanaan, sampai dengan

²² Dalam J. Cohen dan N. Uphoff, "Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity", *World Development*, 1980, hlm. 214.

²³ *Ibid*, hlm. 213-235.

perumusan hasil.²⁴ Dalam hal keterlibatan, partisipasi dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Hal ini berarti partisipasi dilihat dari aktor yang melakukan suatu tindakan atau kontribusi. Partisipasi langsung artinya suatu individu atau kelompok secara langsung memberikan kontribusi, pandangan, dan sebagainya dalam suatu isu atau permasalahan. Sedangkan partisipasi tidak langsung yaitu ketika suatu kegiatan atau pandangan didelegasikan atau disampaikan secara representatif kepada aktor lain.

Uphoff (1980) melihat partisipasi bukan sebagai sesuatu yang ada atau tidak ada atau bahkan sesuatu yang bisa diperhitungkan seperti kapasitas atau produksi agrikultur.²⁵ Sementara beberapa studi melihat partisipasi secara jelas didefinisikan sebagai konsep yang dapat diperhitungkan. Hal ini berpotensi menjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikannya dimana berbagai indikator empiris dan dimensi berbeda mungkin saja ditemukan. Dalam hal ini, partisipasi merupakan konsep menyeluruh yang sangat baik jika didekati dengan melihat pada komponen yang spesifik dan lebih konkrit. Secara singkat, dimensi partisipasi berkaitan pada jenis partisipasi yang diambil, seperangkat individu yang terlibat dalam proses partisipasi dan berbagai fitur yang ada tentang bagaimana proses tersebut terjadi.

Lebih lanjut, Uphoff menyebutkan jenis-jenis utama partisipasi yaitu; 1). Partisipasi dalam pembuatan keputusan, 2). Partisipasi dalam implementasi, 3). Partisipasi dalam hal kebermanfaatn, dan 4). Partisipasi dalam evaluasi.²⁶ Dalam pembuatan keputusan, partisipasi berarti tentang keterlibatan dalam perumusan pilihan (alternatif) maupun pertimbangan terhadap suatu isu untuk kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi implementasi berkaitan pada pendayagunaan sumber daya yang ada dalam rangka menjalankan suatu program atau kebijakan.

²⁴ AP. Hadi, Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan, Artikel Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 2013, hlm. 5.

²⁵ J. Cohen dan N. Uphoff, *loc.cit.*

²⁶ *Ibid.*

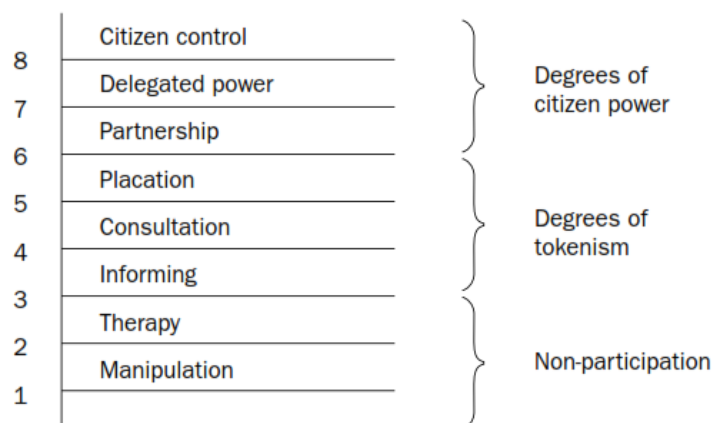
Kemudian, dalam hal kebermanfaatannya, partisipasi bicara tentang keterlibatan yang dilihat dari hasil apa yang akan diterima atau bagaimana presentase keberhasilannya. Terakhir, partisipasi dalam evaluasi berarti tentang penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya.

Sementara itu, Radtke, Holstenkamp, Barnes dan Renn mengklasifikasikan partisipasi ke dalam enam jenis:²⁷

1. Partisipasi finansial dan ekonomi: termasuk partisipasi dalam keputusan pengeluaran, kepemilikan aset, pembayaran aset, dan pengembangan ekonomi lokal.
2. Partisipasi industrial/tempat kerja, seperti dalam hal kegiatan untuk kepentingan bersama dan proyek kolektif.
3. Partisipasi politik. Termasuk keterlibatan warga negara di dalam kebijakan, strategi dan program.
4. Partisipasi sipil yaitu bentuk khusus dari partisipasi politik untuk tujuan partisipasi publik, warga negara.
5. Partisipasi sosial termasuk keterlibatan di dalam forum lokal, forum masyarakat sipil, kegiatan, kampanye, organisasi, kelompok lokal dan komunitas, neighbourhoods, urban districts, komunitas pedesaan dan sebagainya
6. *E-Participation* termasuk ikut andil di dalam jaringan sosial elektronik, kampanye online dan petisi.

Lebih lanjut, Arnstein menjelaskan tipologi partisipasi dalam tangga partisipasi warga negara sebagai berikut:

²⁷ Jorg Radtke, *et.al. Concepts, Formats, and Methods of Participation: Theory and Practice*, dalam buku *Handbuch Energiewende und Partizipation*, (Wiesbaden: Springer, 2018), hlm. 22-25.



Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Menurut Arnstein

Sumber: Norad, *A Framework for Analysing Participation in Development*, Oslo: Norad Evaluation Department. Report 1. May 2013, hlm. 11

Tangga tersebut menjelaskan tingkatan partisipasi dimulai dengan kategori non-partisipasi yang berarti partisipan hadir namun tidak memahami tujuannya (manipulasi) dan ada komunikasi namun hanya satu arah (terapi).²⁸ Selanjutnya adalah kategori partisipasi semu (*degrees of tokenism*), diartikan ada komunikasi terkait informasi secara satu arah, ada kesempatan untuk komunikasi dua arah dalam bentuk konsultasi dan negosiasi. Sedangkan pada tingkat teratas yaitu kategori kekuatan masyarakat (*degrees of power*). Ditandai dengan adanya kemitraan, pendelegasian kekuasaan (termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi), serta kendali masyarakat.

Dalam menganalisis partisipasi, dibutuhkan pendekatan yang dapat mengidentifikasi beberapa aspek sebagai berikut:²⁹

1. Aktor yang berpartisipasi, sebagai contoh adalah gender, umur, faktor ekonomi atau sosial yang mempengaruhi profil partisipan baik secara individu maupun kolektif. Individu yang memiliki kompetensi lebih berpotensi memberikan partisipasi dalam suatu program. Siapa yang berpartisipasi juga tergantung pada kategori

²⁸ Norad, "A Framework for Analysing Participation in Development", Oslo: Norad Evaluation Department, Report 1, May 2013, hlm. 11.

²⁹ *Ibid*, hlm. 24.

partisipasi atau bentuk yang diambil. Penelitian ini lebih lanjut akan melihat partisipasi perempuan dalam berbagai bentuk kegiatan di misi pemelihara perdamaian.

2. Motif dari partisipasi tersebut yang mungkin termasuk ekspektasi terkait manfaat yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung, motif untuk kepentingan bersama atau berdasarkan komitmen terhadap nilai-nilai dan idealisme tertentu. Partisipan mungkin saja diarahkan oleh manfaat material seperti pelatihan, penghasilan dan sebagainya atau juga prospek terhadap pekerjaan di masa depan. Namun juga dapat membawa niat baik, termasuk kemanusiaan, kepercayaan moral, dan sebagainya. Selain itu, juga dimungkinkan partisipasi ada dari kewajiban dan kepercayaan dari masyarakat ataupun pemimpin.
3. Syarat agar partisipasi dapat berjalan efektif dalam mempengaruhi atau mengubah hasil di lapangan. Misalnya, ketersediaan informasi yang akurat, proses pengambilan keputusan yang tidak didominasi oleh kepentingan lain. Syarat untuk partisipasi yang efektif tampak luas lintas kategori dan bentuk-bentuk partisipasi itu sendiri.
4. Hasil dari partisipasi yang di dalam beberapa kasus diurutkan berdasarkan skala pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh Arnstein Ladder dalam tangga partisipasi. Namun juga bisa dari bentuk lain seperti perbaikan kualitas, akuntabilitas pelayanan, dan pembelajaran sosial yang lebih luas dalam menghadapi tantangan kompleks.

Teori partisipasi dalam penelitian ini menggunakan pemahaman yang disampaikan oleh Uphoff dan Arnstein dalam menjelaskan partisipasi perempuan pemelihara perdamaian PBB di Lebanon. Uphoff menyediakan jenis partisipasi yang dapat digunakan dalam analisis yaitu terkait partisipasi dalam hal implementasi, kebermanfaatan dan evaluasi. Begitupun Arnstein dengan tangga partisipasinya menyediakan tingkatan partisipasi yang dapat dikorelasikan dengan partisipasi *female*

peacekeeper yaitu terapi, *informing*, konsultasi, kemitraan dan *delegated power*.

2.2 Deskripsi Konseptual

Penelitian ini menggunakan konsep feminis internasionalisme, diplomasi pertahanan, *peacekeeping* dan *gender mainstreaming*. Konsep-konsep tersebut akan digunakan peneliti dalam analisis data.

2.2.1 Konsep Feminis Internasionalisme

Feminis internasionalisme merupakan teori hubungan internasional yang hadir pasca Perang Dingin sebagai respon dari fenomena sosial terkait posisi perempuan. Sebagai pengembangan dari teori feminisme, menurut Andrew Heywood, kemunculan feminisme itu sendiri memiliki dua gelombang yaitu gelombang pertama (pertengahan abad ke 19 sampai tahun 1960-an) dan gelombang kedua (1960-1970an).³⁰ Gelombang pertama menekankan pada persamaan hak legal, politik, pendidikan dan pekerjaan, sedangkan gelombang kedua (1960-1970an) lebih berkembang dengan hadirnya tuntutan *women's liberation*. Pada gilirannya, gelombang kedua ini mendorong proses revolusioner terhadap perubahan sosial termasuk restrukturisasi ruang privat keluarga dan domestik.

Feminis internasionalisme secara umum mengelaborasi prinsip-prinsip dan standar transnasional untuk memperbaiki posisi perempuan³¹. Upaya memperbaiki posisi perempuan ini mengingat situasi yang kerap dianggap merugikan perempuan seperti persoalan akses untuk pendidikan, pelatihan, wilayah politik atau bahkan posisi perempuan di wilayah konflik. Sejak terbentuknya PBB pada tahun 1945, lingkungan internasional menjadi lebih menarik bagi kelompok-kelompok perempuan. Eksistensinya membuat perempuan turut mendorong negara untuk mengadopsi kesepakatan maupun resolusi yang juga mempertimbangkan berbagai aspek dalam kehidupan perempuan. Hal signifikan yang

³⁰ Andrew Heywood, *loc.cit*

³¹ Hillary Charlesworth, "Martha Nussbaum's Feminist Internationalism", *Ethics*, The University of Chicago Press, Vol. 111, No. 1, 2000, hlm.64-78.

menekan segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan dalam skala internasional setidaknya ditunjukkan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* tahun 1979.

Beberapa aktor turut berkontribusi dalam pengembangan feminisme internasionalisme antara lain Cynthia Enloe, Martha Nussbaum, Christine Sylvester, Jean Elshtain, Ann Ticker dan Laura Sjoberg. Elshtain membawa pemikirannya tentang dualisme yaitu *women's beautiful soul* dan *men's just warrior*. Ini merefleksikan adanya pandangan *stereotype* bahwa perempuan sebagai kaum yang lemah dan laki-laki sebagai aktor utama yang kuat. Elshtain dan Enloe berpendapat bahwa hubungan internasional bersifat maskulin dimana laki-laki mendominasi posisi dan tindakan sedangkan perempuan hanya sebagai penonton yang mengikuti hasil kebijakan.

Lebih lanjut, Nussbaum menjelaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindakan yang bernilai.³² Bukan hanya tindakan yang memberdayakan dirinya sendiri tetapi juga tentang perempuan yang mampu memberi makna atau nilai kepada lingkungannya. Hal ini memungkinkan pemahaman bahwa hambatan bagi persamaan hak perempuan adalah bukan tentang sumber daya yang tidak memadai tetapi tentang adanya pembatasan terhadap kapabilitas perempuan termasuk oleh tradisi dan budaya.

Feminis internasionalisme mengadopsi strategi *top-down* dalam menyelesaikan masalah.³³ Artinya, pada level internasional melalui berbagai hubungan antara negara, komunitas maupun organisasi internasional terdapat upaya meyakinkan negara-negara untuk mengembangkan dan mengadopsi resolusi serta perjanjian dalam rangka memperbaiki kesejahteraan perempuan. Bagaimanapun, upaya yang dilakukan feminis internasionalisme juga menghadapi tantangan dimana

³² Hillary Charlesworth, *loc.cit.*

³³ Fitri Bintang Timur, "The Tales of Three Asian Countries: How Indonesia, India and the Philippines Recruited Women for UN Peacekeeping Missions", *Global*, Vol. 18, No. 1, Mei 2016, hlm 51-75.

terdapat pandangan antipati yang melihat isu ini sebagai langkah yang menantang budaya, tradisi dan kebijakan nasional tertentu. Namun, lobi-lobi internasional kelompok perempuan dan *'peer-pressure'* dari negara demokrasi dan negara-negara maju terus dilakukan sehingga perjanjian internasional tentang perempuan semakin bertambah dan disepakati menjadi agenda bersama. Dengan demikian isu ketidaksetaraan gender dan isu sosial menjadi ramah untuk diperbicangkan dalam level internasional. Asumsi dasar feminis internasionalisme ini akan digunakan dalam mengelaborasi kehadiran perempuan di wilayah *peacekeeping* dengan mengaitkannya kepada resolusi dewan keamanan PBB terkait *women, peace and security*.

Teori ini memungkinkan peneliti melakukan analisis dan elaborasi terhadap terbatasnya keterlibatan perempuan dalam pasukan pemeliharaan perdamaian yang saat ini telah menjadi perhatian global. Bukan hanya itu, teori ini juga memunculkan urgensi terhadap kesetaraan akses terhadap perempuan baik TNI, Polisi maupun sipil di dalam sektor keamanan sehingga kapabilitas yang dimiliki dapat menjadi nilai partisipasi yang positif untuk berbagai pihak terlibat.

2.2.2 Diplomasi Pertahanan

Pemahaman terhadap definisi diplomasi pertahanan memiliki berbagai pandangan baik dari para pakar, akademisi maupun praktisi. Diplomasi Pertahanan menurut Cottey dan Forster merupakan *"peacetime cooperative use of armed forces and related infrastructure (primarily defence ministries) as a tool of foreign and security policy"*.³⁴ Hal ini berarti bahwa diplomasi pertahanan membawa kata kunci penggunaan pasukan bersenjata dan infrastruktur terkait lainnya secara kooperatif dalam masa damai. Aktor utama yang diidentifikasi Cottey dan Forster terletak pada kementerian pertahanan. Kemudian, diplomasi pertahanan digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan.

³⁴ Andrew Cottey dan Anthony Forster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (London: Oxford University Press for The International Institute for Strategic Studies, 2004), hlm. 6.

Definisi tersebut menggambarkan pemahaman yang identik dengan kerjasama militer atau bantuan militer. Dalam aktivitasnya, diplomasi pertahanan ini melibatkan berbagai kegiatan seperti berikut:³⁵

- a. Hubungan bilateral dan multilateral antara pejabat militer dan pejabat kementerian pertahanan,
- b. Penunjukkan atase pertahanan ke negara lain,
- c. Perjanjian kerjasama bilateral dalam hal pertahanan,
- d. Latihan bersama militer,
- e. Penyediaan keahlian dan saran dalam pengendalian secara demokratis terhadap kekuatan bersenjata, manajemen pertahanan, dan wilayah teknis militer,
- f. Hubungan dan pertukaran personel serta unit militer, dan kunjungan kapal
- g. Penempatan personel militer maupun sipil di kementerian pertahanan atau pasukan bersenjata negara mitra,
- h. Pengerahan tim pelatihan,
- i. Penyediaan peralatan militer dan bantuan material lainnya,
- j. Latihan militer baik secara bilateral maupun multilateral.

Berkembang dari pemikiran tersebut, menurut Singh, Diplomasi pertahanan merupakan variasi dari *soft power* yang digunakan untuk memilih pemikiran strategik negara lain.³⁶ Diplomasi pertahanan dianggap sebagai alat geopolitik yang efektif. Kekuatan militer saja tidak cukup untuk menghadapi konflik modern. Kemampuan kekuatan militer bukan hanya tentang kapasitas untuk meletakkan bom dan sebagainya tetapi juga kemampuan untuk melihat lebih dari penggunaan kekerasan dan justru berupaya mengutamakan cara alternatif untuk mempromosikan kepentingan nasional.

³⁵ *Ibid*, hlm. 7.

³⁶ Vinod Bhatia, Vijai S. Chaudhari, dan Ranjit Singh, "*Defence Diplomacy and International Military Co-Operation*", (New Delhi: Centre for Joint Warfare Studies, 2016), hlm. 18.

Diplomasi pertahanan bukan hanya bicara tentang upaya memperkuat kemampuan pertahanan, tetapi juga digunakan sebagai instrumen membangun hubungan kerjasama.³⁷ Hal ini berarti diplomasi pertahanan menjadi cara dalam mencegah konflik, mengubah potensi konflik menjadi kondisi yang lebih kooperatif dan dapat membangun rasa saling percaya. Upaya ini berangkat dari asumsi bahwa negara menghadapi ancaman di setiap lingkungan strategisnya. Tidak ada satu negara pun yang mampu membangun pertahanannya sendiri tanpa bantuan negara lain atau aktor lain.³⁸

Lebih lanjut, Cottey dan Forster juga menyampaikan adanya hubungan aspek politik dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan misalnya melalui kerjasama militer.³⁹ Ini menandakan adanya kemauan atau *willingness* negara untuk memperluas kerjasama, rasa saling percaya (*mutual trust*), *confidence building measure (CBM)* dan komitmen kerjasama dalam mengatasi atau mengelola perbedaan. Adapun Baviera menyebutkan bahwa CBM merupakan tindakan dan kesepakatan yang didesain untuk membangun kepercayaan baik antar *potential adversaries* maupun negara-negara secara bilateral maupun multilateral. Terdapat empat wilayah CBM sebagai indikator secara multilateral yang disebutkannya antara lain komunikasi, transparansi, konsultasi, *good will*, dan *constraints*.⁴⁰ Komunikasi misalnya dengan adanya dialog dengan pihak terkait; transparansi dengan adanya publikasi terkait pertahanan; konsultasi seperti adanya aktivitas *joint commission*; *good will* melalui penerbitan *code of conduct*, dan; *constraint* seperti adanya kesepakatan *disarmament/demilitarization*. Indikator komunikasi dalam hal ini akan

³⁷ Andrew Cottey dan Anthony Forster, *op.cit.* hlm. 15-22.

³⁸ Alexandra Kerr, *Defense Institution Building: A New Paradigm for the 21st Century*, dalam buku *Effective, Legitimate, Secure: Insights for Defense Institution Building*, (Washington DC: Center for Complex Operations, Institute for National Strategic Studies, National Defense University, 2017), hlm, ix-xxvii.

³⁹ Andrew Cottey dan Anthony Forster, *loc.cit.*

⁴⁰ Aileen S.P. Baviera, "Bilateral Confidence Building with China in Relation to the South China Seas Dispute: A Philippine Perspective", Canada: Department of Foreign Affairs and International Trade, February 2001, hlm. 5.

digunakan peneliti dalam bab 4 menjelaskan pembahasan mengenai dampak partisipasi *female peacekeepers* Indonesia terhadap diplomasi pertahanan Indonesia.

Hal ini sejalan dengan beberapa ukuran yang disebutkan oleh *United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA)*, bahwa komunikasi merupakan salah satu ukuran CBM.⁴¹ Selain itu juga disebutkan observasi, kerjasama, *military constraint*, dan pelatihan-pendidikan. Dalam hal komunikasi dapat terjadi pertukaran informasi, membentuk komunikasi antar kepala negara/personel militer/representasi negara, notifikasi mengenai pergerakan pasukan, dan sebagainya. Bahkan, memastikan pengerahan personel perempuan turut menjadi salah satu ukuran dalam kerjasama multilateral dalam rangka CBM. Hal ini juga digunakan peneliti dalam menganalisis data kaitannya dengan pelaksanaan diplomasi pertahanan.

Diplomasi pertahanan dapat mendorong negara mitra untuk bekerjasama di bidang lain secara strategis. Terbentuknya hubungan strategis (*strategic engagement*) sendiri membutuhkan waktu yang panjang dalam mendukung kepentingan jangka panjang. Untuk sampai pada tahap tersebut, negara dapat melakukan upaya diplomasi pertahanan secara bertahap, mempromosikan persepsi positif terhadap mitra kerjasama hingga membentuk rasa percaya diri. Hal ini digunakan peneliti dalam analisis lebih lanjut terkait upaya Indonesia mengirimkan perempuan pemelihara perdamaian PBB.

Diplomasi pertahanan dapat menjadi alat dalam membangun persepsi kepentingan bersama. Sebagai contoh, kerjasama militer terkait patroli bersama atau bahkan latihan bersama dilakukan dalam rangka menghadapi perkembangan terorisme di kawasan. Ini menunjukkan bahwa terorisme adalah musuh bersama dan stabilitas keamanan kawasan menjadi kepentingan bersama. Begitupun dengan pengiriman

⁴¹ UNODA, "Repository of Military Confidence-Building Measures", dalam <https://www.un.org/disarmament/cbms/repository-of-military-confidence-building-measures/>, diakses pada 13 Agustus 2018.

pasukan perdamaian dunia, menunjukkan adanya kepentingan bersama dalam menjaga perdamaian dunia, mencegah konflik atau bahkan misi kemanusiaan. Dalam analisis *Centre for Strategic Studies New Zealand*, asumsi utama terkait diplomasi pertahanan bahwa interaksi yang terjadi antar aktor atau partisipan merupakan hal yang positif dan lebih bermanfaat daripada hanya menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik maupun tujuan lainnya seperti stabilitas, keamanan, pengaruh, status dan sebagainya.⁴²

Sebagai afirmasi, Anton Du Plessis mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai *“the use of armed forces in operations other than war, building on their trained expertise and discipline to achieve national and foreign objectives abroad”*.⁴³ Ini dapat dipahami serupa dengan definisi yang diberikan oleh Cottey dan Forster bahwa diplomasi pertahanan itu tentang penggunaan pasukan bersenjata pada masa damai. Namun demikian, Du Plessis juga terlihat menekankan pada pengembangan kapasitas (*capacity building*) melalui pelatihan. *Capacity building* ini diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan dan profesionalisme pasukan militer.

Menurut Prof. Riyadi Soeprapto,⁴⁴ *capacity building* memiliki perhatian pada enam dimensi yaitu: 1) Pengembangan sumber daya manusia; 2) Penguatan organisasi dan manajemen; 3) Penyediaan sumber daya, saran dan prasarana; 4) Jaringan; 5) Lingkungan, dan 6) Mandat, kemampuan fiskal dan program. Lebih lanjut, dimensi ini dipersempit dalam tiga dimensi yaitu individu, organisasi, dan sistem. Pada tingkatan individu, *capacity building* dapat dilaksanakan dalam

⁴² CSS, “Regional Defence Diplomacy: What is it and What are its Limits?”, *CSS Strategic Background Paper*, New Zealand: CSS, 2015, hlm. 3.

⁴³ Anton du Plessis, “Defence Diplomacy: Conceptual and Practical Dimensions with Specific Reference to South Africa”, *Strategic Review for Southern Africa* 30 (2), University of Pretoria, Department of Political Sciences, November 2008, hlm. 92.

⁴⁴ H.R. Riyadi Soeprapto, *The Capacity Building for Local Government Toward Good Governance*, World Bank, 2010.

Enam dimensi *capacity building* dirangkum dari berbagai literatur (Fiszbein, 1997; Grindle, 1997; World Bank dalam Edralin, 1997; Eade, 1998; Mentz, 1997) dalam H.R. Riyadi Soeprapto, 2010.

keterampilan individu, persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan kerja dan motivasi dari pekerjaan orang di dalam organisasi. Sedangkan dalam tingkatan organisasi, hal ini dapat terjadi melalui struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, serta hubungan jaringan organisasi. Selanjutnya, pada tingkatan sistem, *capacity building* dapat terjadi dalam kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Adapun partisipasi merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam rangka kegiatan *capacity building*.

Lebih jauh, Rodon Pedrason menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan merupakan:

*“all methods and strategies used by countries that may be in a state of competition with one another, but they have used a certain kind of practice including economic, culture, political cooperation, defence cooperation and diplomacy to make friends, hopefully cooperate with one another, and, most importantly, to build and increase mutual trust”.*⁴⁵

Diplomasi pertahanan dilihat sebagai metode dan strategi yang digunakan negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Metode dan strategi ini memungkinkan penggunaan aktivitas-aktivitas tertentu termasuk kerjasama ekonomi, budaya, politik maupun pertahanan itu sendiri serta diplomasi untuk menciptakan pertemanan sehingga dapat bekerjasama satu sama lain. Kerjasama ini pada intinya diharapkan mampu membangun dan meningkatkan rasa saling percaya. Menurut Pedrason, dalam terminologi diplomasi pertahanan, keterlibatan militer dalam kebijakan luar negeri bukan semata-mata terjadi di masa damai. Hal ini bergantung pada tujuan dari pelibatan militer itu sendiri. Dengan

⁴⁵ Rodon Pedrason, “ASEAN’s Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?”, *Disertasi*, (Heidelberg, Institut Fur Politische Wissenschaft, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2015), hlm. 16.

demikian diplomasi pertahanan mencakup bentuk kegiatan yang luas seperti disebutkan sebelumnya terkait kerjasama militer, penunjukkan atase pertahanan dan sebagainya.

Pada dasarnya, diplomasi pertahanan menjadi penting bagi setiap negara untuk mencapai kepentingan nasional negara itu sendiri. Dengan demikian, interaksi yang dibangun dalam kerangka diplomasi pertahanan akan berupaya memberikan keuntungan satu sama lain. Tiga karakteristik diplomasi pertahanan:

1. Diplomasi pertahanan bertujuan untuk pembangunan rasa percaya diri (*confidence building*) yang pada gilirannya dapat mencegah konflik melalui persepsi yang kuat terhadap kepentingan bersama terhadap musuh potensial. Rasa saling percaya dan memahami dapat dibangun dan memungkinkan kerjasama di wilayah lain
2. Diplomasi pertahanan merupakan proses *good governance* dimana sipil mengendalikan militer. Diplomasi pertahanan dapat mendorong reformasi dalam sektor keamanan dan pertahanan. Artinya, kendali sipil terhadap kebijakan pertahanan dan pasukan bersenjata.
3. Diplomasi pertahanan merupakan cara atau alat untuk mengejar tujuan keamanan dan luar negeri yang lebih luas melalui dukungan dari negara lain dalam wilayah pertahanan, bantuan kemanusiaan, masalah keamanan antar negara dan kapasitas perdamaian. Hal ini secara normal terjadi dalam bentuk kegiatan *peacekeeping* yang termasuk di dalamnya adalah dialog politik.

Terdapat lima dimensi diplomasi pertahanan yaitu; 1). Untuk memperkuat kerjasama dengan yang sempat menjadi musuh/lawan dan melibatkan potensi musuh untuk mencegah ketidakpercayaan, 2). Untuk meningkatkan reformasi sektor keamanan di dalam militer asing, khususnya dalam pengembangan pasukan bersenjata secara demokratis untuk menghargai hak asasi manusia dan mempromosikan *good*

governance, 3). Diplomasi pertahanan dikerahkan untuk melawan pengembangan senjata pemusnah masal (*weapon of mass destruction*), 4). Diplomasi pertahanan dipersiapkan untuk bantuan kemanusiaan dan operasi penanggulangan bencana, dan 5). Diplomasi pertahanan mengembangkan kapabilitas militer untuk operasi pemelihara perdamaian PBB (*UN Peacekeeping Operations/UNPKOs*).

Memperhatikan pentingnya diplomasi pertahanan, penelitian ini menggunakan teori Cottey dan Forster untuk menjelaskan aktivitas *peacekeeping* yang melibatkan *female peacekeeper* khususnya aktor militer. Peneliti juga menggunakan tipologi CBM oleh Baviera dan UNODA serta dimensi *capacity building* oleh Riyadhhi Soeprapto dalam analisis dampak partisipasi terhadap diplomasi pertahanan Indonesia.

2.2.3 Konsep *Peacekeeping* PBB

Misi pemeliharaan perdamaian PBB (*peacekeeping operations*) merupakan salah satu bagian utama PBB yang menjalankan mandat untuk membantu negara-negara terkena konflik dalam menciptakan perdamaian.⁴⁶ Misi pemeliharaan perdamaian ini telah berlangsung sejak tahun 1948. PBB sendiri membentuk departemen khusus yang membidangi pemeliharaan perdamaian ini pada tahun 1992 dan disebut sebagai *Department of Peacekeeping Operations (DPKO)*.⁴⁷ Berdasarkan Piagam PBB, penanggung jawab utama terkait pemeliharaan perdamaian dan keamanan adalah Dewan Keamanan (*Security Council*). Dilihat dari basis hukumnya, pemeliharaan perdamaian ini dapat ditemukan dalam Piagam PBB Bab VI dan Bab VII. Bab VI yaitu tentang "*Pacific settlement of dispute*" yang menekankan pada penyelesaian konflik secara damai/tanpa kekerasan dan Bab VII tentang "*Action with respect to peace, breaches of the peace, and acts of aggression*" yang memungkinkan

⁴⁶ United Nations, "Brief Introduction to UN Peacekeeping", dalam Civil Affairs Handbook, UNDPKO, <http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/civilhandbook/Chapter1.pdf>, diakses pada 2 Juli 2018.

⁴⁷ *Ibid.*

penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi situasi yang meningkat di wilayah operasi.⁴⁸

Misi ini didasari oleh tiga prinsip dasar yaitu *consent of the parties*, *impartiality*, dan *non-use of force except in self-defense and defense of the mandate*. *Consent of the parties* berarti bahwa operasi pemeliharaan perdamaian PBB dikerahkan atas dasar persetujuan dari pihak utama di dalam konflik. Melalui persetujuan negara terkait, PBB baru dapat melakukan tindakan untuk menjalankan mandat. Ini penting agar dalam pelaksanaannya dapat dilandasi oleh rasa saling percaya. Selanjutnya, *impartiality*, yaitu prinsip dimana pasukan pemelihara perdamaian harus menjalankan mandat tanpa memihak pada pihak bertikai manapun. Prinsip yang terakhir yaitu *non-use of force except in self-defense and defense of the mandate*, maksudnya adalah penggunaan kekerasan hanya boleh dilakukan untuk kondisi mempertahankan diri dan pertahanan atas mandat yang diberikan atau otorisasi dari Dewan Keamanan.

Lebih lanjut, PBB tidak dapat menjalankan misi pemeliharaan perdamaianya sendiri, melainkan dengan bantuan kontribusi dari negara anggota atau kontributor. Pasukan baik militer maupun polisi dikirim oleh negara kontributor berdasarkan mandat PBB. Mereka yang menjadi pemelihara perdamaian dapat diidentifikasi antara personel yang menggunakan seragam (*uniformed troops*) yaitu personel militer, polisi, pengamat militer (*military observer*) dan staf (*staff officer*); personel yang tidak menggunakan seragam atau masyarakat sipil (*civilian*); dan relawan PBB (*volunteers*).

Secara signifikan terkait urusan sipil, Komite Khusus terhadap Operasi Pemeliharaan Perdamaian sepakat pada tahun 2011 untuk merujuk fungsi urusan sipil pertama kali dalam laporan legislatif (A/65/19), mengakui:

⁴⁸ United Nations, "Chapter VII; Action with Respect to Threats to The Peace, Breaches of The Peace and Acts of Aggression", dalam <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html>, diakses pada 2 Juli 2018

“...the important role of Civil Affairs Officers in United Nations peacekeeping operations, including through cross mission representation, monitoring and facilitation at the local level, support to confidence building, conflict management and reconciliation and support to restoration and extension of state authority. The Special Committee notes that successful implementation of many peacekeeping mandates requires consistent engagement with the local government and population stresses that the inclusion of local staff in civil affairs components has been important.”⁴⁹

Berdasarkan konsep *peacekeeping* tersebut, peneliti akan menjelaskan mengenai partisipasi perempuan pemelihara perdamaian dalam misi UNIFIL dengan memperhatikan tugas dan fungsi aktor-aktor yang terlibat.

2.2.4 Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)

Pengarusutamaan gender merupakan strategi global utama yang dibentuk untuk mempromosikan kesetaraan gender. Strategi ini secara global dibahas dalam *World Conference on Women* keempat di Beijing pada tahun 1995. Dua tahun kemudian, ECOSOC menyepakati kesimpulan (1997/2) untuk membentuk beberapa prinsip terhadap pengarusutamaan gender. Dalam perkembangannya, pengarusutamaan gender ini turut diarahkan oleh Sekretaris Jenderal PBB kepada seluruh kepala badan di PBB. Implementasinya secara khusus dibahas dalam Sidang Umum tahun 2000 hingga pada Juli 2001 ECOSOC mengadopsi resolusi pengarusutamaan gender.⁵⁰

Definisi pengarusutamaan gender itu sendiri dimaknai oleh ECOSOC sebagai berikut:

⁴⁹ United Nations, “Brief Introduction to UN Peacekeeping”, dalam *Civil Affairs Handbook*, UNDPKO, <http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/civilhandbook/Chapter1.pdf>, diakses pada 2 Juli 2018.

⁵⁰ United Nations, *Gender Mainstreaming: An Overview*, New York: Office of the Special Adviser on Gender Issues, 2002. hlm. v-vii.

“...the process of assessing the implication for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality.”⁵¹

Hal ini berarti bahwa pengarusutamaan gender membawa persepsi, pengalaman, pengetahuan dan kepentingan baik dari laki-laki maupun perempuan untuk dapat berperan dalam berbagi wilayah dan level termasuk perumusan kebijakan, perencanaan, pembuatan keputusan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi. Pengarusutamaan ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan perubahan dalam tujuan, strategi dan tindakan untuk memastikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki dapat memberikan pengaruh, partisipasi aktif dan bermanfaat bagi proses pembangunan.

Selanjutnya, Uni Eropa mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai pengorganisasian kembali, perbaikan, pengembangan dan evaluasi terhadap proses pembuatan kebijakan di seluruh wilayah kebijakan dan pekerjaan suatu organisasi.⁵² Tujuannya adalah untuk membuat perspektif gender menjadi bagian dari setiap proses pembuatan keputusan dan memberdayakannya dalam setiap proses, memastikan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Begitupun dengan UNDP, pengarusutamaan gender dipahami sebagai upaya memasukkan perhatian gender ke dalam seluruh kebijakan, program, administrasi dan kegiatan finansial, serta prosedur organisasi.⁵³ Dengan demikian, hal ini akan memberikan kontribusi terhadap transformasi organisasi.

⁵¹ *Ibid*, hlm. v.

⁵² Astrida Neimanis, *Gender Mainstreaming in Practice: A HANDBOOK UNDP Regional Centre for Europe and the CIS (UNDP RBEC)*, 2nd Edition, 2005, hlm. 1-5.

⁵³ *Ibid*.

Pengarusutamaan gender bukan berarti membangun pemisahan antara proyek wanita dalam suatu program kerja. Maksudnya adalah memberikan perhatian gender sebagai bagian integral dari seluruh aktivitas. Membuat perspektif gender tentang apa yang laki-laki dan perempuan lakukan, proses pengambilan keputusan dan sebagainya. Ini penting untuk melihat keterkaitan (*linkages*) antara pengarusutamaan gender dalam suatu pekerjaan PBB yang substantive dan mempromosikan kesempatan yang sama untuk keseimbangan gender di dalam PBB itu sendiri.⁵⁴

Mandat terhadap pengarusutamaan gender ini semakin berkembang ke dalam berbagai wilayah pekerjaan PBB termasuk pelucutan senjata, pengurangan kemiskinan, makro-ekonomi, kesehatan, pendidikan dan perdagangan. Begitupun dengan Dewan Keamanan PBB yang turut mengadopsi resolusi 1325 pada Oktober 2000 berfokus terhadap perspektif gender di operasi perdamaian. Mandat khusus turut hadir untuk memastikan bahwa perspektif gender dimasukkan ke dalam proses perencanaan utama dan dokumen-dokumen di dalam PBB, baik rencana menengah, program anggaran dan program penilaian (sebagai contoh adanya Resolusi Sidang Umum PBB Desember 1997 (A/Res/52/100). Begitupun dengan DPKO, pada tahun 2006, juga turut menerbitkan arahan kebijakan terkait kesetaraan gender dalam operasi pemeliharaan perdamaian yang memberi makna terhadap urgensi perspektif gender dalam setiap kebijakan maupun program dan kegiatan dalam setiap misi operasi termasuk struktur, sumber daya dan anggaran misi.⁵⁵

Menyadari adanya kritik terhadap berbagai fenomena ketidaksetaraan gender secara global, dibutuhkan upaya yang lebih luas.

⁵⁴ P Schouten dan H. Dunham, "Theory Talk #48: Cynthia Enloe on Militarization, Feminism, and the International Politics of Banana Boats", Mei 2012, *Theory Talks*, dalam <http://www.theorytalks.org/2012/05/theory-talk-48.html>, diakses pada 2 Juli 2018.

⁵⁵ Satwika Pramasatya, "Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco", *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm. 51-62.

Pengarusutamaan gender sebagai strategi yang lebih luas untuk menyikapi fenomena tersebut. Dibutuhkan perubahan dalam banyak tingkatan termasuk sikap dalam menjalin relasi, kerangka institusi dan legal formalnya, institusi ekonomi dan struktur pembuat keputusan. Persoalannya adalah bukan hanya tentang membawa perempuan ke dalam institusi dan proses yang ada, tetapi tentang adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali struktur dan praktek yang melanggengkan ketidaksetaraan di berbagai hal. Targetnya bukan perempuan tetapi “kesetaraan gender” dalam pembangunan.

Akhirnya, pengarusutamaan gender tidak dapat dicapai tanpa komitmen institusional secara eksplisit terhadap strategi dan upaya sistematis untuk mengimplementasikannya. Dibutuhkan identifikasi terhadap perspektif gender di berbagai sektor dan isu. Tujuannya bukan hanya persoalan kesetaraan gender tetapi juga tujuan penting lainnya. Untuk itu harus diberikan prioritas untuk mengatasi tantangan pengarusutamaan gender sebagai alat penting dalam memastikan implementasi penuh. Melalui konsep ini peneliti akan menjelaskan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan penerapan perspektif gender dalam ranah keamanan dan pertahanan sebagai mandat dari PBB.

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini memperhatikan beberapa tulisan ilmiah atau penelitian terdahulu sebagai referensi dan pembanding. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Bintang Timur dalam tulisannya di Jurnal Global Volume 15 Nomor 1 Mei 2015 berjudul “*The Tales of Three Asian Countries: How Indonesia, India and The Philippines Recruited Women for UN Peacekeeping Missions*”.⁵⁶ Dalam tulisan tersebut dikaji perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia, India dan Filipina dalam merekrut perempuan sebagai *peacekeeper*. Hal ini dilakukan penulis (Fitri Bintang Timur) untuk menjawab persoalan tentang

⁵⁶ Fitri Bintang Timur, “The Tales of Three Asian Countries: How Indonesia, India and The Philippines Recruited Women for UN Peacekeeping Missions”, *Global*, Vol. 15, No.1, Mei 2015, hlm. 51-75.

keberadaan perempuan dalam mendukung pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hasil yang didapat dari penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat perbedaan pendekatan di tiga negara tersebut dalam merekrut perempuan di bidang keamanan; Indonesia memberikan batasan bagi perempuan untuk masuk ke dalam akademi militer dan untuk sampai pada proses pengerahan dibutuhkan izin dari pasangan atau suami. Sedangkan India tidak memperbolehkan perempuan untuk mendapat penempatan kerja secara permanen sehingga sulit bagi mereka untuk memperoleh pengalaman yang mendukung mereka untuk dapat dikerahkan sebagai peacekeeper. Kepentingan India untuk dapat menjadi anggota permanen Dewan Keamanan PBB membuat India mengerahkan unit pasukan perempuan pertamanya pada tahun 2007 di Liberia. Berbeda dengan Filipina, negara ini dinilai paling baik untuk posisi perempuan terkait kesetaraan sehingga perempuan dapat mengakses semua posisi pertahanan dan kemanan pada tahun 2009. Pengurangan hambatan bagi perempuan membuat Filipina dapat mengerahkan pasukan perempuan lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dari ketiga negara tersebut juga ditemukan persamaan bahwa negara-negara tersebut tidak mengirim pasukannya ke misi PBB yang dianggap terlalu berbahaya. Ini menunjukkan bahwa PBB dapat memberikan agendanya agar negara berkontribusi dalam persamaan gender namun kepentingan nasional masih menjadi hal utama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Leonard F. Hutabarat dalam tulisannya di Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Agustus 2017, Volume 7 Nomor 2, berjudul "Peningkatan *Female Peacekeepers* Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB".⁵⁷ Tulisan tersebut menjelaskan peningkatan kontribusi jumlah personel *female peacekeepers* Indonesia pada periode tahun 2009-2016 dan membahas alasan perlunya Indonesia

⁵⁷ Leonard F. Hutabarat, "Peningkatan Female Peacekeepers Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Volume 7 Nomor 2, 2017, hlm. 67-83.

untuk mendukung dan mempertimbangkan pengiriman *female peacekeepers* dalam jumlah yang lebih banyak ke beberapa operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

Hutabarat menyimpulkan bahwa partisipasi Indonesia pada pemelihara perdamaian PBB semakin meningkat untuk kepentingan nasional Indonesia. Hal ini bermanfaat untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai “*emerging power/economies*”. Komitmen Indonesia ditunjukkan dengan pembentukan PMPP, IPSC, pengiriman kapal laut dan satgas helicopter UNIFIL di Lebanon dan Darfur di Sudan. Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu melakukan *review* terhadap Buku Putih Pertahanan Indonesia dengan mempertimbangkan peran perempuan pemelihara perdamaian di masa depan. Perlu upaya lebih terintegrasi untuk melibatkan lebih banyak lagi perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh mahasiswi Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Mutia Zakia Salma, Januari 2018 berjudul “Pengarusutamaan Gender pada Misi Pemeliharaan Perdamaian oleh Indonesia (Studi Keterlibatan Wanita Tentara Nasional Indonesia).⁵⁸ Penelitian kualitatif tersebut menjelaskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian: 1). Bagaimana keterlibatana wanita Tentara Nasional Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian? dan 2). Bagaimana penerapan pengarusutamaan gender pada misi pemeliharaan perdamaian oleh Indonesia? Adapun teori yang digunakan yaitu teori manajemen konflik, resolusi konflik dan perubahan. Dilengkapi dengan konsep misi pemeliharaan perdamaian, dan norma pengarusutamaan gender pada misi pemelihraan perdamaian.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perempuan selalu terlibat dalam misi perdamaian yang dikirim oleh Indonesia mencapai sekitar 1.5% untuk tahun 2005 hingga 2016. Disampaikan bahwa secara umum

⁵⁸ Mutia Zakia Salma, “Pengarusutamaan Gender pada Misi Pemeliharaan Perdamaian oleh Indonesia (Studi Keterlibatan Wanita Tentara Nasional Indonesia)”, *Tesis Magister*. (Jakarta: Program Magister Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, 2018).

Indonesia masih memiliki rasio kuantitas militer perempuan yang relatif kecil. Namun, hal ini merupakan pencapaian yang cukup jika melihat target PBB untuk mencapai 15% porsi perempuan dalam komponen militer. Untuk persoalan pengarusutamaan gender, Indonesia juga turut menerapkannya namun masih belum menyentuh ranah structural ditunjukkan dengan tidak adanya unit gender dalam misi pemeliharaan perdamaian. Lebih lanjut, penambahan jumlah wanita TNI untuk terlibat dalam misi cenderung situasional.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Bishwambhar Ghimire berjudul “*Contributions and Challenges: Female Participations in UN Peacekeeping Missions*” diterbitkan dalam *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 7 No. 3, Maret 2017.⁵⁹ Ghimire menganalisis kontribusi dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dan menekankan pada alasan perlunya PBB mempertimbangkan peningkatan partisipasi perempuan. Hasil yang disoroti dalam tulisan ini yaitu bahwa partisipasi perempuan pemelihara perdamaian begitu berharga dalam membentuk perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan serta penting dalam memelihara perspektif gender. Kehadiran perempuan dalam wilayah misi perdamaian menjadi bermanfaat mengingat perbedaan budaya dimana pada suatu kondisi perempuan dilarang untuk bicara kepada laki-laki dan mereka setidaknya lebih memiliki rasa empati dan tidak agresif. Tulisannya diakhiri dengan pernyataan bahwa PBB dan beberapa penelitian tentang perempuan dalam misi perdamaian sepakat bahwa baik laki-laki maupun perempuan (tentara, polisi dan seluruh sektor keamanan) dibutuhkan untuk perdamaian yang berkelanjutan. Dengan demikian, baginya, PBB perlu melakukan hal lebih termasuk pelatihan dan kebijakan inklusif terkait partisipasi perempuan.

Adapun keterbaruan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek penelitian yaitu UNIFIL tahun

⁵⁹ Bishwambhar Ghimire, *op.cit*, hlm. 207-213.

2015-2017 dan analisis dampaknya terhadap pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia. Analisis partisipasi dan perspektif diplomasi pertahanan untuk *confidence building measure* dan *capacity building* menjadi hal penting yang akan digunakan peneliti lebih lanjut dalam penelitian ini sehingga diharapkan mampu memberikan masukan pada Kementerian/Lembaga terkait untuk bekerja bersama dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam mendukung implementasi diplomasi pertahanan Indonesia. Lebih lanjut, penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Judul dan Tahun | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|-----|---------------------|--|-------------------|---|---|
| 1. | Fitra Bintang Timur | <p><i>“The Tales of Three Asian Countries: How Indonesia, India and The Philippines Recruited Women for UN Peacekeeping Missions”.</i></p> <p>Jurnal Global Volume 15 Nomor 1 Mei 2015</p> | Kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perbedaan pendekatan di tiga negara tersebut dalam merekrut perempuan di bidang keamanan; - Indonesia memberikan batasan bagi perempuan untuk masuk ke dalam akademi militer dan untuk sampai pada proses pengerahan dibutuhkan izin dari pasangan atau suami. - India tidak memperbolehkan perempuan untuk mendapat penempatan kerja secara permanen namun berhasil mengerahkan unit pasukan perempuan pertamanya pada tahun 2007 di Liberia. - Filipina, negara ini dinilai paling baik untuk posisi perempuan terkait kesetaraan sehingga perempuan dapat mengakses semua posisi pertahanan dan kemanan pada tahun 2009. | <p>Persamaan dengan penelitian ini adalah subyek penelitian yaitu perempuan pemelihara perdamaian. Namun berbeda fokusnya dimana Fitri Bintang Timur menyoroti tiga negara sedangkan penelitian ini berfokus pada Indonesia saja dan pada misi UNIFIL. Selain itu juga berbeda dimana penelitian ini juga berfokus untuk menarik hubungannya dengan diplomasi pertahanan Indonesia.</p> |

| No. | Peneliti | Judul dan Tahun | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|-----|----------------------|---|-------------------|---|---|
| | | | | - Ketiga negara tidak mengirim pasukannya ke misi PBB yang dianggap terlalu berbahaya. | |
| 2. | Bishwambhar Ghimire | <p><i>“Contributions and Challenges: Female Participations in UN Peacekeeping Missions”</i></p> <p><i>International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 7 No. 3, Maret 2017.</i></p> | Kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi perempuan pemelihara perdamaian begitu berharga dalam membentuk perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan serta penting dalam memelihara perspektif gender. - PBB dan beberapa penelitian tentang perempuan dalam misi perdamaian sepakat bahwa baik laki-laki maupun perempuan (tentara, polisi dan seluruh sektor keamanan) dibutuhkan untuk perdamaian yang berkelanjutan. - PBB perlu melakukan hal lebih termasuk pelatihan dan kebijakan inklusif terkait partisipasi perempuan. | Persamaan dalam penelitian ini adalah partisipasi perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai subyek penelitian. Fokus penelitian ini yaitu pada misi UNIFIL tahun 2015-2017 sehingga menjadi pembeda dengan penelitian Ghimire. |
| 3. | Leonard F. Hutabarat | <p>“Peningkatan <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia dalam Misi Pemeliharaan</p> | Kualitatif | - Partisipasi Indonesia pada pemeliharaan perdamaian PBB semakin meningkat untuk kepentingan nasional Indonesia dan bermanfaat | Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti <i>female peacekeepers</i> Indonesia dalam |

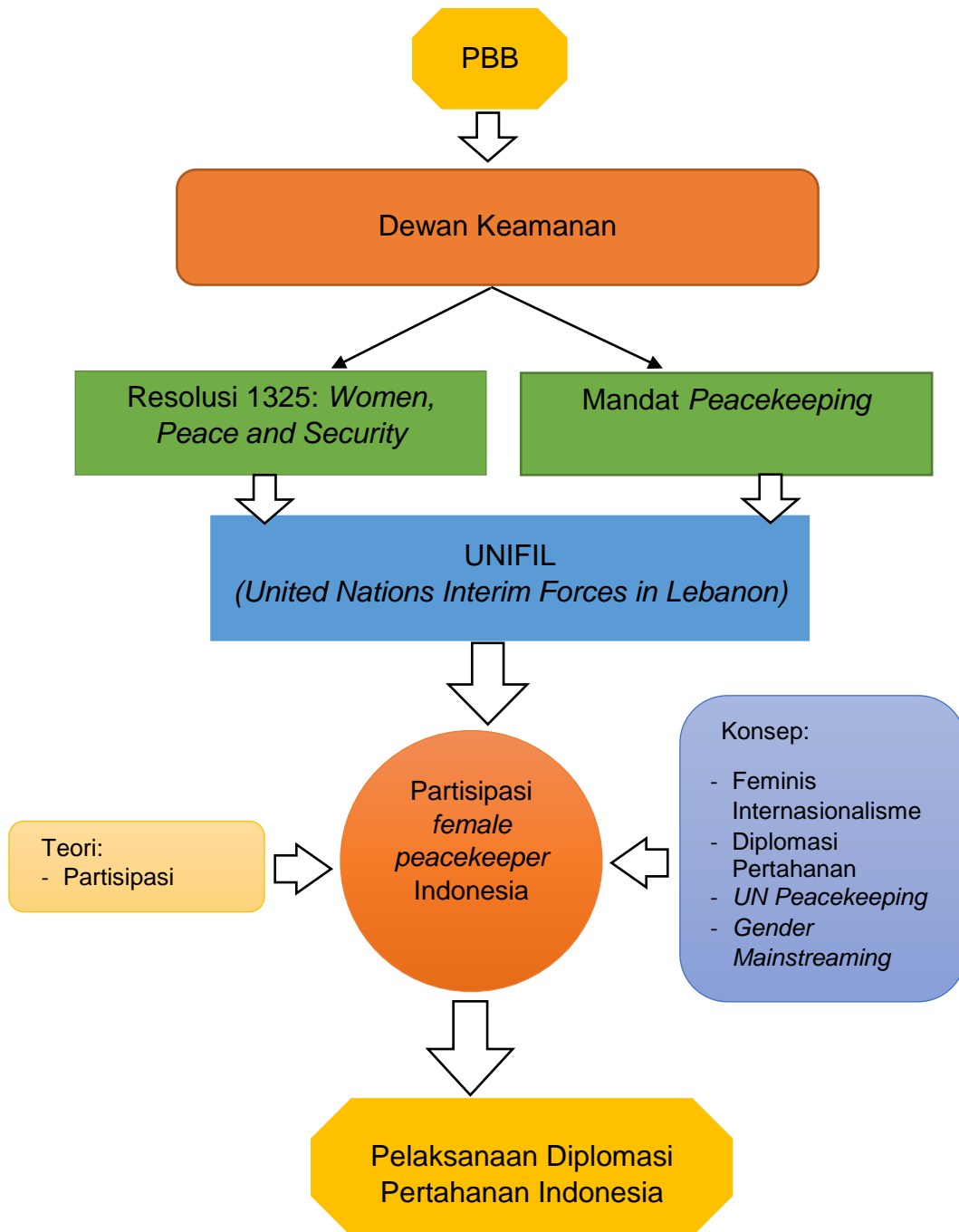
| No. | Peneliti | Judul dan Tahun | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|--|--|
| | | <p>Perdamaian PBB”</p> <p>Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Agustus 2017, Volume 7 Nomor 2</p> | | <p>untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai “<i>emerging power/economies</i>”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Indonesia ditunjukkan dengan pembentukan PMPP, IPSC, pengiriman kapal laut dan satgas helicopter UNIFIL di Lebanon dan Darfur di Sudan. - Pemerintah Indonesia perlu melakukan <i>review</i> terhadap Buku Putih Pertahanan Indonesia dengan mempertimbangkan peran perempuan pemelihara perdamaian di masa depan. | <p>menjalankan resolusi DK PBB 1325. Perbedaannya terletak pada sub-fokus penelitian dimana penelitian ini fokus pada misi UNIFIL 2015-2017 dan juga menyoroti dampak partisipasi perempuan pemelihara perdamaian terhadap diplomasi pertahanan Indonesia.</p> |
| 4. | Mutia Zakia Salma | <p>“Pengarusutamaan Gender pada Misi Pemeliharaan Perdamaian oleh Indonesia (Studi Keterlibatan Wanita Tentara Nasional Indonesia)”</p> <p>Tesis Program Studi Damai dan</p> | Kualitatif Deskriptif analitik | <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan selalu terlibat dalam misi perdamaian yang dikirim oleh Indonesia mencapai sekitar 1.5% untuk tahun 2005 hingga 2016. - Indonesia masih memiliki rasio kuantitas militer perempuan yang relatif kecil. Namun, hal ini merupakan pencapaian yang cukup jika melihat target PBB untuk mencapai 15% | <p>Penelitian ini sama-sama meneliti perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian, namun berbeda konteksnya dimana keterlibatan wanita TNI di penelitian tersebut cenderung dilihat dari pendekatan resolusi</p> |

| No. | Peneliti | Judul dan Tahun | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|-----|----------|-------------------------------|-------------------|--|---|
| | | Resolusi Konflik Januari 2018 | | <p>porsi perempuan dalam komponen militer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan pengarusutamaan gender Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian PBB belum menyentuh ranah struktural ditunjukkan dengan tidak adanya unit gender dalam misi pemeliharaan perdamaian. - Penambahan jumlah wanita TNI untuk terlibat dalam misi cenderung situasional. - Perlu perluasan obyek aktor seperti polisi atau komponen sipil lain. - Perlu ada <i>political will</i> yang kuat untuk melakukan upaya persuasi terhadap peningkatan rekrutmen wanita TNI. | <p>konflik dan penelitian ini menggunakan pendekatan diplomasi pertahanan. Selain itu, berbeda pula dalam tujuan penelitian dimana penelitian ini berupaya melihat dampaknya terhadap diplomasi pertahanan Indonesia.</p> |

Sumber: Olahan Peneliti

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini berawal dari adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki Dewan Keamanan sebagai badan khusus yang mengurus isu-isu keamanan dunia, termasuk misi pemeliharaan dunia. Produk kesepakatannya hadir diantaranya dalam bentuk resolusi dan mandat. Salah satu resolusi yang menandai perhatian tentang isu perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian yaitu Resolusi No. 1325 tahun 2002 tentang Women, Peace and Security. Adapun mengenai *peacekeeping* salah satunya adalah untuk misi UNIFIL. Dalam misi UNIFIL ini, peneliti menyoroti partisipasi *female peacekeeper* Indonesia yang ditinjau dengan teori partisipasi, konsep feminis internasionalisme, diplomasi pertahanan, *UN Peacekeeping*, dan *gender mainstreaming* sehingga dapat dilihat korelasinya dengan pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran yang disusun oleh peneliti:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan Peneliti

BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitik deskriptif. Metode kualitatif, menurut Wahyuni, yaitu pendekatan penafsiran (*interpretive*) yang terkait dengan pemahaman makna perilaku, keputusan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya di dalam dunia sosial.⁶⁰ Penelitian kualitatif menurut Ross dilakukan berdasarkan pandangan dunia secara holistik, tidak ada realitas tunggal, realita berdasarkan persepsi orang sehingga dapat berubah sewaktu-waktu.⁶¹ Makna terhadap sesuatu dalam penelitian kualitatif dapat dilihat berdasarkan konteks atau situasi. Upaya penafsiran ini juga dijelaskan oleh Creswell bahwa penelitian kualitatif dimulai dari asumsi dan menggunakan sudut pandang penafsiran ataupun teoritis untuk mencari makna dari permasalahan sosial.

Penelitian, menurut Creswell merupakan suatu proses yang berjalan sehingga membentuk tahapan bersiklus dimulai dari identifikasi masalah hingga pembuatan laporan.⁶² Penelitian terjadi berawal dari munculnya masalah, berlanjut dengan studi kepustakaan, menentukan dan memperjelas tujuan penelitian. Diteruskan dengan pengumpulan data, interpretasi data hingga disusunnya laporan berdasarkan data yang didapatkan. Begitu laporan dihasilkan, masalah baru bisa saja ditemukan melalui evaluasi dari laporan tersebut atau temuan dalam penelitian sehingga membentuk siklus yang sistematis dalam penelitian.

Penelitian kualitatif menurut Creswell, Hatch, serta Marshall dan Rossman memiliki karakteristik sebagai berikut:⁶³

⁶⁰ Sari Wahyuni, *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Creswell, *Educational Research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*, Pearson-Prentice Hall, 2008.

⁶³ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fourth Edition, SAGE Publication, Inc, 2014.

- a. Penelitian dilakukan terhadap kondisi atau lingkungan alamiah. Peneliti tidak membawa objek penelitiannya ke dalam laboratorium melainkan berinteraksi atau mengamatinya di lingkungan sosial.
- b. Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian yang mengumpulkan data, mengolahnya, menganalisis, hingga menulisnya ke dalam bentuk laporan. Peneliti dapat berinteraksi dengan partisipan dalam penelitiannya secara berkelanjutan dan terus-menerus.
- c. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan informasi audiovisual.
- d. Analisis data bersifat induktif dan deduktif. Secara induktif, peneliti mengolah tema dan data-data penelitian secara berulang hingga terbentuk tema yang utuh. Kemudian berlanjut secara deduktif dimana peneliti melihat kembali data-data untuk mengetahui kebutuhan informasi yang mendukung penelitian.
- e. Peneliti terus berusaha memaknai data atau informasi yang disampaikan oleh partisipan tentang masalah atau isu penelitian.
- f. Proses penelitian berjalan secara dinamis dalam artian terdapat potensi perubahan baik pertanyaan penelitian, teknik pengumpulan data dan sebagainya.
- g. Peneliti merefleksikan perannya dalam penelitian dan berpotensi membentuk interpretasi terhadap berbagai sumber data.
- h. Peneliti berusaha membuat gambaran kompleks dari suatu masalah yang diteliti.

Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, data dan/atau informasi yang ada terkait penelitian ini terikat pada konteks dan akan dianalisis menggunakan teori maupun konsep dalam menjelaskan masalah penelitian. Adapun pendekatan analitik deskriptif berarti analisis berkelanjutan yang dilakukan sejak sebelum dan setelah proses pengumpulan data hingga disajikan dalam bentuk hasil penelitian. Melalui

metode dan pendekatan ini peneliti berupaya mendapatkan pemahaman terhadap partisipasi *female peacekeeper* Indonesia khususnya di dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017 serta dampaknya terhadap diplomasi pertahanan Indonesia.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Bogor dan Jakarta. Adapun di wilayah Bogor penelitian ini fokus dilakukan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam wilayah *Indonesia Peace and Security Center (IPSC)*. Sedangkan di Jakarta, penelitian ini dilakukan di beberapa Kantor Kementerian dan Lembaga termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Markas Besar (Mabas) TNI/POLRI, dan Lembaga Penelitian yaitu CSIS Indonesia untuk mendapat data pendukung.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak proposal penelitian disetujui yaitu dalam kurun waktu bulan September sampai Desember 2018. Pelaksanaanya dimulai dengan pengambilan data pertama, pengumpulan data baik wawancara maupun studi literatur, dokumentasi, dan sebagainya berlanjut pada pengolahan data, analisis, hingga penulisan hasil penelitian. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

| No. | Kegiatan | 2018 | | | | | |
|-----|---------------------|------|---------|------|-----|-----|-----|
| | | Juli | Agustus | Sept | Okt | Nov | Des |
| 1. | Penyusunan Proposal | | | | | | |
| 2. | Proses Bimbingan | | | | | | |
| 3. | Seminar Proposal | | | | | | |
| 4. | Perbaikan Proposal | | | | | | |
| 5. | Pengumpulan Data | | | | | | |

| No. | Kegiatan | 2018 | | | | | |
|-----|-------------------------------|------|---------|------|-----|-----|-----|
| | | Juli | Agustus | Sept | Okt | Nov | Des |
| 6. | Analisis Data | | | | | | |
| 7. | Penyusunan Laporan Penelitian | | | | | | |
| 8. | Ujian Pra Tesis | | | | | | |
| 8. | Ujian Tesis | | | | | | |
| 9. | Perbaikan Tesis | | | | | | |
| 10. | Penyerahan Tesis | | | | | | |

Sumber: Olahan Peneliti

3.2 Subyek dan Narasumber Penelitian

3.2.1 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat langsung sebagai data primer penelitian. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, subyek dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan baik dari kementerian/lembaga maupun individu yang akan memberikan informasi berdasarkan perspektif masing-masing. Narasumber atau informan dalam hal ini dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan Partisipasi *Female Peacekeeper* Indonesia dalam Misi UNIFIL tahun 2015-2017 dan dampaknya terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia. Subyek dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Untuk mencari data dan informasi tentang rencana strategis Indonesia dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB dan kaitannya dengan pelaksanaan diplomasi Indonesia serta posisi keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

b. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Untuk mencari data strategis tentang pengiriman komponen militer ke kawasan misi pemeliharaan perdamaian PBB dan program

terhadap pengerahan *female peacekeeper* dari sisi pengambil kebijakan.

c. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI)

Untuk mencari rekam data komposisi gender dalam misi UNIFIL, proses seleksi, pelatihan, sebelum keberangkatan hingga laporan masa tugas pasukan pemelihara perdamaian khususnya perempuan.

d. Wanita TNI/POLRI sebagai *female peacekeeper*

Untuk mencari informasi mendalam mengenai pengalaman pribadi para *female peacekeeper* dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

e. Akademisi/Praktisi lainnya yang relevan

Untuk memahami sudut pandang para akademisi/praktisi yang relevan dari berbagai perspektif termasuk aspek diplomasi, pertahanan dan gender secara spesifik terhadap misi pemelihara perdamaian.

3.2.2 Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian (*purposive sampling*) yang selanjutnya dijabarkan dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.2 Subyek dan Narasumber Penelitian

| No. | Subyek Penelitian | Narasumber |
|-----|--|---|
| 1. | Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia | Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP): Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata |
| 2. | Kementerian Pertahanan Republik Indonesia | Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Direktorat Kerjasama Internasional. |

| No. | Subyek Penelitian | Narasumber |
|-----|---|---|
| 3. | Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI) | Wakil Komandan dan Kasisiapops Dirbinrenops |
| 4. | Wanita TNI/POLRI/Sipil sebagai pasukan perempuan dalam misi pemelihara perdamaian | Letkol Sus. Ratih Pusparini Mayor Caj (K) Erna Nuraeni Mayor Ckm (K) Sarah Tidar Mayor Laut (S/W) Nani Kusmiyati AKBP Yuli Cahyanti |
| 5. | Praktisi/Akademisi | Luigi Pralangga (<i>Civilian Peacekeeper</i>) Fitri Bintang Timur (Peneliti CSIS) |

Sumber: Olahan Peneliti

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam melakukan penelitian. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan merupakan kata-kata dan perilaku orang.⁶⁴ Untuk itu, cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data seperti bentuk-bentuk tersebut adalah observasi, wawancara mendalam, wawancara kelompok, dan pengumpulan dokumen maupun materi audio-visual yang relevan. Creswell juga menjelaskan pengumpulan data daring (*online*) termasuk data virtual dan wawancara berbasis *web* melalui *e-mail* dan sebagainya. Data-data tersebut dikumpulkan peneliti dalam bentuk catatan dan rekaman yang kemudian ditranskripsikan untuk digunakan dalam proses analisis data.

Dari berbagai teknik pengumpulan data tersebut, penelitian ini memungkinkan penggunaan triangulasi yang berarti mengambil semua atau beberapa teknik pengumpulan data. Seperti dijelaskan Raco dalam tulisannya tentang Metode Penelitian Kualitatif bahwa tidak ada cara pengumpulan data tunggal yang paling tepat atau benar-benar sempurna

⁶⁴ Sari Wahyuni, *op.cit.*, hlm.19-21.

untuk penelitian kualitatif.⁶⁵ Untuk itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen baik pribadi, publik maupun bahan audiovisual.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini yaitu dengan melibatkan informan atau partisipan. Menurut J. R. Raco, partisipan dalam hal ini adalah mereka yang kredibel, kaya akan informasi dan masuk ke dalam beberapa kondisi. Kondisi tersebut antara lain memiliki informasi yang dibutuhkan, memiliki kemampuan untuk menceritakan pengalamannya, terlibat dalam peristiwa, gejala atau masalah yang diteliti, bersedia diwawancarai, dan secara suka rela atau tidak berada di bawah tekanan untuk memberikan informasi.⁶⁶

Dengan wawancara mendalam peneliti akan menangkap arti yang diberikan partisipan pada pengalamannya. Pengalaman dan pendapat inilah yang menjadi bahan dasar data yang kemudian dianalisis. Pada saat informan bercerita, di saat inilah ia membuat refleksi atas pengalamannya dan menyeleksi hal-hal penting untuk disampaikan kepada peneliti. Wawancara juga dilakukan dengan teknik merekam berdasarkan izin dari informan. Rekaman peneliti akan menjadi bukti asli percakapan yang dilakukan serta bukti jika terjadi salah penafsiran. Hasil rekaman ini kemudian dituliskembali (*transcribing*) dan diringkas untuk bahan analisis sesuai dengan pertanyaan penelitian. Wawancara dilakukan dengan sifat pertanyaan *open ended*.

Wawancara dilakukan dengan cara semistruktur dan bersifat terbuka (*open-ended*), artinya peneliti secara bebas melakukan wawancara agar permasalahan lebih terbuka dan dapat meminta pendapat serta opini dari informan. Ciri utama dari wawancara semi terstruktur antara lain pertanyaan terbuka, kecepatan wawancara dapat diprediksi, pertanyaan bersifat fleksibel namun terkontrol, terdapat pedoman wawancara, dan tujuan wawancara dilakukan untuk memahami

⁶⁵ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

⁶⁶ *Ibid.*

suatu fenomena.⁶⁷ Pertanyaan terbuka artinya subyek penelitian tidak diberi batasan dalam mengemukakan jawaban pertanyaan dan peneliti dapat membuka pertanyaan baru selama tidak keluar dari konteks pembicaraan. Kemudian, peneliti juga memiliki kendali terhadap kecepatan dan waktu wawancara agar pembicaraan tidak melebar ke arah yang tidak diperlukan. Wawancara ini bersifat fleksibel dan terkontrol yaitu dengan pedoman wawancara yang menjadi acuan terhadap pertanyaan-pertanyaan selanjutnya berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Dari pengumpulan data melalui wawancara tersebut akan diperoleh data dapat berupa pendapat, persepsi, perasaan, pengalaman dan pengetahuan. Hal ini secara komprehensif akan didapat melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) sehingga peneliti akan memaknai pengalaman yang disampaikan oleh informan/partisipan.⁶⁸

Dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan dengan pemanfaatan teknologi sebagai media dan alat bantu atau instrumen. Teknologi dalam hal ini dapat sebagai media wawancara seperti telepon dan surat elektronik maupun sebagai instrumen seperti alat perekam audio dan video. Untuk menggunakan instrumen tersebut, peneliti upayanya merencanakan pendekatan untuk merekam data penelitian sehingga tetap menghargai etika wawancara. Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara untuk menggali informasi dari berbagai perspektif dan kategorisasi sumber seperti perempuan pemelihara perdamaian sebagai pelaku utama, pejabat/staf ahli di Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan sebagai pengambil kebijakan strategis, PMPP-TNI sebagai lembaga yang fokus mengurus pasukan pemelihara perdamaian PBB, akademisi sebagai analis terhadap isu perempuan pemelihara perdamaian dan lain sebagainya.

⁶⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Edisi 1 Cetakan ke-2. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

⁶⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Kemudian, pengumpulan data juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen baik publik maupun privat. Dokumen publik dalam hal ini termasuk berita dalam media resmi, makalah penelitian, laporan *peacekeeping*, dan sebagainya. Sedangkan dokumen privat yaitu termasuk surat dan *email*. Lebih lanjut, penelitian ini juga memungkinkan pengumpulan data berupa materi audio visual berupa foto, video, atau arsip digital. Selanjutnya data-data tersebut dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara. Terakhir, dilakukan pengumpulan data secara triangulasi untuk menguji keabsahan data.

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang didapat oleh peneliti, dilakukan *internal validity* untuk menguji kebenaran kesimpulan tentang sebab akibat atau hubungan kausal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang relevan. Menurut Sugiyono, keabsahan data dilakukan dalam rangka melakukan pembuktian bahwa penelitian yang tersebut bersifat ilmiah dan data-datanya telah teruji. Lebih lanjut, Sugiyono juga menjelaskan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif antara lain uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* agar data dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁹

Uji *credibility* yaitu uji data yang dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan referensi dan melakukan *membercheck* atau pemeriksaan terhadap pemberi data. Selanjutnya yaitu *transferability* sebagai uji validitas eksternal melalui penerapan terhadap populasi dimana sampel tersebut diambil. Sedangkan uji *dependability* dilakukan dengan pemeriksaan terhadap seluruh proses penelitian dimulai dari penentuan masalah, penelitian di lapangan, sumber data, analisis, uji keabsahan, hingga pembuatan laporan hasil pengamatan. Terakhir,

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

confirmability berarti pengujian keabsahan terhadap proses yang telah dilakukan dengan melihat kesesuaian data yang diperoleh peneliti dan apa yang terjadi sebenarnya pada obyek penelitian.⁷⁰

Sementara Miles dan Huberman, menjelaskan pemeriksaan keabsahan data melalui proses triangulasi. Triangulasi menurutnya dibutuhkan untuk mendukung temuan dengan menampilkan setidaknya tiga ukuran independen yang sepakat dengannya atau kontradiksi terhadapnya. Beberapa jenis triangulasi menurut Miles dan Huberman antara lain triangulasi sumber data, metode, peneliti, teori dan jenis data.⁷¹ Triangulasi sumber data yaitu pengecekan yang dilakukan melalui data yang dikumpulkan dari orang-orang yang berbeda, berbagai waktu dan tempat. Sedangkan triangulasi metode dapat dilakukan melalui observasi, wawancara dan verifikasi dokumen. Lebih lanjut, triangulasi peneliti yaitu pengujian terhadap peneliti A, B, dan sebagainya. Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan teori-teori yang berbeda untuk menjelaskan hasil temuannya.

Adapun penelitian “Partisipasi *Female Peacekeeper* Indonesia dalam misi *United Nations Interim Forces in Lebanon* tahun 2015-2017: Dampak terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia” ini menggunakan triangulasi sumber data dan metode seperti dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Peneliti melakukan triangulasi sumber data melalui teknik wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada beberapa informan yang relevan. Ini dilakukan dengan tujuan mendapat verifikasi dan kesesuaian informasi terkait masalah penelitian sehingga menjadi data yang valid dan komprehensif. Lebih lanjut juga dilakukan upaya pencarian kesesuaian dengan sumber lain baik melalui dokumen maupun literatur lainnya. Melalui triangulasi tersebut diharapkan peneliti dapat memegang bukti-bukti yang membenarkan atau menguatkan dari

⁷⁰ *Ibid.*

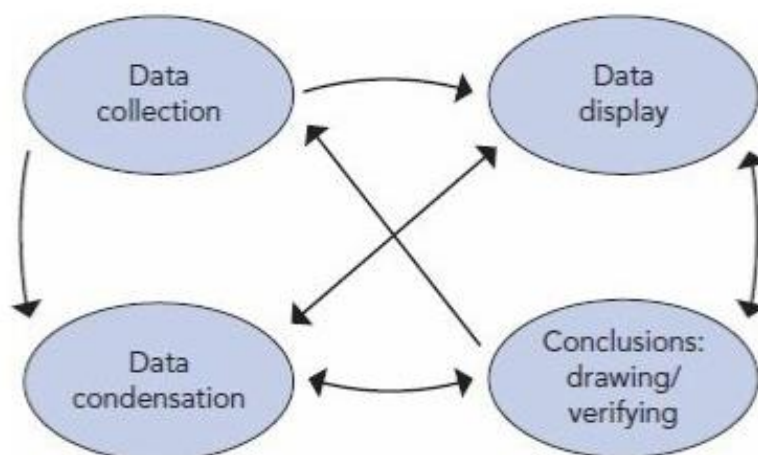
⁷¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third Edition, (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 294-295.

berbagai sumber maupun metode pengumpulan data yang diambil sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan kepercayaan terhadap data dan analisis.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru. Dari proses tersebut akan dihasilkan temuan penelitian atau *findings*. Temuan dalam analisis kualitatif maksudnya adalah menemukan tema, pola, konsep, *insight*, dan pemahaman.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas seperti bagan di bawah ini:⁷²



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif

Sumber: Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third Edition (California: SAGE Publications, 2014).

- a. **Kondensasi data** yaitu proses pemilihan (*selecting*), pemusatan perhatian (*focusing*), penyederhanaan, abstraksi, dan/atau transformasi data yang ada baik data literatur, transkrip wawancara, dokumen dan materi empiris lainnya.⁷³ Proses ini berarti membuat data yang ada menjadi semakin

⁷² *Ibid*, hlm. 12

⁷³ *Ibid*, hlm. 10

kuat, bukan dengan reduksi data yang mengimplikasikan berkurang dan melemahnya data di dalam proses analisis. Kondensasi data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses analisis. Kondensasi data ini dapat dilakukan dimulai dari proses pengumpulan data hingga penelitian lapangan dan penulisan laporan diselesaikan. Kegiatan kondensasi data ini antara lain penulisan ringkasan, pengkodean (*coding*), pengembangan tema, membuat kategori data, dan penulisan memo anatis.

- b. **Penyajian data (*data display*)** yaitu kegiatan dimana data yang terkumpul disajikan dalam berbagai bentuk yang terorganisir dan mempermudah proses penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan lebih lanjut.⁷⁴ Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini disajikan antara lain dalam bentuk teks narasi, matriks, grafik, diagram, maupun tabel. Proses ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang telah terorganisir ke dalam bentuk yang padat dan dapat diakses sehingga dapat dapat menjustifikasi langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan.
- c. **Penarikan dan verifikasi kesimpulan** merupakan tahapan akhir dari proses analisis data berupa kegiatan interpretasi untuk menghasilkan makna dari data yang telah disajikan.⁷⁵

Penelitian Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Misi UNIFIL tahun 2015-2017 secara garis besar menggunakan proses tersebut. Melalui metode kualitatif, peneliti berupaya mencari makna dari data yang tersedia melalui proses interpretasi. Hal ini mengingat data kualitatif yang didapat secara garis besar adalah perilaku, teks tertulis atau data lisan yang didapat dari berbagai sumber. Upaya analisis data ini dilakukan secara berlanjut dan berulang terus menerus sehingga terbentuk hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 11

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tiga instansi dan individu-individu yang terkait dengan partisipasi *female peacekeepers* Indonesia dalam misi UNIFIL. Sebagai gambaran umum sebaran data penelitian, beberapa instansi tersebut antara lain TKMPP (Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian) yang di dalamnya termasuk Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri; serta PMPP-TNI (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian-Tentara Nasional Indonesia). Adapun dalam level individu, penelitian ini juga mengambil *female peacekeepers* sebagai subyek penelitian. *Female peacekeepers* yang dimaksud disini yaitu personel Wanita Tentara Nasional Indonesia (Wan-TNI) yang memiliki pengalaman dikerahkan ke misi UNIFIL. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memasukkan peneliti lain guna memperoleh pandangan secara akademis dan mempertajam analisis.

Pemilihan beberapa instansi tersebut di atas dilakukan mengacu pada tiga level komando pengendalian pemeliharaan perdamaian PBB (*three levels of military engagement in peacekeeping*) yaitu strategis, operasional dan taktikal.⁷⁶ Pada level strategis, instansi atau lembaga yang dimaksud adalah TKMPP (Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri) dan PTRI. Hal ini mengingat posisi strategis yang diperankan setiap instansi dalam hal pengambilan kebijakan, perencanaan, dan pengembangan pedoman strategis. Sedangkan pada level operasional, PMPP-TNI merupakan lembaga yang peneliti maksud berperan menerjemahkan dan menjalankan pedoman atau arahan strategis ke dalam suatu konsep operasi, tugas, maupun koordinasi, sesuai dengan mandat.

⁷⁶ UNDPKO, *Integrating a Gender Perspective into the Work of the United Nations Military in Peacekeeping Operations*, (New York: Department of Peacekeeping Operations, Maret 2010), hlm. 10-29.

Akhirnya, pada level taktikal konsep yang dibentuk oleh level operasional diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan atau program yang mendukung operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Untuk itu, level ini diterjemahkan oleh peneliti sebagai posisi yang ditempati oleh *female peacekeepers* Indonesia. Setiap level ini memiliki perannya masing-masing dalam mendukung kontribusi Indonesia terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk dalam partisipasi *female peacekeepers* Indonesia. Sebelum menjelaskan tentang gambaran umum sebaran data, terlebih dahulu peneliti menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian yaitu perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian.

4.1.1 Perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian

Operasi pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping operations*) merupakan wilayah yang cenderung dianggap sebagai wilayah kerja laki-laki atau bersifat maskulin.⁷⁷ Ini hadir hingga PBB akhirnya memunculkan urgensi terhadap isu perempuan, perdamaian dan keamanan (*Women, Peace, and Security*) pada tahun 2000 sebagai akibat dari evolusi misi pemeliharaan perdamaian.⁷⁸ Evolusi yang dimaksud disini adalah adanya perkembangan dimana beberapa misi pemeliharaan perdamaian masih berdasarkan model tradisional dan ada yang sudah menjadi multidimensi.⁷⁹ Misi dengan model tradisional yaitu berdasarkan pengerahan operasi militer dengan dukungan kegiatan seperti pemantauan gencatan senjata, patroli *buffer zones* antara pihak yang bertikai dan dilakukan oleh para pemelihara perdamaian PBB baik yang bersenjata maupun tidak. Sedangkan misi yang bersifat multidimensi berarti mencakup komponen dan isu yang lebih luas seperti militer, polisi,

⁷⁷ Hayley Lopes, "Militarized Masculinity in Peacekeeping Operations: An Obstacle to Gender Mainstreaming", *Background Paper Peacebuilding and Conflict Prevention Consultation Series, Peacebuild*, 2011, hlm. 2.

⁷⁸ United Nations, "*Women, Peace and Security*", (United Nations Publications, 2002), hlm. 1-2.

⁷⁹ UNDPKO, *loc.cit.*

kegiatan hubungan dengan sipil, kemanusiaan, rekonstruksi, informasi publik dan gender.⁸⁰

Dalam perkembangan konflik, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sipil menjadi salah satu target kekerasan. Perempuan dan laki-laki cenderung mengalami akibat konflik yang berbeda. Pengalaman perempuan dan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan refleksi dari relasi gender dan status perempuan di masyarakat dimana perempuan kerap mengalami penderitaan seperti pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini membawa konsekuensi lebih lanjut terhadap potensi adanya kehamilan yang tidak diinginkan, HIV dan kekerasan seksual lainnya. Tidak hanya itu, perempuan juga mengalami ancaman terhadap keamanan ekonomi dan pangan yang membuat mereka terpaksa harus berpindah atau mengungsi. Menghadapi kompleksnya situasi, misi pemeliharaan perdamaian upayanya dapat membantu baik dalam bentuk pelatihan, pemantauan, dan pendampingan penyelesaian kejahatan kekerasan termasuk pemerkosaan, dan kekerasan berbasis gender lainnya.⁸¹

Apa yang terjadi pada perempuan di wilayah konflik menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok rentan di dalam konflik itu sendiri. Misi pemeliharaan perdamaian PBB harus memahami perbedaan dampak konflik ini antara perempuan dan laki-laki. Misi PBB juga harus berupaya melindungi hak perempuan dan memastikan mereka terintegrasi ke dalam kegiatan perdamaian, mengimplementasikan kesepakatan damai, dan menyelesaikan konflik. Ini merupakan hal penting agar para pemelihara perdamaian menyadari perbedaan konsekuensi konflik untuk perempuan dan anak-anak. Suatu misi akan sukses jika implementasi rencana juga mengakomodir perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki serta anak-anak.

⁸⁰ United Nations, *Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations*, (New York: United Nations Publication, 2003), hlm. 1.

⁸¹ United Nations, *“Women, Peace and Security”*, (United Nations Publications, 2002), hlm. 1-2.

Pada tahun 2000, Dewan Keamanan PBB, meningkatkan kewaspadaan terhadap kebutuhan perspektif gender ke dalam kegiatan perdamaian dan keamanan. Hal ini direfleksikan dalam Resolusi 1325 yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak (*women and girls*) selama konflik bersenjata dan mendorong partisipasi perempuan dalam pencegahan konflik, *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding*. Dalam penelitian ini selanjutnya akan lebih berfokus pada partisipasi perempuan dalam kegiatan *peacekeeping*.

Beberapa ketentuan dalam resolusi 1325 antara lain sebagai berikut:⁸²

- Meningkatkan partisipasi perempuan pada level pembuat keputusan dalam proses perdamaian;
- Memperluas peran dan kontribusi perempuan dalam operasi berbasis lapangan PBB, khususnya antar personil *military observers*, *civilian police*, *human rights* dan kemanusiaan;
- Memasukkan perspektif gender ke dalam operasi *peacekeeping* dan memastikan operasi di lapangan juga memasukkan komponen gender;
- Menyediakan pedoman pelatihan dan materi terhadap negara anggota terkait perlindungan, hak dan kebutuhan perempuan serta pentingnya melibatkan perempuan ke dalam seluruh bagian *peacekeeping* dan *peacebuilding*;
- Mengadopsi perspektif gender ketika bernegosiasi dan mengimplementasikan kesepakatan damai;
- Melibatkan pihak-pihak di dalam konflik untuk mengambil *special measures* dalam rangka melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan berbasis gender, seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya

⁸² United Nations, *Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations*, (New York: United Nations Publication, 2003), hlm. 116.

- Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki
- Memastikan misi Dewan Keamanan PBB juga mempertimbangkan hak perempuan dan isu-isu gender termasuk konsultasi dengan kelompok perempuan lokal dan internasional; dan
- Memasukkan kemajuan *gender mainstreaming* di dalam misi *peacekeeping* pada setiap laporan Secretary General kepada Dewan Keamanan PBB.

Untuk mengimplementasikan resolusi tersebut dilakukan berbagai langkah positif termasuk membentuk *Inter-Agency Task Force on Women, Peace and Security*.⁸³ Namun demikian, perempuan masih merupakan minoritas di dalam partisipasi perdamaian dan keamanan. Ini akan ditunjukkan dengan data pada sub-bab selanjutnya. Prinsip kesetaraan gender menjadi hal penting untuk kegiatan dan kebijakan PBB. Hal ini untuk mendukung perdamaian yang berkelanjutan berdasarkan inklusivitas dan menghentikan diskriminasi berbasis gender. Dengan perkembangan perhatian PBB terhadap partisipasi perempuan di dalam misi pemeliharaan perdamaian, hal ini memberikan gambaran umum penelitian bahwa *female peacekeepers* Indonesia turut berpartisipasi dalam misi melalui berbagai kegiatan yang akan dibahas lebih lanjut. Hal ini berjalan atas dukungan pemerintah melalui instansi atau lembaga yang terkait seperti disebutkan sebelumnya sebagai subyek penelitian.

4.1.2 Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP)

TKMPP merupakan Tim Koordinasi Misi Pemelihara Perdamaian yang terbentuk melalui Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011. Tim ini dibentuk sebagai salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia sejalan dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dipandang penting oleh Pemerintah Indonesia mengingat partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian merupakan hal yang tidak

⁸³ *Ibid*, hlm. 161.

terpisahkan dari politik luar negeri Indonesia. Untuk itu, TKMPP berada di bawah Presiden dan harus senantiasa memberi pertanggung jawaban kepada Presiden.

Sebagaimana disebut bahwa TKMPP adalah tim koordinasi, untuk itu keanggotaan TKMPP terdiri atas beberapa instansi dan lembaga strategis pemerintah yang terkait dengan misi pemeliharaan perdamaian. Instansi dan lembaga pemerintahan tersebut dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:⁸⁴

Tabel 4.1 Instansi dan Lembaga dalam Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP)

| Posisi | Pejabat/Anggota |
|---------------|--|
| Pengarah | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan |
| Ketua | Menteri Luar Negeri |
| Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Pertahanan 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Menteri Keuangan 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Sekretaris Kabinet 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia 7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 8. Kepala Badan Interlijen Negara |
| Sekretaris | Ketua Pelaksana Harian (Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri) |

Sumber: Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011

Adapun tugas utama TKMPP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perpres No. 85 Tahun 2011 adalah menyiapkan perumusan kebijakan dan melakukan koordinasi terkait langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia. Perumusan kebijakan dan penentuan langkah ini harus

⁸⁴ Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian, Pasal 4.

mengacu pada kepentingan nasional Indonesia. Lebih lanjut, TKMPP juga mengemban fungsi sebagai berikut:⁸⁵

- a. Pengoordinasian perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan penghentian partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia;
- b. Penyiapan kajian komprehensif dan rekomendasi tentang kebijakan bagi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia;
- c. Penyiapan dan perumusan posisi dan strategi Indonesia dalam perundingan mengenai partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia.

Kehadiran TKMPP ini menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia pada level PBB. Hal ini mengingat kebijakan strategis terkait partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dibahas terlebih dahulu di dalam tim ini. Hasil koordinasinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh Kementerian atau instansi terkait lainnya sesuai tugas dan tanggung jawabnya seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan lebih lanjut implementasinya di PBB oleh Perwakilan Tetap Republik Indonesia.

4.1.2.1 Kementerian Luar Negeri

Dari 34 Kementerian yang ada di Indonesia, Kementerian Luar Negeri merupakan satu dari tiga Kementerian yang menempati posisi strategis melaksanakan tugas kepresidenan sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, disebutkan “Kementerian Luar Negeri memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk

⁸⁵ *ibid*, Pasal 3.

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.⁸⁶ Adapun beberapa fungsinya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 Permenlu tersebut, yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- d. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

Dalam persoalan misi pemeliharaan perdamaian, Kementerian Luar Negeri adalah Ketua sekaligus Sekretaris TKMPP.⁸⁷ Sebagai Ketua Pelaksana Harian, Kementerian Luar Negeri secara khusus menempatkan Direktorat Kerjasama Multilateral yang membidangnya. Ditjen Kerjasama Multilateral ini dibantu oleh Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) yang juga membawahi Subdirektorat Perdamaian dan Keamanan Internasional. Subdirektorat Perdamaian dan Keamanan Internasional antara lain bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan pada lingkup kerjasama multilateral tentang isu pencegahan dan penyelesaian konflik, konflik antarnegara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, kelembagaan keamanan internasional, bina perdamaian pasca konflik, dan misi-misi politik khusus. Dalam

⁸⁶ Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Pasal 4.

⁸⁷ Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian, Pasal 4.

penelitian ini, Kementerian Luar Negeri menjadi bahan rujukan informasi peneliti terkait kebijakan pengiriman *female peacekeepers* Indonesia dan dukungannya terhadap partisipasi *female peacekeepers* Indonesia.

4.1.2.2 Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan juga memegang posisi kunci sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Kemhan merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁸⁸ Dalam melaksanakan tugas tersebut, dalam Pasal 4 disebutkan salah satu fungsi Kemhan yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan dan kekuatan pertahanan;

Dalam hal misi pemeliharaan perdamaian, organisasi Kemhan yang turut mengurus hal ini adalah Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Strahan) yang membawahi Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan, Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan, dan Subdirektorat Kerjasama Multilateral.

4.1.3 Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI)

PMPP TNI merupakan institusi khusus yang menangani segala aspek tentang pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian PBB. PMPP TNI terbentuk secara resmi tahun 2007 pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan latar belakang semakin meningkatnya frekuensi keterlibatan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian. Adapun dasar hukum yang melandasinya antara lain melalui Surat Keputusan Panglima TNI No. Kep/4/i/2007 tentang pembentukan PMPP TNI, Skep No. Kep/5/I/2007 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur PMPP TNI tanggal 29 Januari 2007, dan Peraturan Panglima

⁸⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

TNI No. Perpang/6/II/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang likuidasi kepabanan VII/OPP Sops TNI.⁸⁹

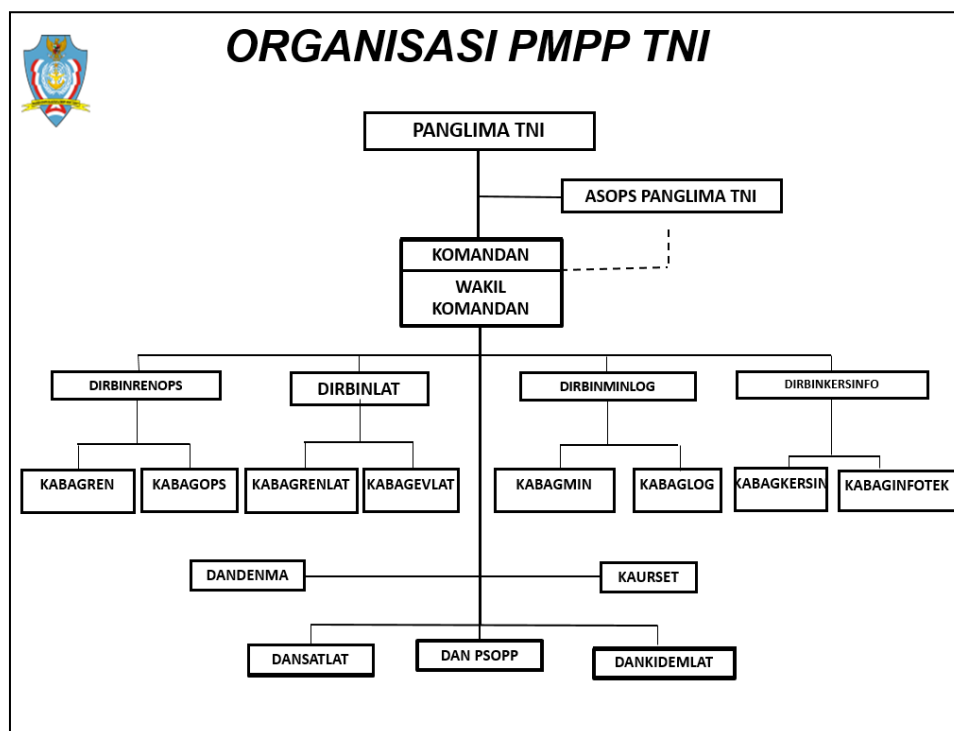
Terbentuknya PMPP TNI memberikan konsekuensi logis terhadap adanya tugas pokok yaitu melaksanakan perencanaan dan penyiapan personel TNI dalam penugasan, pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan tugas pemeliharaan perdamaian PBB. Hal ini dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Lebih lanjut, fungsi PMPP TNI antara lain sebagai berikut:⁹⁰

- a. Menyusun, merencanakan, menyiapkan dan mengevaluasi pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian;
- b. Melaksanakan kegiatan latihan dan memelihara kemampuan personel TNI yang akan melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian; dan
- c. Merencanakan dan menyusun rencana kebutuhan operasi, administrasi dan logistik untuk satuan yang akan diberangkatkan dalam misi pemeliharaan perdamaian.

PMPP ini terletak di Sentul, Bogor dengan fasilitas dan infrastruktur yang dapat digunakan untuk pelatihan personel misi pemeliharaan perdamaian PBB. Secara organisasi, PMPP TNI berada dalam struktur Mabes TNI dengan struktur organisasi seperti gambar di bawah ini:

⁸⁹ PMPP TNI, "Sejarah Pembentukan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI", dalam <https://ppid.tni.mil.id/view/32436077/data-pmpp-tni.html>, diunduh pada 14 November 2018.

⁹⁰ PMPP TNI, "Profil Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI", 12 Agustus 2016 dalam <https://ppid.tni.mil.id/view/32435571/profil-pmpp-tni.html> diunduh pada 14 November 2018



Gambar 4.1 Organisasi PMPP TNI

Sumber: Data PPID Puspen TNI (Organisasi PMPP TNI), 2018

Penelitian ini menggali informasi terkait upaya PMPP TNI dalam persiapan hingga partisipasi *female peacekeepers* Indonesia di dalam misi pemeliharaan perdamaian, khususnya misi UNIFIL. Ini dilihat lebih lanjut melalui beberapa struktur organisasi PMPP TNI baik dalam level strategis yaitu Wakil Komandan maupun level operasional pada Direktorat Pembinaan Rencana dan Operasi.

4.1.4 Wanita Tentara Nasional Indonesia (Wan-TNI)

Wanita Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama yang turut terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian. Wan-TNI dikatakan terlibat misi pemeliharaan perdamaian jika mengikuti proses seleksi, pelatihan, keberangkatan, hingga pelaksanaan tugas dan penyelesaian laporan. Kehadiran Wan-TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian adalah hal penting untuk mengimplementasikan kesetaraan gender dan mewujudkan misi yang ramah gender. Terlebih, hal ini sudah merupakan komitmen bersama negara-negara PBB terhadap Resolusi

1325 tentang *Women, Peace and Security*. Untuk itu, wanita TNI menjadi sorotan dalam penelitian ini.

Untuk melibatkan perempuan, PMPP TNI juga memberikan perhatian pada komposisi gender antara personel laki-laki dan wanita TNI yang akan mengisi posisi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kehadiran perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian ini tidak hanya suatu komitmen kesetaraan gender tetapi juga perhatian terhadap dampak konflik yang semakin multidimensional seperti di jelaskan dalam sub-bab sebelumnya. Dengan melakukan wawancara, peneliti berusaha menggali informasi berdasarkan pengalaman wanita TNI yang terlibat dalam misi UNIFIL baik tentang penyiapan, pelaksanaan tugas, hambatan dan tantangan, serta pandangan mereka terhadap isu gender di daerah misi.

4.2 Hasil Penelitian

Untuk menjawab partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017, peneliti menjelaskan hasil penelitian berdasarkan proses penyiapan, posisi penugasan, dan program kegiatan yang diikuti *female peacekeepers* Indonesia. Sedangkan untuk menjawab dampak partisipasi terhadap diplomasi pertahanan Indonesia, peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan melihat aspek *confidence building measures* dan kegiatan *capacity building*.

4.2.1 Partisipasi *Female Peacekeepers* Indonesia dalam Misi UNIFIL Tahun 2015-2017

Partisipasi Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian telah dimulai sejak 8 Januari 1957 dalam misi *United Nations Emergency Force (UNEF)* di Sinai, Mesir.⁹¹ Hal ini dilakukan sebagai salah satu perwujudan amanat konstitusi Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat bahwa Indonesia akan turut serta dalam perdamaian dan ketertiban dunia. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Susilo Bambang

⁹¹ PMPP TNI, "TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian: Peran PMPP TNI dalam Menyiapkan Kontingen Garuda", (Jakarta: PMPP-TNI, 2011), hlm. 3.

Yudhoyono menyampaikan pernyataannya dalam Rapat Paripurna DPR RI 14 Agustus 2009 bahwa dengan berakhirnya konflik dan operasi militer di berbagai wilayah tanah air, maka penugasan untuk menjaga perdamaian internasional adalah juga medan latihan bagi para prajurit TNI untuk meningkatkan profesionalitas mereka sesuai standar militer internasional.⁹²

Pengiriman *female peacekeeper* Indonesia sendiri baru pertama kali dilakukan pada tahun 2008 ke misi MONUC.⁹³ Pada pengiriman *female peacekeepers* pertama ini Indonesia secara direktif mengirimkan dua personel Wan-TNI yang langsung ditempatkan dalam posisi *Military Observer*. Posisi *Military Observer* ini merupakan posisi substantif yang membutuhkan kemampuan khusus. Pengiriman pertama ini selanjutnya menjadi percontohan dan berlanjut pada pengiriman *female peacekeepers* Indonesia ke misi-misi lainnya dengan berbagai posisi dan tanggung jawab.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua Pelaksana Harian TKMPP, urgensi pengiriman *female peacekeeper* ke dalam misi PBB disebabkan oleh beberapa hal.⁹⁴ *Pertama*, berdasarkan konstitusi Indonesia, jelas disebutkan “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.⁹⁵ Hal ini menjadi landasan utama dan konsekuensi logis terhadap partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian, termasuk *female peacekeepers*. *Kedua*, terdapat Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tahun 2000 mengenai *Women, Peace and Security (WPS)*. Dalam hal ini, PBB menginginkan adanya kesetaraan gender, penambahan perempuan bukan hanya pada *peacekeeping*

⁹² *Ibid*, hlm. 4.

⁹³ Wawancara peneliti dengan *female peacekeeper* Indonesia, Letkol Sus. Ratih Pusparini, di Cijantung, 6 September 2018.

⁹⁴ Ketua Pelaksana Harian TKMPP dalam hal ini direpresentasikan oleh Wendi Budi Raharjo, Pejabat Fungsional Diplomat Muda, Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

⁹⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

operations tetapi juga unit kerja lainnya. TKMPP sendiri berkeinginan untuk menambah kuantitas *female peacekeeper* hingga 15%. Sebenarnya, 15% merupakan target persentase yang diinginkan PBB untuk posisi *military observer* dan *military staff*. Melihat pada data *troops contributing countries*, target ini sudah tercapai sekitar 11%.⁹⁶

Ketiga, Indonesia memiliki visi 4.000 *peacekeepers* yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Maret 2012.⁹⁷ Visi ini digagas dengan harapan Indonesia mampu menempati posisi sepuluh negara kontributor terbesar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pada tahun 2016 Indonesia menempati posisi ke 11 negara kontributor militer dan polisi terbesar dalam operasi PBB. Hal ini meningkat pada Januari 2017 dimana posisi Indonesia berada pada peringkat ke-sembilan dengan 2.872 pasukan dimana komposisinya terdapat 2.812 laki-laki dan 60 perempuan.⁹⁸

Visi 4.000 *peacekeepers* ini kemudian dijabarkan oleh Menteri Luar Negeri sebagai Ketua Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019. Sebagai negara yang mendukung kesetaraan gender, visi ini tidak membedakan partisipasi dalam artian baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk turut serta. Personel terpilih dapat dikerahkan ke berbagai misi sesuai mandat PBB di berbagai wilayah konflik, termasuk Lebanon.

Di Lebanon, Indonesia mengawali partisipasinya dalam misi UNIFIL pada tahun 2006.⁹⁹ Ini direncanakan sejak kepemimpinan Presiden Susilo

⁹⁶ Wawancara peneliti dengan Ketua Pelaksana Harian TKMPP, di Kantor Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri, 4 September 2018.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ UNDPKO, "Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations", 31 Januari 2017.

⁹⁹ UNIFIL, "Press Release Indonesia Joins UNIFIL", Naqoura, 11 November 2006, dalam https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/docs/pr072_2.pdf, diunduh pada 10 September 2018.

Bambang Yudhoyono yang mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701. Pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian yang dilakukan oleh Indonesia ini merupakan dalam rangka *peacekeeping*, bukan *peacemaking*. Ini penting untuk dibedakan mengingat *peacekeeping* berarti penggelaran kehadiran PBB melalui personel militer, polisi, atau sipil dengan persetujuan kelompok yang bertikai untuk melaksanakan atau mengawasi implementasi kesepakatan gencatan senjata, pemisahan kelompok bertikai dan penyelesaian konflik untuk menjamin terselenggaranya perdamaian.¹⁰⁰ Untuk itu, Indonesia turut melakukan proses penyiapan dalam mendukung partisipasi *female peacekeeper* Indonesia.

4.2.1.1 Penyiapan *Female Peacekeepers* Indonesia

Penyiapan *female peacekeeper* Indonesia untuk berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu perekrutan, pelatihan, dan pemberangkatan. Mengawasi proses perekrutan pasukan pemelihara perdamaian, setiap pihak terkait termasuk Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan PMPP TNI mengambil langkah perencanaan dan persiapan. Perencanaan dan penyiapan ini lebih lanjut disesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia, mandat PBB dan kondisi lingkungan strategis misi pemeliharaan perdamaian dunia sehingga terangkum dalam langkah-langkah strategis.

Menurut Wakil Komandan PMPP TNI, antusiasme Wan-TNI untuk mengikuti proses seleksi ini sebenarnya cukup tinggi. Namun, keterbatasan jumlah perempuan dalam tubuh TNI itu sendiri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya *female peacekeeper*.¹⁰¹ Dikatakan bahwa jika perempuan berangkat ke misi PBB, ini berarti akan terdapat kekosongan posisi di tempat perempuan tersebut bertugas. Perlu diketahui bahwa ketika Wan-TNI terpilih menjadi *female peacekeeper*, ia akan kehilangan jabatan yang sedang diembannya. Beberapa kondisi

¹⁰⁰ PMPP TNI, *op.cit*, hlm. 12-13.

¹⁰¹ Wawancara peneliti dengan Wakil Komandan PMPP TNI, Kolonel Pnb. Aldrin Petrus Mongan, di Kantor PMPP TNI Sentul, Bogor, 3 Oktober 2018.

terkait hal ini dapat terjadi. Pertama, atasan dari Wan-TNI bersangkutan merasa keberatan jika harus memberangkatkan. Kedua, atasan mendukung dan mengizinkan yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi.

Secara dasar hukum, petunjuk pelaksanaan TNI tentang penyelenggaraan operasi perdamaian dunia dijelaskan dalam Peraturan Panglima TNI No. Perpang/80/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009. Proses ini antara lain melibatkan tiga aktor utama yaitu Mabes TNI, Mabes Angkatan dan PMPP TNI. Adapun perihal yang dilakukan masing-masing pihak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Aktor dan Perihal Kegiatan Perencanaan Perekrutan Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian

| No. | Aktor | Perihal Kegiatan Perencanaan Perekrutan |
|-----|----------------|--|
| 1. | Mabes TNI | <ul style="list-style-type: none"> - Membahas kebutuhan personel dan material yang akan dikirimkan ke Misi PBB berdasarkan permintaan UN DPKO (<i>United Nations Department of Peacekeeping Operations</i>) - Menerbitkan direktif kepada Mabes Angkatan untuk melaksanakan seleksi daerah dan PMPP TNI untuk seleksi terpusat |
| 2. | Mabes Angkatan | <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan Direktif Panglima TNI - Menunjuk Satuan yang akan diberangkatkan - Merencanakan proses seleksi tingkat daerah - Menginventarisasi peralatan yang akan dibawa tugas |
| 3. | PMPP TNI | <ul style="list-style-type: none"> - Menjabarkan Direktif Panglima TNI untuk merencanakan proses seleksi personel pada tingkat pusat. |

Sumber: PMPP TNI, *TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian: Peran PMPP TNI dalam Menyiapkan Kontingen Garuda*, 2011, Jakarta: PMPP-TNI, hlm. 236.

Dalam proses penyiapan, PMPP TNI melakukan program sosialisasi sebelum proses seleksi. Ini dilakukan khusus pada satuan tugas (satgas) dari Angkatan Darat sebagai *main body* dalam Satgas Yonif Mekanis dan Satgas Kompi Zeni.¹⁰² Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada satuan-satuan terkait tugas yang

¹⁰² PMPP TNI, *op.cit*, hlm. 238.

akan diemban dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia beserta kewajiban yang harus dipenuhi. Program sosialisasi ini menjelaskan baik tentang tugas dan fungsi pasukan dalam misi, evaluasi pada tahun sebelumnya dan jenis seleksi yang akan ditempuh. Menurut Letkol Sus. Ratih Pusparini, program sosialisasi sebaiknya juga dilakukan untuk non-militer agar persepsi mengkhawatirkan tentang misi pemeliharaan perdamaian dapat dikurangi.¹⁰³

Adapun persyaratan yang ditentukan Mabes TNI bagi Wan-TNI yang akan mengikuti seleksi harus sudah memiliki pengalaman 3 tahun masa dinas untuk Bintara (diperbolehkan 1 tahun masa dinas dengan catatan prestasi tingkat nasional) dan 1 tahun untuk Perwira Karir. Selain itu, calon anggota kontingen juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Lulus kesehatan fisik dan kesehatan jiwa;
- b. Mampu berbahasa Inggris sesuai dengan level pangkat/jabatan serta jenis penugasan perorangan;
- c. Lulus tes kesegaran jasmani sesuai standar TNI;
- d. Mahir mengemudi kendaraan bagi pengemudi dan personel tugas perorangan; dan
- e. Mampu mengoperasikan komputer.

Tes tersebut dilakukan sesuai dengan standar kelulusan prajurit TNI kecuali bahasa Inggris. Tes Bahasa Inggris dilakukan sesuai dengan kepangkatan dan macam penugasannya. Sebagai contoh, standar kelulusan dasar (*elementary*) untuk pangkat Bintara dan Tamtama Satgas; *intermediate* untuk Perwira Satgas dan Bintara yang terkait langsung dengan satuan tetangga atau komando atas; dan *advance* untuk Dansatgas, *Military Observer* dan *Military Staff*.¹⁰⁵

¹⁰³ Wawancara peneliti dengan *female peacekeeper* Indonesia, Letkol Sus. Ratih Pusparini, di Cijantung, 6 September 2018.

¹⁰⁴ PMPP TNI, *op.cit.* hlm. 237.

¹⁰⁵ *Ibid.*

Setelah seleksi dilakukan, maka diterbitkan data terpilih berdasarkan hasil rapat antara ketua penyelenggara, representasi Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan tim penguji. Data terpilih (*kontingen, military observer, dan military staff*) selanjutnya akan menerima pelatihan atau *pre-deployment training (PDT)* selama 1 bulan. Dalam satu bulan tersebut, masa pelatihan terbagi ke dalam dua periode yaitu tiga minggu untuk materi pelajaran teori dan satu minggu untuk aplikasi pelajaran yang sudah didapat di kelas. Materi yang diberikan mengacu pada *Core Pre-Deployment Training Module (CPTM)*. Adapun materi CPTM tersebut antara lain tentang Sistem PBB, operasi perdamaian PBB, struktur operasi perdamaian PBB, *legal framework* operasi perdamaian PBB, *Stress management, Code of Conduct, Cultural awareness, Landmine and unexploded Ordnance Awareness, Human Right in peacekeeping, humanitarian assistance, UN Civil-military coordination, communication and negotiation, Disarmament, Demobilization and Reintegration, media relation, personnel and peacekeeping, logistic in peacekeeping, HIV/Aids, Malaria, Basic life support, personal hygiene, gender equality in peacekeeping, dan sexual exploitation and abuse.*¹⁰⁶

Lebih dari itu, untuk UNIFIL, juga diberikan materi tentang *Role of Engagement (ROE), Standard Operation Procedure (SOP)* dan *Standardized Tactical Incident Reactions (STIR)* yang disesuaikan dengan misi pemeliharaan perdamaian yaitu dalam konteks penggunaan kekuatan minimum untuk *self-defence* dan diterapkan dalam kegiatan aplikasi. Pengetahuan tambahan dalam proses pelatihan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan misi seperti kemampuan mengemudi, *basic life support*, ilmu medan, pengetahuan *Global Positioning System (GPS), Night Vision Goggles (NVG)* dan sebagainya. Sedangkan selama 1 minggu PDT, dilakukan aplikasi untuk mengimplementasikan materi yang telah didapat selama 3 minggu sebelumnya. Materi-materi aplikasi antara lain negosiasi, *road block, check point, observation post, patrolling,*

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 241-243.

convoy, landmine, sexual exploitation and abuse, civilian protection, culture awareness.

Bagaimanapun, jika dilihat dari jumlah atau kuantitas perempuan, PBB memang belum mencapai target 15%. Namun, Indonesia tetap menunjukkan kontribusi yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan prestasi yang diraih oleh Indonesia melalui masuknya Indonesia ke dalam 10 besar TCC di dunia. Persoalan minimnya kuantitas *female peacekeeper* ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:¹⁰⁷

- a. Kapasitas individu
- b. Keterbatasan jumlah Wan-TNI
- c. Persoalan izin atasan dan atau suami
- d. Budaya ketimuran yang melihat perempuan sebagai pengemban tugas domestik
- e. Resiko kehilangan jabatan
- f. Absennya kebijakan yang memaksa terkait komposisi gender dalam misi perdamaian PBB

Bicara tentang kuantitas dan kapasitas, TKMPP dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan bahwa Indonesia pasti akan mengirim *female peacekeeper* jika memang memenuhi syarat. Syarat baik dari PBB maupun dari Mabes TNI dan lembaga terkait. Hal ini penting agar personel dapat menjalankan tugas dengan baik di wilayah penugasan. Dalam wawancara dengan peneliti, representasi Ketua Pelaksana Harian TKMPP, Wendi Raharjo menyampaikan:

kalau saya menyarankan agar tentara dapat dibuat *pool of candidate* yang berminat untuk menjadi *female peacekeepers* karena kalau kita lihat stok wanita TNI sebenarnya cukup banyak dan yang ingin bergabung menjadi *peacekeeper* juga banyak. Untuk itu dibuat saja *pool of candidate* kemudian kita lakukan injeksi kapabilitas dan pembinaan kepada mereka sehingga siap untuk menempati posisi-posisi di lapangan termasuk posisi strategis dalam misi perdamaian PBB, bukan hanya terbatas pada prajurit (*troops*).

¹⁰⁷ Wawancara peneliti dengan Wadan PMPP TNI, Kasi Misi Damai Kementerian Pertahanan, Ketua Pelaksana Harian TKMPP, *female peacekeeper*, dan Peneliti CSIS.

Menanggapi saran ini, Wakil Komandan PMPP melihat ini sebagai ide yang sangat bagus namun perlu dipertimbangkan potensi adanya kecemburuan bagi mereka yang tidak termasuk ke dalam *pool of candidate*. Tidak hanya itu, baginya melakukan hal itu berarti memerlukan berbagai hal pendukung untuk operasional baik sumber daya manusianya maupun anggaran. Menurut hemat penulis, sebagai bangsa yang berkomitmen untuk turut serta dalam perdamaian dunia dan siap mendukung kesetaraan gender, hal ini patut untuk dipertimbangkan. Isu perempuan di wilayah konflik memanggil kebutuhan adanya *female peacekeeper* dalam misi dan diperlukan penyiapan terhadapnya.

Faktor-faktor tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai alasan dan memicu berbagai pendapat. Hal ini akan dibahas peneliti lebih lanjut pada Sub-bab Pembahasan. Terlepas dari beberapa asumsi hambatan tersebut, Indonesia melalui TKMPP tetap berupaya melakukan penyiapan pasukan. Menurut TKMPP, seluruh anggota TKMPP secara rutin bertemu setiap bulan untuk membahas partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia, khususnya tentang pengiriman misi baru maupun penarikan (*ways to increase and to anticipate*).

Di dalam proses pelatihan, setiap *female peacekeeper* mendapatkan pelatihan sebagaimana personel laki-laki juga mendapat pelatihan. Diakui oleh PMPP TNI dan *female peacekeeper* sendiri bahwa mereka sama-sama menerima pembekalan, materi baik di kelas maupun di lapangan, sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan masuk dalam kelas yang sama, mendapat materi yang sama, dan mengikuti kegiatan aplikasi yang sama juga.

Pada saat pelatihan, *pre deployment training*, materi-materi yang didapatkan meliputi materi standar PBB termasuk informasi mengenai sistem PBB, operasi PKO, kondisi lapangan, budaya setempat, dan

sebagainya.¹⁰⁸ Para personel terpilih juga mendapat materi tentang *Women, Peace and Security* yang menekankan pada perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak di wilayah konflik. Pembekalan ini turut diberikan oleh *female peacekeeper* yang pernah berpartisipasi dalam misi PBB. Hal ini merupakan sebuah kemajuan dimana sebelumnya PMPP TNI masih memberikan materi tersebut melalui pelatih laki-laki saja.¹⁰⁹ Per tahun 2015, PMPP TNI sudah mulai menyediakan pelatih perempuan untuk memberikan materi tersebut, salah satunya adalah Letkol Sus. Ratih Pusparini.¹¹⁰ Terkait pemberian materi pelatihan, Letkol Sus. Ratih Pusparini menyampaikan pandangannya:

Untuk bicara tentang isu tersebut laki-laki bisa saja melakukan hal itu, tapi ada hal yang tidak bisa disampaikan laki-laki kepada perempuan dan itu hanya bisa disampaikan oleh mereka yang pernah berpengalaman di dalam misi. Persoalan ini bukan tentang permasalahan personal atau sektoral tetapi lebih kepada *image* yang melekat pada pekerjaan peacekeeping yaitu "*men's work*". *Image* ini yang perlu dikonstruksi kembali bahwa ada beberapa situasi dimana perempuan memiliki peran untuk membangun perdamaian. Kalau saya diberi kesempatan pun, saya dengan senang hati membagi pengalaman saya dan pesan kepada mereka yang akan berangkat misi.¹¹¹

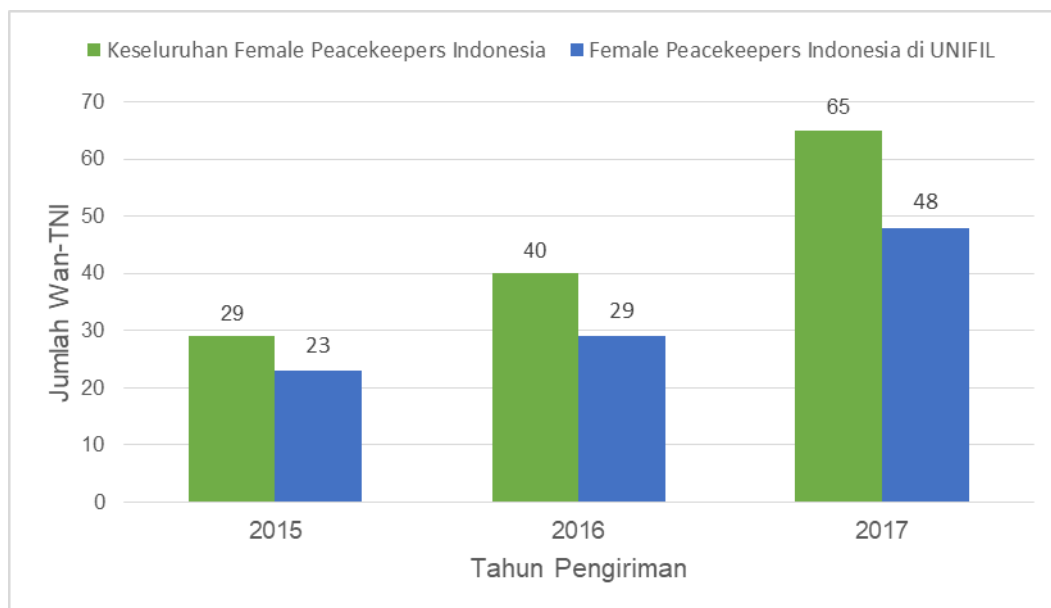
Setelah pelatihan selesai dilakukan, maka dipersiapkan keberangkatan menuju negara misi. Pada misi UNIFIL 2015-2017, diperoleh total 100 *female peacekeepers* Indonesia yang diberangkatkan ke Lebanon dengan grafik di bawah ini:

¹⁰⁸ PMPP TNI, *op.cit*, hlm. 241.

¹⁰⁹ Wawancara peneliti dengan Wakil Komandan PMPP TNI, Kolonel Pnb. Aldrin Petrus Mongan, di Kantor PMPP TNI Sentul, Bogor, 3 Oktober 2018.

¹¹⁰ Wawancara peneliti dengan *female peacekeeper* Indonesia, Letkol Sus. Ratih Pusparini, di Cijantung, 6 September 2018.

¹¹¹ *Ibid.*



Gambar 4.2 Perbandingan Jumlah *Female Peacekeepers* Indonesia secara keseluruhan dengan yang berada di UNIFIL (2015-2017)

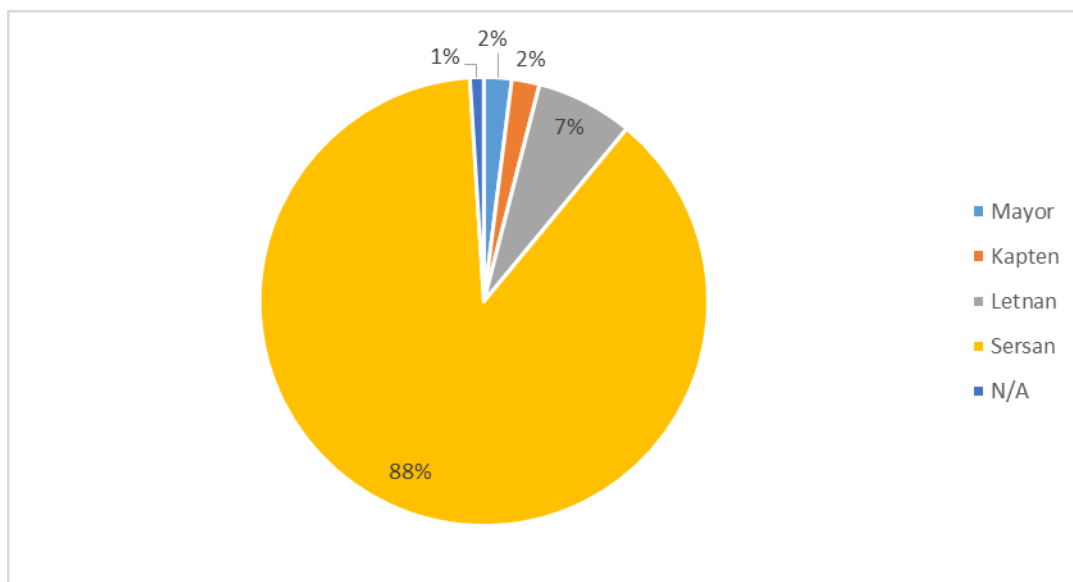
Sumber: Olahan Peneliti dari Data Wan-TNI di PMPP TNI per September 2018

Melalui grafik tersebut, dapat dilihat terjadi peningkatan secara bertahap terkait jumlah *female peacekeepers* yang diberangkatkan ke misi UNIFIL. Jika dibandingkan dengan jumlah *female peacekeepers* Indonesia secara keseluruhan, grafik tersebut dapat menunjukkan bahwa lebih dari 50% *female peacekeepers* ditugaskan di UNIFIL. Realita bahwa kuantitas *female peacekeeper* Indonesia ini meningkat, Peneliti CSIS Indonesia, Fitri Bintang Timur turut menyampaikan pendapatnya:

Peningkatan jumlah perempuan Indonesia dalam misi PBB menunjukkan komitmen Indonesia untuk membuat suatu pasukan perdamaian yang lebih ramah gender. Hal ini karena *stakeholder* yang ditangani di daerah misi ada laki-laki maupun perempuan sehingga jangkauannya lebih besar. Perlu dikaji apakah ada perubahan posisi dimana perempuan itu ditempatkan, misalnya, apakah perempuan sudah memegang posisi di lapangan atau pembuatan keputusan, atau sejak dulu sama saja, tidak ada kenaikan level. Apa kesulitannya?¹¹²

¹¹² Wawancara peneliti dengan Peneliti CSIS, Fitri Bintang Timur, di Kantor CSIS Jakarta, 14 September 2018.

Lebih lanjut, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL 2015-2017 menunjukkan komposisi kepangkatan berdasarkan data yang diolah peneliti dari PMPP TNI seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4.3 Komposisi *Female Peacekeepers* Indonesia di UNIFIL (2015-2017) berdasarkan Kepangkatan

Sumber: Olahan Peneliti dari data Wan-TNI PMPP TNI per September 2018

Dari proses penyiapan, didapat bahwa Indonesia, melalui instansi dan lembaga yang khusus mengurus misi pemeliharaan perdamaian turut mempertimbangkan misi mana saja yang dapat dikerahkan personel perempuannya, termasuk aspek keamanan untuk perempuan. Ini juga disampaikan oleh Analis Madya Sub-Direktorat Multilateral, Direktorat Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan, Kolonel Kav. Oktaheroe Ramsi, dalam wawancara dengan peneliti dengan pernyataan “dalam mengirim *female peacekeeper* tentu kita juga memperhatikan keamanan personel”. Lebih lanjut, wawancara peneliti dengan Representasi Ketua Pelaksana Harian TKMPP menyampaikan:

Wilayah Lebanon relatif aman, beberapa wanita TNI juga ada di Darfur dan Kongo. Tahun ini Lebanon mencapai 48 perempuan. Menurut saya UNIFIL itu *less hostile* dan perempuan disana sepengetahuan saya ada perbedaan tempat akomodasi wanita

dan laki-laki. Mayoritas mereka di CIMIC, medis dan ada juga di markas batalyon.¹¹³

Begitupun dengan PMPP TNI yang menyatakan:

Tentunya salah satu kendala yang dihadapi yaitu adat istiadat Timur, tetapi TNI mencoba memilah-milah mana hal-hal yang masih layak untuk dikerjakan oleh wanita TNI dan mana yang kurang cocok.¹¹⁴

Adapun UNIFIL menjadi misi dengan pengiriman *female peacekeeper* Indonesia terbesar bukan semata-mata karena wilayah yang *less hostile* atau aman. Menurut PMPP TNI, *hostile* itu bisa saja terjadi dari alam, kondisi yang tidak bisa diprediksi para pasukan pemelihara perdamaian. Menurut Mayor Caj. (K) Erna Nuraeni, *female peacekeeper* di UNIFIL tahun 2015-2016, di Lebanon juga bisa saja sewaktu-waktu terjadi peristiwa mendadak seperti pengalamannya selama misi dimana sempat terjadi demonstrasi dan pemblokiran ruas jalan oleh masyarakat, konflik internal di Kamp Pengungsi Ain El-Hilweh, serangan bom bunuh diri di Beirut, *rocket launching* dari wilayah Lebanon Selatan ke wilayah Israel beserta tembakan balasannya, serangan bom *Improvised Explosive Device (IED)* terhadap patroli Israel di Sheeba Farm/Mount Dove, hingga ditemukannya staf sipil (Hani Mattar) di UNIFIL yang terlibat jaringan mata-mata. Baginya, UNIFIL lebih tepat dikatakan 'relatif' aman.¹¹⁵ Alasan lain menurut PMPP TNI adalah karena permintaan dari PBB, struktur organisasi dan jumlah lowongan yang dibuka cenderung variatif sehingga Indonesia bisa mengirim lebih banyak.

¹¹³ Wawancara peneliti dengan Ketua Pelaksana Harian TKMPP, di Kantor Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri, 4 September 2018.

¹¹⁴ Narasi jawaban PMPP TNI yang diberikan kepada peneliti pada wawancara di Kantor PMPP TNI Sentul, Bogor, 3 Oktober 2018.

¹¹⁵ Wawancara peneliti dengan *Female Peacekeeper Indonesia*, Mayor Caj. (K) Erna Nuraeni, di Markas Besar TNI Cilangkap, 12 September 2018.

4.2.1.2 Posisi Penugasan *Female Peacekeepers* Indonesia dalam Misi UNIFIL 2015-2018

Partisipasi *female peacekeeper* secara umum dapat dilihat melalui tiga kelompok penempatan tugas yaitu prajurit kontingen (*formed units or contingents*), *military observer* dan *military staff*.¹¹⁶ Kontingen merupakan kelompok personel yang ditempatkan dalam berbagai unit pendukung seperti kendaraan lapis baja (*armour*), infantri, penerbang, insinyur, dan pendukung lainnya yang dapat memberikan dukungan seperti logistik, ahli dalam hal senjata penghancur dan peledak, serta bidang militer lainnya.¹¹⁷ Kontingen ini umumnya didesain untuk mendukung kebutuhan komponen militer. Adapun tugas yang dilakukan masing-masing unit dikendalikan oleh Kepala Misi *integrated support services* seperti *civilian* yang bukan merupakan bagian dari komponen militer.

Selanjutnya, *military observer* merupakan pasukan yang tidak dipersenjatai dan disediakan oleh negara anggota PBB untuk waktu 12 bulan.¹¹⁸ Milobs ini beroperasi dalam kelompok kecil antara dua hingga enam personel. Posisi ini umumnya ditempati oleh personel militer yang berpangkat Kapten atau Mayor. Tugas utamanya adalah untuk melakukan observasi, pemantauan, pengawasan, analisis dan melaporkan kondisi sosial-ekonomi dan keamanan masyarakat di dalam *area of responsibilities* serta tentang perkembangan kesepakatan damai yang dicapai oleh kedua pihak bertikai. Untuk mendukung tugas tersebut, Milobs melakukan patroli untuk mengumpulkan informasi, menyediakan laporan berkala yang akurat dan efektif, serta melakukan negosiasi dan mediasi dalam situasi yang sulit. Dengan demikian, posisi ini dapat dikatakan lebih berbahaya daripada pasukan Kontingen. Namun demikian, Milobs juga didukung oleh *protection escort* dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

¹¹⁶ United Nations, "UN Military Roles and Responsibilities", *Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards Module*, Agustus 2006, hlm. 2-3.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 3.

¹¹⁸ *Ibid*.

Terakhir yaitu *military staff*, secara teknis milstaf merupakan bagian dari Kontingen. *Military officers* secara individual bertugas sebagai staf baik di dalam markas pasukan (*force headquarters*) maupun di berbagai posisi khusus dimana mereka terintegrasi dengan staf sipil. Di UNIFIL sendiri, posisi yang ditempati oleh *female peacekeepers* Indonesia berada pada Kontingen dan *Military Staff*. Khusus untuk *military observer*, terlepas dari vakumnya Indonesia mengirimkan milobs tahun 2011-2017, absennya milobs di UNIFIL disebabkan tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel sebagai pihak yang terlibat konflik.¹¹⁹ Sebelumnya, Indonesia mengirimkan milobs pada tahun 2010 ke misi MONUC Kongo atas nama Letkol Falah Dartajari.¹²⁰ Hubungan diplomatik dengan kedua negara bertikai merupakan hal penting dalam menempatkan milobs mengingat pelaksanaan tugas yang akan melibatkan dua pihak tersebut.

Pada bagian kontingen, pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda (Konga). Di UNIFIL sendiri, pada tahun 2015-2017, *female peacekeepers* Indonesia menempati jabatan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan misi dan mandat PBB. Jabatan tersebut antara lain:

Tabel 4.3 Jabatan Penugasan Konga di UNIFIL 2015-2017

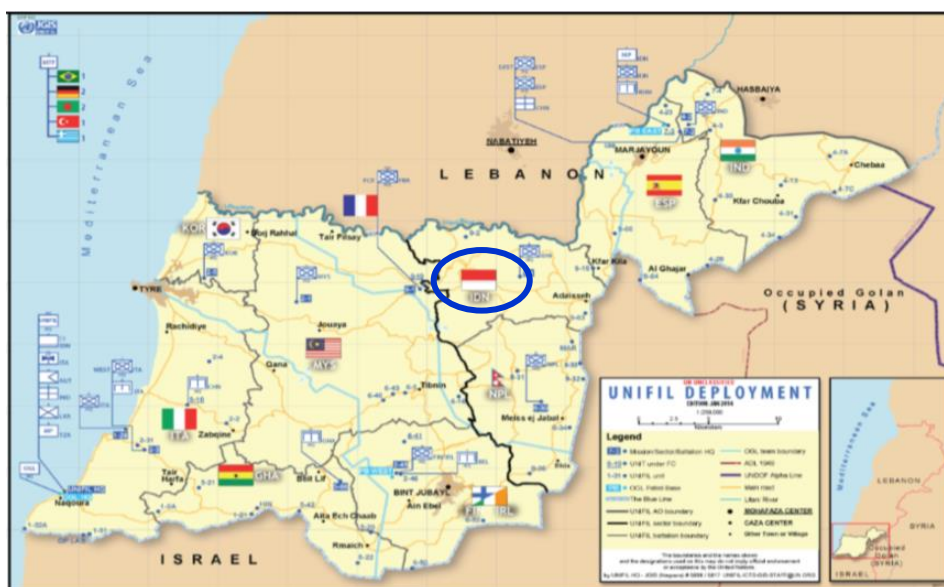
| No. | Jabatan Penugasan Konga di UNIFIL 2015-2017 |
|-----|--|
| 1. | Satgas Yonmek (Satuan Tugas Batalyon Infantri Mekanis) |
| 2. | FHQSU (<i>Force Headquarter Support Unit</i>) |
| 3. | FPC (<i>Force Protector Company</i>) |
| 4. | MPU (<i>Military Police Unit</i>) |
| 5. | MCOU (<i>Military Community Outreach Unit</i>) |
| 6. | Level II Hospital |

Sumber: Data Wan-TNI, PMPP TNI per September 2018

¹¹⁹ Wawancara Peneliti dengan Kasisiapops Dirbinrenops PMPP TNI, Mayor Riwan Sugiyono, di Kantor PMPP Sentul, Bogor, 1 Oktober 2018.

¹²⁰ Data Wan-TNI PMPP per September 2018.

Adapun dalam bagian *military staff*, *female peacekeeper* Indonesia ditempatkan di Naqoura.¹²¹ Jika dilihat dalam peta sebaran pasukan UNIFIL di Lebanon Selatan, maka Batalion Indonesia (Indobatt) terletak pada Sektor Timur seperti gambar berikut:

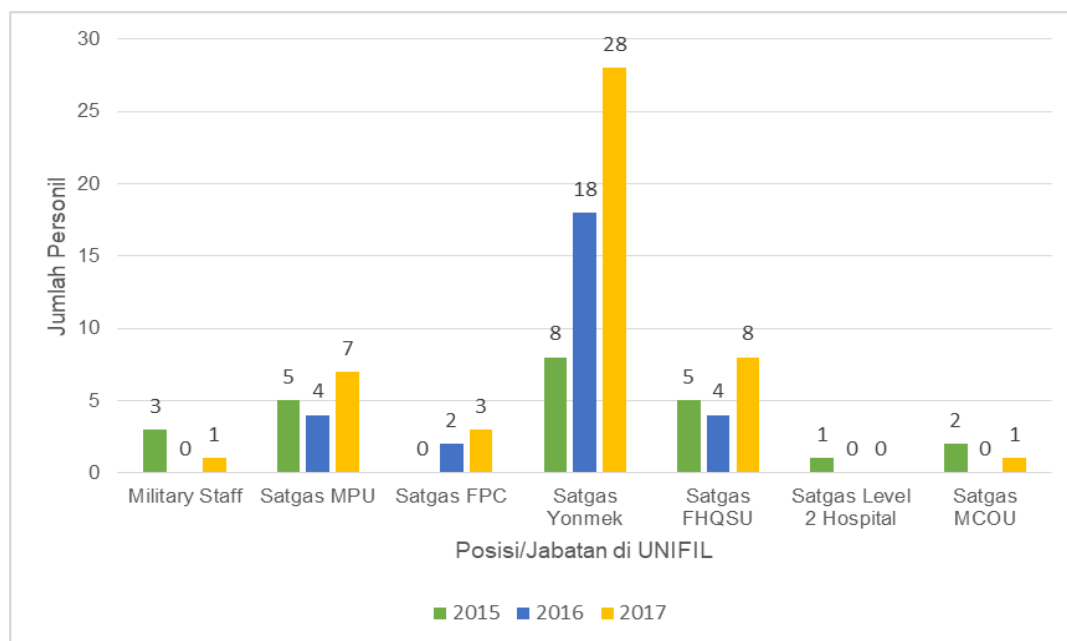


Gambar 4.4 Peta Sebaran Pasukan UNIFIL

Sumber: Laporan Purna Tugas Mayor Caj. (K) Erna Nuraeni, 2016

Lebih lanjut, dalam sebaran pasukan tersebut, komposisi penugasan *female peacekeepers* Indonesia di UNIFIL 2015-2017 mencakup beragam jabatan yang peneliti sajikan dalam gambar di bawah ini:

¹²¹ *Ibid.*



Gambar 4.5 Posisi *Female Peacekeepers* Indonesia di UNIFIL (2015-2017)

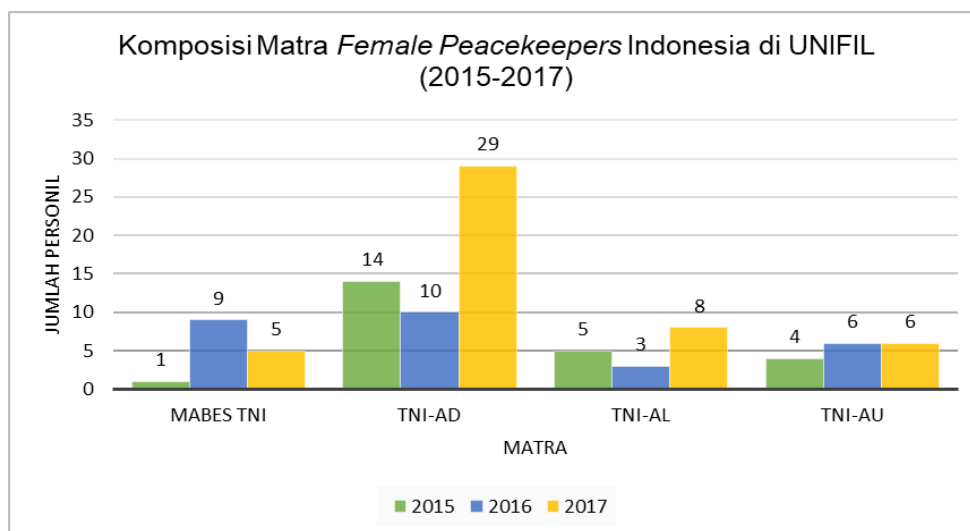
Sumber: Olahan Peneliti dari Data Wan-TNI PMPP TNI per September 2018

Melihat data tersebut, posisi *female peacekeepers* Indonesia di UNIFIL tahun 2015-2017 terlihat fleksibel dalam artian mengalami dinamika di setiap tahunnya. Namun, data tersebut dapat disoroti bahwa penugasan pada bagian Kontingen mendominasi keseluruhan penugasan dibandingkan pada posisi *military staff*. Memperhatikan posisi ini, TKMPP menyampaikan:

“Kita ingin wanita TNI bisa berkontribusi di *military staff* dan *military observer*. Belum nanti bicara tentang *first commander* atau jabatan-jabatan strategis lainnya yang dijabat oleh perempuan. Itu masih panjang. Tapi untuk contingent troops sudah ada kenaikan, mereka ada di CIMIC, medis, dan sebagainya.”

Lebih lanjut, misi UNIFIL disebut memiliki keunikan tersendiri dimana Indonesia berkontribusi mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian dengan komposisi mata baik dari angkatan darat, laut dan udara serta yang secara khusus dikirim dari Mabes TNI. Tidak seluruh misi yang diikuti oleh Indonesia memiliki komposisi pasukan dari seluruh mata tersebut. Pada tahun 2015-2017, khusus untuk *female peacekeeper*

Indonesia, tercatat total 15 dari Mabes TNI, 53 dari angkatan darat, 16 dari angkatan laut, dan 16 dari matra udara. Komposisi per tahunnya dapat dilihat dalam ilustrasi grafik di bawah ini:



Gambar 4.6 Komposisi Matra Female Peacekeepers Indonesia di UNIFIL (2015-2017)

Sumber: Olahan Peneliti dari Data Wan TNI PMPP TNI per September 2018

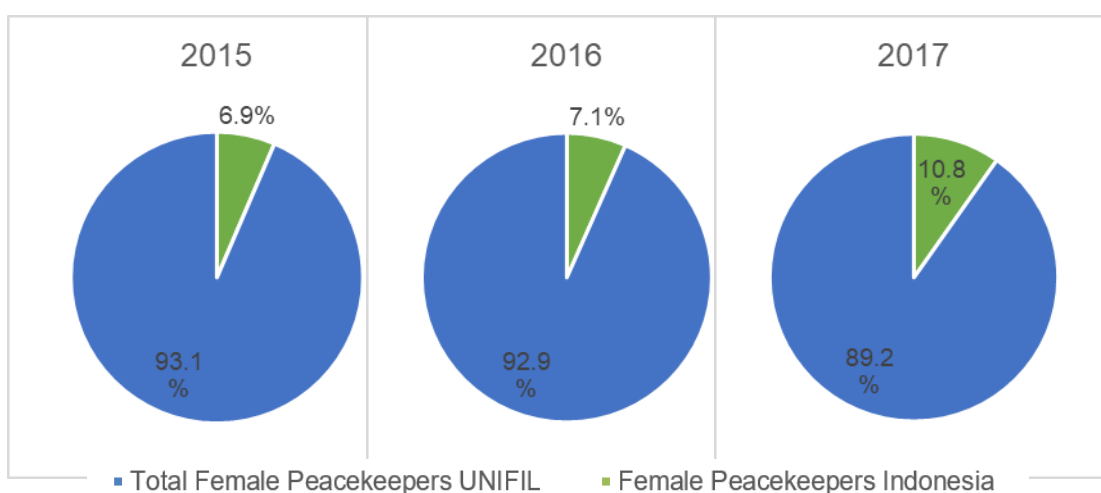
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa komposisi angkatan darat cenderung lebih banyak daripada angkatan laut dan udara dengan perbandingan 53:16:16. Untuk melihat signifikansi jumlah *female peacekeepers* Indonesia yang ditugaskan di UNIFIL, perlu dilihat perbandingannya atau porsi *female peacekeepers Indonesia* dengan keseluruhan personel dari negara kontributor lainnya yang berkontribusi dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Persentase Female Peacekeepers Indonesia dalam Total Female Peacekeepers di UNIFIL (2015-2017)

| Keterangan | Tahun | | |
|---|-------|------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Total <i>Female Peacekeepers</i> UNIFIL | 334 | 408 | 444 |
| <i>Female Peacekeepers</i> Indonesia | 23 | 29 | 48 |
| Persentase <i>female peacekeepers</i> Indonesia | 6.9% | 7.1% | 10.8% |

Sumber: Olahan Peneliti

Data dalam tabel tersebut dapat diilustrasikan dalam diagram lingkaran sebagai berikut untuk melihat porsi *female peacekeepers* Indonesia di dalam misi UNIFIL tahun keberangkatan 2015-2017. Secara kuantitas, persentase partisipasi *female peacekeeper* Indonesia mengalami peningkatan dan ini sejalan dengan pernyataan oleh Wakil Komandan PMPP TNI bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk menambah partisipasi perempuan dalam misi perdamaian. Lebih dari itu, ini juga dikonfirmasi oleh TKMPP bahwa proses peningkatan ini tentu dilakukan secara bertahap mengingat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan perekrutan *female peacekeepers*.



Gambar 4.7 Porsi *Female Peacekeepers* Indonesia dari total *Female Peacekeepers* di UNIFIL

Sumber: Olahan Peneliti

Gambar tersebut menunjukkan porsi *female peacekeepers* Indonesia di tengah-tengah *female peacekeepers* dari 41 negara kontributor lainnya. Dari tujuh operasi pemeliharaan perdamaian PBB terbesar di dunia dengan lebih dari 4.000 prajurit, UNIFIL menempati peringkat kedua dalam hal persentase *female peacekeepers* setelah peringkat pertama diduduki oleh *UN Interim Security Force for Abyei*

(UNISFA).¹²² Dengan persentase seperti di atas, *female peacekeepers* Indonesia mencatat prestasi sebagai negara kontributor *female peacekeepers* terbesar ketiga setelah Ghana dan Perancis. Hal ini merupakan sebuah bentuk nyata komitmen Indonesia untuk meningkatkan partisipasi perempuan secara bertahap dan berkontribusi terhadap berbagai program kegiatan.

4.2.1.3 Keterlibatan *Female Peacekeeper* Indonesia dalam Program Kegiatan UNIFIL 2015-2017

Indonesia tergabung dalam misi UNIFIL sejak tahun 2006. Kedatangan pertama Batalyon Indonesia di Lebanon pada 10 November 2006.¹²³ Namun demikian, partisipasi *female peacekeepers* Indonesia di UNIFIL baru dimulai pada tahun 2007-2008 dengan penugasan sebagai *military staff* di Sektor Timur.¹²⁴ Hal ini berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya dengan terus melibatkan perempuan sebagai *peacekeepers* di dalam penugasan baik sebagai kontingen maupun *military staff*. Perempuan yang dimaksud disini merupakan komponen utama pertahanan Indonesia yaitu komponen militer dalam kelompok Wan-TNI.

Dalam periode keberangkatan 2015-2017, *female peacekeepers* Indonesia terlibat dalam berbagai program kegiatan sesuai dengan penugasan masing-masing. Dalam penggalian informasi terkait program kegiatan yang diikuti oleh *female peacekeepers* Indonesia ini, peneliti menyoroti setidaknya empat bidang utama kegiatan yaitu hubungan militer dan sipil (CIMIC), *military outreach*, medis, dan logistik.

Dalam bidang hubungan militer dan sipil (CIMIC/*Civil Military Cooperation*), *female peacekeepers* Indonesia memiliki peran yang baik

¹²² Tilak Pokharel, "Advancing Women Peacekeepers Role in UNIFIL", 8 Maret 2018, dalam <https://unifil.unmissions.org/advancing-women-peacekeepers-role-unifil>, diakses pada 2 November 2018.

¹²³ UNIFIL, "Press Release Indonesia Joins UNIFIL", Naqoura, 11 November 2006, dalam https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/docs/pr072_2.pdf, diunduh pada 10 September 2018.

¹²⁴ Data Wan-TNI, PMPP TNI September 2018.

dalam artian dapat diterima oleh masyarakat lokal. Hal ini seperti disampaikan oleh Letkol Sus. Ratih Pusparini:

Perempuan pemelihara perdamaian lebih terlihat dalam hubungan diterimanya dengan masyarakat lokal. Perempuan mempunyai akses yang lebih mudah untuk melakukan pendekatan terhadap perempuan dan anak-anak di wilayah konflik, khususnya kepada korban kekerasan berbasis gender. Perempuan juga dapat memperbaiki akses dan memberikan dukungan kepada perempuan di wilayah lokal untuk memberdayakan perempuan.¹²⁵

Kegiatan CIMIC dalam misi UNIFIL berupaya mengkomodir kebutuhan masyarakat dan mendukung otoritas lokal dengan memperkuat hubungan antara UNIFIL dengan komunitas lokal. Hal ini ditunjukkan antara lain melalui program kegiatan perbaikan jalan, penyediaan jasa medis, dokter gigi atau dokter hewan, berbagai kursus pendidikan, peningkatan kapasitas (*capacity building*) seperti menjahit, bahasa, komputer maupun pelajaran tentang pertolongan pertama. Program ini menjadi salah satu kontribusi nyata para pemelihara perdamaian dan meninggalkan jejak positif di Lebanon Selatan.

Pada tahun 2016, sejak 1 Januari hingga 2 April tercatat lebih dari 3.500 aktivitas yang dilakukan dalam program CIMIC. Program ini antara lain 34% berkaitan dengan bantuan sanitasi dan kesehatan, termasuk perawatan terhadap 9.964 pasien. Selanjutnya, 28% program ini berkaitan dengan hubungan pendampingan (*liaison*) dan pertemuan-pertemuan dengan otoritas lokal dan keagamaan, kepala sekolah, direktur pusat sosial, NGO, dan kontraktor. Program ini masih berfokus pada program CIMIC dimana diupayakan pengorganisasian jalan pasar, pendampingan mengenai isu-isu lalu lintas, penjadwalan konsultasi kesehatan, penilaian situasi, sehingga membangun kepercayaan antara sipil dan militer. 25% selanjutnya adalah berfokus pada kegiatan pendidikan dimana utamanya

¹²⁵ Ratih Pusparini, "The Role of Women Peacekeepers in UN Peacekeeping Operations: Lesson Learned", Presentasi dalam Side Event UNDPKO, Special Committee for Peacekeeping Operations (C-34) di New York, 22 Februari 2017.

berupa kursus bahasa. Selibhnya, sejak 1 januari hingga 8 April 2016, negara kontributor melakukan 70 donasi.

Lebih lanjut, memperhatikan isu gender pada misi UNIFIL, pada Agustus 2016 telah terbentuk tim khusus yang terdiri dari *female peacekeeper* baik yang berseragam maupun sipil untuk memastikan perspektif gender hadir dalam berbagai interaksi batalion dengan perempuan di dalam komunitas Lebanon Selatan. Tim khusus ini adalah *Female Assessment/Analysis and Support Team (FAST)*, yang terbentuk dengan 21 *peacekeepers* militer dan sipil lintas wilayah operasi UNIFIL. Setiap anggota tim ini dilatih dan dipanggil dari Kontingen UNIFIL untuk memberikan kehadiran perempuan dalam berbagai situasi sensitif akan budaya.¹²⁶

Dalam tiga minggu pertama terbentuknya FAST, dilakukan pertemuan antara FAST dan kelompok perempuan di desa lintas Lebanon Selatan. Resepsi FAST diterima dengan baik berdasarkan Kantor Urusan Gender UNIFIL. Hadirnya FAST ini mengupayakan misi yang lebih ramah gender atau inklusif gender. Maksud ramah gender disini setidaknya adalah memahami perbedaan kebutuhan atau perlakuan antara perempuan dan laki-laki, serta turut memberdayakan mereka. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan kehadiran *female peacekeeper* yang membuat misi menjadi lebih mudah dijangkau oleh perempuan setempat. Berdasarkan laman resmi UNIFIL, disampaikan bahwa Perempuan di Lebanon mengaku merasa lebih nyaman untuk menyampaikan informasi, situasi terkini atau bahkan ancaman yang mereka rasakan kepada *female peacekeepers*.¹²⁷ Melihat *female peacekeepers* berjalan melakukan patroli saja mereka sudah merasa lebih nyaman dan turut menyambutnya dengan positif. Berbeda jika yang menghampiri mereka adalah personel laki-laki, masih ada rasa takut untuk menyampaikan informasi. Namun,

¹²⁶ UNIFIL, "New UNIFIL Initiative to Ensure Gender Perspective in Host Communities", dalam <https://unifil.unmissions.org/new-unifil-initiative-ensure-gender-perspective-host-communities>, 8 September 2016, diakses pada 9 Oktober 2018.

¹²⁷ *Ibid.*

bukan berarti bahwa personel laki-laki tidak bisa seutuhnya melakukan pendekatan kepada masyarakat. Hanya saja, personel perempuan memberi kenyamanan tersendiri sehingga dapat membuka pintu untuk menggali informasi lebih lanjut.

Di dalam UNIFIL sendiri, persentase keseluruhan *female peacekeeper* berseragam hanya ada 3%, tetapi masih ada batalyon dan unit militer yang tidak memiliki personel perempuan sama sekali. FAST secara spesifik didesain untuk melawan ini dan memastikan perspektif gender dapat selalu hadir khususnya dalam isu sensitif. Adapun dua tujuan utama terbentuknya FAST yaitu memberikan kesempatan kepada perempuan dalam komunitas untuk berkonsultasi dengan *female peacekeeper* UNIFIL dan menjadikan misi UNIFIL lebih inklusif terhadap perspektif keselamatan dan keamanan.

Setelah dibentuk pada tahun 2016, kegiatan patroli pertama dilakukan pada tahun 2017. Ini dilakukan oleh 6 personel dari negara-negara yang berbeda yaitu Ghana, Irlandia, Italia, Korea Selatan, Malaysia dan Belanda.¹²⁸ Indonesia bukan merupakan tim dalam patroli pertama melainkan baru pada tahun 2018 mengingat adanya rotasi tim *all female patrol*. Pada patroli tersebut Indonesia bersama *female peacekeeper* dari Nepal, Serbia dan Spanyol melakukan patroli berjalan kaki dan *market walk* di Souk al Khan dengan tujuan memasukkan perspektif gender dalam aktivitas operasional misi, memberi kesempatan kepada perempuan lokal untuk lebih dekat dan nyaman bersama *peacekeeper* tanpa mengabaikan norma budaya setempat. Dengan patroli tersebut *female peacekeeper* dapat mendengar isu yang berkembang di masyarakat, pendapat mereka tentang misi, dan cerita-cerita menarik dari masyarakat lokal.

¹²⁸ Suzane Badereddine dan Zeina Ezzeddine, "UNIFIL Female Assessment/Analysis Support Team (FAST) Patrols in Rmeish", 18 Desember 2018 dalam <https://unifil.unmissions.org/unifil-female-assessmentanalysis-support-team-fast-patrols-rmeish>, diakses pada 30 Oktober 2018.

Selanjutnya, dalam sorotan bidang *community outreach*, partisipasi aktif *female peacekeepers* Indonesia Pada tahun 2015-2017 juga tergambar dalam program MCOU (*Military Community Outreach Unit*). Penjangkauan masyarakat merupakan salah satu prioritas utama bagi UNIFIL untuk memastikan arus informasi yang regular baik dari maupun kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, tim MCOU juga dibantu oleh asisten bahasa dimana beberapa dari mereka adalah perempuan. Di Lebanon, terdapat tantangan tersendiri untuk bekerja dengan perempuan-perempuan lokal. Hal ini tergambar dimana representatif dari otoritas lokal mayoritas adalah laki-laki, sehingga penjangkauan komunikasi utamanya dilakukan dengan dan melalui laki-laki di komunitas. Perempuan lokal biasanya justru berada pada kegiatan pendidikan lokal.¹²⁹

Menyadari tantangan tersebut, UNIFIL melakukan kunjungan ke sekolah di Aytarun yaitu sebuah desa yang dekat dengan *Blue Line* Lebanon Selatan. Dalam kunjungan tersebut, *female peacekeeper* Indonesia yaitu Sertu Etikasari, memberikan penjelasan dan membuka diskusi tentang UNIFIL dan *Blue Line*. *Blue line* merupakan garis 120 kilometer penarikan pasukan. Garis tersebut dibuat oleh PBB pada tahun 2000 untuk mengkonfirmasi penarikan pasukan Israel dari Lebanon. Pada pertemuan tripartit tahun 2007, setiap pihak sepakat untuk memperjelas tanda garis biru tersebut. Penting diketahui bahwa garis biru bukan merepresentasikan batas internasional dan tanpa praduga terhadap perjanjian perbatasan antara Lebanon dan Israel di masa depan. Proses penandaan garis biru ini merupakan proyek tripartit yang sedang berlangsung untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan meredakan ketegangan. Tong biru (*blue barrel*) juga secara langsung berkontribusi terhadap keamanan orang-orang yang tinggal di kedua sisi tersebut dengan mencegah penyeberangan yang tidak disengaja.

¹²⁹ UNIFIL, "Women, Peace and Identifying Security: Piloting Military Gender Guidelines in UNIFIL", Final Report, June 2014, hlm. 11.



Gambar 4.8 Female Peacekeepers Indonesia, Sertu Ertikasari, Melaksanakan Program Community Outreach (2017)

Sumber: <https://unifil.unmissions.org/>

Hal menarik dalam program kegiatan *community outreach* di UNIFIL ini bahwa *female peacekeeper* Indonesia yang dipilih sebagai *spokeperson* untuk menjelaskan hal tersebut kepada anak-anak. Pendekatan kepada anak-anak bukan merupakan hal yang mudah dimana penyampaian perlu diberikan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti dan tidak membosankan. Sertu Etikasari mampu menyampaikan dengan bahasa yang lebih menyenangkan sehingga anak-anak juga turut meresponnya dengan senang dan tersenyum.¹³⁰ Hal ini menjadi salah satu citra *peacekeepers* Indonesia bahwa personel Indonesia adalah mereka yang ramah dan santun. Budaya ketimuran yang melekat di dalam personel ini upayanya mampu mendukung kegiatan misi menjadi lebih mudah dan komunikatif. Adapun *female peacekeeper* dari Kontingen Garuda turut berpartisipasi dalam kegiatan ini yaitu Serka Dian Rosdiana dan Eliana sebagai penerjemah.

¹³⁰ Aoibheann O'Sullivan, "“Mr. and Mrs. Blue Barrel” Educate Young Children on Blue Line Safety”, 15 November 2017, dalam <https://unifil.unmissions.org/%E2%80%9Cmr-and-mrs-blue-barrel%E2%80%9D-educate-young-children-blue-line-safety>, diakses pada 6 November 2018.

Pada gambar 4.8, dapat terlihat bahwa tim dari UNIFIL berupaya memberikan materi secara interaktif. Di kelas tersebut, ditunjukkan beberapa alat peraga seperti tong berwarna biru dan tali biru berukuran empat meter yang diikat diantara tong. Beberapa siswa turut menjadi peraga tentang situasi menghadapi *blue line*. Hal ini penting dijelaskan agar anak-anak tidak melintasi batas dan memasuki wilayah yang berbahaya. Mendekati blue line dapat membahayakan mereka dimana terdapat resiko tinggi terhadap ranjau, *unexploded ordinance*, dan sisa-sisa perang yang bisa meledak. Mendekati blue barrels juga beresiko terhadap penyeberangan tidak disengaja dan ini menjadi sebuah pelanggaran terhadap Resolusi DK PBB 1701.

Program ini tidak hanya dilakukan di satu sekolah tetapi juga sekolah lain sepanjang *Blue Line* untuk membantu mereka memahami tentang petunjuk keamanan (*safety*) dan pentingnya agar tidak menyeberangi garis. Jika tidak, ini dapat berakibat pada eskalasi tegangan sepanjang garis demarkasi yang sedang dijaga oleh UNIFIL dan berkolaborasi dengan LAF (*Lebanese Armed Forces*). Sesi pendidikan ini berkaitan erat terhadap aspek utama mandat UNIFIL dari memastikan stabilitas di area operasi, khususnya sepanjang *blue line*, dan proteksi terhadap *civilians*.

Dari program tersebut, respon positif juga didapat dimana setelah selesai presentasi, salah satu pengajar di Yarin Public School (Ms. Tharwat George Hassrouni) menyampaikan bahwa pekerjaan *outreach* dari UNIFIL ini memang begitu krusial untuk perlindungan personal anak-anak.¹³¹ Dukungan ini sejalan dengan situasi bahwa anak-anak juga tinggal di area yang dekat dengan *blue line*. Mereka sering mengunjungi area untuk menanam tanaman, bermain dan mengunjungi hutan. Dengan demikian program ini mengupayakan agar mereka dapat waspada, berhati-hati, dan tidak mendekat ke tanah yang terkontaminasi.

Lebih lanjut, partisipasi *female peacekeepers* Indonesia dalam program kegiatan UNIFIL juga mencakup bidang medis. Salah satu *female*

¹³¹ *Ibid.*

peacekeeper yang terlibat langsung adalah dr. Sarah yang bertugas sebagai *Chief Hygiene Officer*. Dengan jabatan ini, *female peacekeeper* Indonesia berpartisipasi langsung dalam hal menjaga sanitasi, higienitas kompon di Naqoura. Salah satu kegiatannya adalah melakukan pemeriksaan yang setiap timnya diberlakukan system rotasi atau *rolling*. Berdasarkan wawancara peneliti dengan dr. Sarah, disebutkan bahwa terdapat salah satu tantangan dalam melaksanakan kegiatan *hygiene* ini

Tantangan yang pernah kami rasakan saat itu adalah ketika kami harus berkoordinasi dengan *civilian* setempat karena ada tempat pembuangan sampah yang sudah menimbulkan bau yang sangat mengganggu sekitar. Tempat sampah ini harus dipindahkan dan kami perlu melakukan komunikasi baik dengan masyarakat maupun dengan *battalion* terdekat dari pembuangan sampah tersebut untuk menjamin kenyamanan dan higienitas.¹³²

Menghadapi tantangan tersebut, kemampuan komunikasi adalah hal penting yang perlu dimiliki oleh seorang *peacekeeper* baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal pekerjaan, dr. Sarah mengaku bahwa tidak ada diskriminasi dalam melakukan pekerjaan. Sebagai perempuan ia tetap didengar dan dapat menjalankan tugas dengan profesional. Baginya, profesionalisme adalah kewajiban yang sangat mendukung pekerjaan. Lebih lanjut, setiap kondisi yang berkaitan dengan medis dan higienitas dijelaskan lebih lengkap di dalam SOP (Standar Operasional Prosedur). Dengan membaca dan memahami SOP, setiap pekerjaan akan dapat diselesaikan tentang apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dihubungi dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya.

Selanjutnya, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia juga hadir di dalam bidang logistik. Salah satu *female peacekeeper* ini adalah Mayor Caj. (K) Erna Nuraeni yang ditugaskan pada periode 2015-2016 sebagai *military staff* untuk bagian JLOC (*Joint Logistics Operations Center*).

¹³² Wawancara Peneliti dengan *Female Peacekeeper* Indonesia, Mayor Ckm (K) dr. Sarah Tidar, di Rumah Sakit Salak, Bogor, 20 September 2018.

Selama bertugas, beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam hal logistik antara lain:

- a. Menerima laporan mingguan dari Sektor Barat, Sektor Timur dan Kontingen-Kontingen di UNIFIL terkait logistik termasuk makanan, CRPs, air minum dan laporan aktivitas *engineering* dari seluruh unit UNIFIL serta laporan *fuel*;
- b. Mengumpulkan dan mengulas seluruh kegiatan dan permasalahan terkait MSC (*Mission Support Center Operations/Logistics Matters*) di sektor timur dan beberapa negara kontributor di sektor barat serta memberikan asistensi terkait permohonan pemenuhan logistik;
- c. Melaksanakan tugas *duty officer* sesuai jadwal di *Joint Operation Center* (JOC);
- d. Melakukan koordinasi dan pemantauan bersama MOVCON (*Movement Convoy*) terkait aktivitas pergerakan keluar maupun menuju area UNIFIL;
- e. Bekerjasama dengan unit pendukung lainnya baik dalam hal lingkungan, *emergency response team*, *mass casualties*, *force protection*, dan sebagainya;

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, baik dalam hal logistik, medis, maupun posisi lainnya juga mengikuti kegiatan sosial seperti *gathering*, *cultural events*, kegiatan keagamaan dan sebagainya. Secara garis besar, partisipasi *female peacekeeper* tidak mengalami hambatan berarti. Namun, keterlambatan rotasi personel memberi konsekuensi bahwa *female peacekeeper* Indonesia tidak maksimal mendapat serah terima dan penjelasan untuk mengawali tugasnya. Adapun rangkuman hasil penelitian ini peneliti sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Partisipasi Female Peacekeeper Indonesia dalam Misi UNIFIL tahun 2015-2017

| Variabel Partisipasi | Hasil/Temuan Penelitian |
|-------------------------------------|---|
| Penyiapan | <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan <i>female peacekeepers</i> Indonesia dilakukan secara terintegrasi dengan personel laki-laki. - Indonesia mengadopsi pendekatan <i>top-down</i> dalam proses penyiapan dari perekrutan hingga pemberangkatan, semua berdasarkan mandat dan direktif atasan. - Partisipasi <i>female peacekeepers</i> Indonesia menghadapi hambatan dan tantangan baik secara kapasitas individu, terbatasnya jumlah Wan-TNI, izin atasan dan atau suami, budaya ketimuran, kehilangan jabatan dan absennya regulasi komposisi gender. - Dalam hal pemberangkatan, keterlambatan rotasi personel adalah hal yang menghambat personel dalam memulai pekerjaan. - Secara kuantitas, partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia dalam misi UNIFIL 2015-2017 mengalami peningkatan dengan total 100 personel dari total 134 <i>female peacekeeper</i> Indonesia yang tersebar ke sembilan misi. |
| Posisi Penugasan | <ul style="list-style-type: none"> - Posisi penugasan <i>female peacekeepers</i> Indonesia di UNIFIL tahun 2015-2017 berada pada bagian <i>military staff</i> dan satuan tugas di Kontingen. Posisi ini mendominasi posisi pendukung (<i>supporting</i>) daripada substansial, - <i>Female peacekeepers</i> Indonesia di UNIFIL merepresentasikan seluruh matra TNI dengan komposisi dari yang terbanyak yaitu AD, AL dan AU. - Dalam pelaksanaan tugas, <i>female peacekeepers</i> Indonesia dikenal sebagai personel yang ramah dan sopan dengan budaya ketimuran. |
| Keterlibatan dalam Program Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan <i>female peacekeepers</i> Indonesia dalam program kegiatan di UNIFIL tahun 2015-2017 berlangsung pada bidang administrasi, <i>community outreach</i>, medis, CIMIC, dan logistik. |

| Variabel Partisipasi | Hasil/Temuan Penelitian |
|----------------------|--|
| | - Partisipasi disini menganut prinsip kebermanfaatan baik untuk komunitas maupun untuk pengembangan diri personel. |

Sumber: Olahan Peneliti

4.2.2 Dampak Partisipasi *Female Peacekeepers* Indonesia terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia

Personel militer merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Indonesia. Sebagai aktor utama yang menjaga pertahanan bangsa, komponen militer juga dikerahkan ke luar batas negara untuk kepentingan perdamaian. Perempuan dalam hal ini bukan merupakan suatu pengecualian. Partisipasi *female peacekeepers* Indonesia dalam misi UNIFIL 2015-2017 menjadi salah satu alat diplomasi pertahanan Indonesia dan bukti bahwa Indonesia berkontribusi aktif terhadap perdamaian dan ketertiban dunia. PMPP TNI dalam hal ini turut menyampaikan bahwa:

Diplomasi pertahanan itu pada dasarnya menggunakan militer serta institusi pertahanan dalam konteks kebijakan luar negeri serta berinteraksi dengan negara-negara mitra. Dalam kaca mata diplomasi pertahanan, pengiriman *female peacekeepers* merupakan salah satu agenda penting, karena hal tersebut dipandang sebagai suatu komitmen dan keseriusan dari negara-negara pengirim pasukan perdamaian dalam berkontribusi pada misi perdamaian dunia.¹³³

Dalam menjelaskan dampak partisipasi *female peacekeeper* Indonesia terhadap diplomasi pertahanan Indonesia, peneliti melakukan pengamatan berdasarkan tatanan *confidence building measures* melalui indikator komunikasi dan tatanan *capacity building* melalui indikator pelatihan.

¹³³ Wawancara peneliti dengan Wakil Komandan PMPP TNI, Kolonel Pnb. Aldrin Petrus Mongan, di Kantor PMPP TNI Sentul, Bogor, 3 Oktober 2018.

4.2.2.1 *Confidence Building Measure: Komunikasi Indonesia dalam Level PBB terkait Misi Pemeliharaan Perdamaian*

Menurut Wakil Komandan PMPP TNI, Indonesia selalu menjalankan misi pemeliharaan perdamaian sesuai dengan ketentuan PBB (*mandatory*).¹³⁴ Partisipasi *female peacekeeper* juga disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis. Sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia, hal ini tentu dilaksanakan dalam level global melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2015, misi pemeliharaan perdamaian ini termasuk ke dalam kerjasama multilateral dan partisipasi Indonesia memberikan nilai yang semakin baik terhadap hubungan luar negeri dan implementasi politik luar negeri yang berprinsip bebas aktif.¹³⁵

Lebih lanjut, partisipasi *female peacekeepers* Indonesia menjadi salah satu poin penting dalam melakukan komunikasi dengan PBB, khususnya Dewan Keamanan, terkait kontribusi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian. Meningkatnya angka partisipasi *female peacekeepers* Indonesia setidaknya turut berpengaruh pada *leverage* Indonesia dalam berkomunikasi di PBB. Hal ini menjadi nilai tambah untuk Indonesia sebagai negara yang konsisten mengirimkan *female peacekeepers*.¹³⁶ Menurut TKMPP, diplomasi Indonesia akan menjadi cerita yang berbeda jika Indonesia hanya mengirimkan pasukan laki-laki saja seperti yang disampaikan representasi Ketua Pelaksana Harian TKMPP dalam wawancara dengan peneliti di Kementerian Luar Negeri, Pejambon:

Kalau TCC kirim pasukan laki-laki semua, bagi PBB tidak ada yang istimewa. Kalau kita bisa melebihi target, itu akan lebih bagus.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta, 2015), hlm. 89-92.

¹³⁶ Wawancara peneliti dengan Ketua Pelaksana Harian TKMPP, di Kantor Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri, 4 September 2018.

Apalagi kalau kita bisa kirim *female peacekeeper* banyak dan dalam posisi *critical enablers*, *leverage* kita akan naik. PBB sendiri mengetahui kesulitan TCC dalam merekrut *female peacekeeper* dengan berbagai hambatan. Jadi, ketika kita bisa mengatasi itu, Indonesia mempengaruhi daya tawar (*bargaining position*) di PBB khususnya tentang *peacekeeping*.¹³⁷

Untuk itu, para *stakeholder* terkait dalam diplomasi pertahanan Indonesia ini berupaya melakukan komunikasi di PBB dengan agenda strategis yang disepakati bersama. Dalam hal komunikasi, terdapat beberapa agenda yang diangkat oleh Indonesia. Agenda ini antara lain adalah target Indonesia dalam mencapai 4.000 *peacekeepers* dan proposal Indonesia untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Untuk mendapat kesempatan bicara di level PBB bukan merupakan hal yang mudah kecuali suatu negara mempunyai isu penting dan *bargaining position* yang cukup kuat. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat di level PBB juga terdapat kecenderungan kekuasaan tertentu dilihat dari kontribusi yang diberikan terhadap eksistensi PBB.

Untuk mencapai target 4.000 *peacekeepers*, Indonesia perlu melakukan komunikasi dengan DK PBB. Hal ini mengingat sebaran misi pemeliharaan perdamaian yang perlu diperhatikan, misi mana saja yang dapat diikuti oleh Indonesia dan dengan komposisi berapa personel. Jejak rekam Indonesia sebagai negara dengan posisi sepuluh negara kontributor terbesar memberikan kesempatan untuk Indonesia untuk menyampaikan usulan dan keinginan untuk mengirimkan personel. PBB turut mengapresiasi hal ini mengingat Indonesia menjadi bagian dari pencapaian target 15% *female peacekeepers* dalam upaya *gender mainstreaming*.

Selanjutnya, partisipasi *female peacekeepers* Indonesia turut menjadi nilai tambah di dalam proposal Indonesia menuju anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Indonesia menyatakan komitmennya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam misi

¹³⁷ *Ibid.*

pemeliharaan perdamaian. Hingga pada 8 Juni 2018, Indonesia terpilih dengan dukungan 114 negara dari total 190 negara.¹³⁸ Ini merupakan wujud kepercayaan dunia terhadap Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam sambutan di PBB (2018), Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, turut menyampaikan kembali bahwa komitmen Indonesia juga terletak pada partisipasi perempuan selain fokus utama tentang kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik dengan cara damai.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB merupakan salah satu bentuk keberhasilan diplomasi. Komunikasi yang terjalin juga didukung oleh jejak rekam yang baik oleh Indonesia, termasuk partisipasi *female peacekeepers*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh PMPP TNI dalam wawancara peneliti dengan Wakil Komandan, bahwa:

Terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB adalah salah satu bentuk keberhasilan diplomasi. Dengan kita masuk disitu, kita punya hak suara dan minimal kita bisa mendengarkan. Ini yang bernilai dan belum tentu semua negara bisa mendapatkan kesempatan itu. Indonesia bisa *involve*, bersuara, minimal mendengarkan. Dalam hal *peacekeeping* misalnya, Indonesia bisa melakukan lobi-lobi tentang keinginan Indonesia agar pasukan Indonesia di Sudan bukan menjadi Kontingen.¹³⁹

Lebih lanjut, kepercayaan internasional kepada Indonesia juga ditunjukkan dengan wilayah dialog yaitu Sidang UNDPKO di Markas PBB, New York. Pada tahun 2017, PBB bahkan menampilkan *female peacekeepers* Indonesia di dalam panelis forum tersebut. Panelis yang hadir adalah Letkol Sus. Ratih dan AKBP Yuli. Di dalam forum tersebut terjalin komunikasi dua arah dimana panelis Indonesia memberikan gambaran umum tentang pengalaman partisipasi mereka di dalam misi

¹³⁸ Ardi Priyatno Utomo, "Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB untuk Kali Keempat", 9 Juni 2018, dalam <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/09/03170051/indonesia-terpilih-jadi-anggota-dewan-keamanan-pbb-untuk-kali-keempat>, diakses pada 15 November 2018.

¹³⁹ Wawancara peneliti dengan Wakil Komandan PMPP TNI, Kolonel Pnb. Aldrin Petrus Mongan, di Kantor PMPP TNI Sentul, Bogor, 3 Oktober 2018.

pemeliharaan perdamaian. Setiap negara kontributor bahkan mengapresiasi dan kagum kepada Indonesia dengan ketangguhan perempuan Indonesia. Kepercayaan PBB terhadap Indonesia ini kemudian berlanjut pada tahun 2018 ketika Indonesia kembali dipanggil untuk tampil di dalam pertemuan UNDPKO. Hal ini merupakan kesempatan bagi Indonesia dalam memperkenalkan profesionalisme baik tentara maupun polisi, serta membangun komunikasi yang menguntungkan bagi Indonesia seperti disampaikan oleh TKMPP dalam wawancara dengan peneliti bahwa:

Kontingen kita dikenal senang membantu baik laki-laki maupun perempuan, mudah menerima tugas misalnya patroli dari Komandan Sektor walaupun sebenarnya bukan untuk kita. Sebenarnya itu rugi, tapi dengan *outstanding performance* dari Kontingen Garuda, kita pernah menuntut kompensasi atau semacam *premium reward* dan PBB mengabulkan itu karena memang kinerja kita bagus. Disitulah salah satu dampak positifnya dengan partisipasi. Tapi, PKO itu kan hidupnya dari negara kontributor dan negara donor, jadi kalau kita banyak menuntut juga harus dipikir lagi. Sebisa mungkin kita kirim perempuan yang berkualitas.¹⁴⁰

Pada level strategis, upaya komunikasi dipersiapkan melalui keterlibatan Kementerian terkait dan PTRI di New York. PTRI di New York menjadi pen jembatan kepentingan antara Indonesia dan PBB. Lobi-lobi di markas PBB pun dilakukan oleh representasi dari PTRI baik terkait penempatan pasukan, penarikan pasukan atau bahkan pemindahan pasukan. PTRI menjalankan tugas mendukung diplomasi pertahanan juga agar Indonesia menjadi negara yang tetap dipilih untuk mengirimkan pasukan misi pemeliharaan perdamaian. Hal ini mengingat sistem *pledge* di PBB dalam artian Indonesia mengusulkan, PBB menilai dan memutuskan. Untuk itu diperlukan lobi yang baik dari Indonesia dengan mengunggulkan keistimewaan kita.

Keistimewaan Indonesia yang bisa menjadi daya tawar dalam membangun *confidence building measure* adalah komposisi gender di

¹⁴⁰ *Ibid.*

dalam pasukan. Indonesia secara konsisten meningkatkan partisipasi *female peacekeeper* secara bertahap. Terlebih, UNIFIL adalah misi dengan *female peacekeeper* Indonesia yang paling banyak. Lebih baik lagi jika Indonesia mampu memenuhi target untuk mencapai 15% atau bahkan mengirimkan *critical enablers* ke wilayah misi. Secara regional, keistimewaan Indonesia ini menurut Wadan PMPP TNI menghasilkan gagasan baru yang disepakati negara-negara ASEAN terhadap pembentukan *female peacekeeper*. Indonesia berupaya mengambil momen ini agar *female peacekeeper* Indonesia juga turut berkembang kapabilitasnya sebagaimana dikembangkan di misi yang pernah diikutinya. Untuk itu, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia selanjutnya dapat ditinjau dampaknya terhadap pengembangan kapasitas (*capacity building*) personel.

4.2.2.2 Capacity Building: Partisipasi Female Peacekeepers Indonesia dalam Pelatihan

Untuk menjadi seorang *female peacekeeper*, setiap personel diwajibkan mengikuti pelatihan. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyiapan profesionalisme TNI dalam melaksanakan tugas. Beberapa pelatihan yang dilakukan antara lain *pre-deployment training*, *induction training*, serta *joint exercise and training*. *Pre deployment training (PDT)* dilakukan selama satu bulan sebelum pasukan diberangkatkan seperti dijelaskan pada sub-bab penyiapan. Ini penting dalam mempersiapkan pasukan menjalankan tugas sesuai dengan standar PBB dan merefleksikan profesionalisme.

Materi yang diberikan dalam PDT bisa berbeda-beda setiap tahunnya menyesuaikan dengan misi dan kebutuhan terhadap pelaksanaan tugas. PMPP TNI menyebutkan *female peacekeeper* dapat mengembangkan kapasitasnya dari setiap materi yang diberikan secara teoritis maupun aplikatif. Secara teoritis, *female peacekeeper* Indonesia mendapat pengetahuan mengenai operasi pemeliharaan perdamaian dunia, peran Kontingen Garuda di dalam misi, gambaran umum tentang

misi UNIFIL secara spesifik, budaya setempat, kewaspadaan terhadap ranjau, *Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR)*, prosedur evakuasi kecelakaan, negosiasi dan mediasi, pengetahuan tentang gender, HIV/AIDS, hubungan sipil-militer, dan pengetahuan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan misi. Sedangkan secara aplikatif, *female peacekeeper* dapat mengembangkan kapasitasnya termasuk tentang patroli, *body checking*, kemampuan mengemudi transportasi standar PBB, menggunakan peralatan standar PBB seperti *digital sender, intranet, outlook, share point, Radio HF/VHF, Global Positioning System (GPS)* dan *Night Vision Googles (NVG)*.

Selanjutnya, *capacity building* juga dilakukan pada saat tiba di wilayah misi yaitu *induction training*. Pelatihan ini dilakukan untuk lebih memperjelas misi dengan berbagai topik termasuk mandat, *code of conduct*, topik mengenai eksploitasi dan kekerasan seksual, tanggung jawab individu, standar operasional prosedur, hal-hal administratif, hingga hak dan kewajiban personel pemelihara perdamaian.¹⁴¹ Adapun materi yang diberikan dalam *induction training* UNIFIL 2015-2016 selama tiga hari dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Materi *Induction Training* UNIFIL¹⁴²

| No. | Materi |
|-----|---|
| 1. | <i>Political Briefing</i> |
| 2. | <i>UNSCR 1701, UNIFIL Mandate and Tasks</i> |
| 3. | <i>Human Rights</i> |
| 4. | <i>Child Protection</i> |
| 5. | <i>UNIFIL & Environmental Protection</i> |
| 6. | <i>HIV/AIDS and Sexually Transmitted Disease</i> |
| 7. | <i>Management of Stray and Owned Dogs & Cats in UNIFIL</i> |
| 8. | <i>Land Mines/UXO Awareness</i> |
| 9. | <i>Conduct & Discipline/Directives for Disciplinary Matters</i> |

¹⁴¹ UNMissions, "Training", dalam <https://conduct.unmissions.org/prevention-training>, diakses pada 10 November 2018.

¹⁴² Erna Nuraeni, "Laporan Pelaksanaan Tugas JLOC OPSS01 UNIFIL HQ Naqoura-Lebanon", 2016, hlm. 29.

| No. | Materi |
|-----|---|
| 10. | <i>ROE (Role of Engagement)</i> |
| 11. | <i>Best Practices in Peacekeeping Operations</i> |
| 12. | <i>Security Briefing</i> |
| 13. | <i>Gender in Peacekeeping Operations</i> |
| 14. | <i>Cultural Awareness</i> |
| 15. | <i>UNIFIL Mission Support/Logistics</i> |
| 16. | <i>Aviation</i> |
| 17. | <i>MOVCON (Movement Convoy)</i> |
| 18. | <i>Supply Brief</i> |
| 19. | <i>Communication Infrastructure/IT Security</i> |
| 20. | <i>Health, Hygiene, Medevac, and Ninelines Message</i> |
| 21. | <i>Engineering Brief</i> |
| 22. | <i>Vehicle Maintenance/Serviceing</i> |
| 23. | <i>Military Police</i> |
| 24. | <i>UNIFIL Operational Briefing</i> |
| 25. | <i>UNIFIL Military Plan</i> |
| 26. | <i>Civil Affairs Briefing</i> |
| 27. | <i>Structure and Function of the UNTSO OGL</i> |
| 28. | <i>Structure and Function of the Liaison Branch</i> |
| 29. | <i>UNIFIL Outreach</i> |
| 30. | <i>Blue Line and Technical Fence</i> |
| 31. | <i>Patrol Monitoring and Reporting Tool (PMRT)</i> |
| 32. | <i>Military Information</i> |
| 33. | <i>Lebanese Army/Identification of Weapon/Equipment</i> |
| 34. | <i>UN Evaluation Report, Leave Regulation, Welfare & Recreation</i> |

Sumber: Laporan Purna Tugas Mayor Caj. (K) Erna Nuraeni, 2016

Menurut Mayor Caj. (K) Erna Nuraeni, materi-materi yang diberikan oleh *training* (J7) tersebut menambah pengetahuan personel baik secara individu maupun tim. Di dalam pelaksanaan tugas, materi yang telah disampaikan dapat diaktualisasikan secara langsung di lapangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Lebih lanjut, bukan hanya tentang kemampuan *hard skill* tetapi juga *soft skill* yaitu terkait kemampuan

berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik secara lisan, tulisan maupun pendengaran sesuai dengan format yang berlaku di lingkungan PBB. Bahkan, berdasarkan pengalaman Mayor Laut (S/W) Nani yang juga bertugas di UNIFIL, terdapat kelas bahasa yang bisa diikuti oleh para *peacekeeper* di sela-sela waktu istirahat seperti bahasa Spanyol, Arab, Perancis dan sebagainya sehingga mampu menambah kemampuan bahasa.

Kegiatan *induction training* juga dilakukan oleh *Force Commander Civil Military Coordination (FC CIMIC) Unit* di setiap tahunnya untuk pasukan yang baru bergabung ke dalam misi. Pada tahun 2017, kegiatan ini diikuti oleh tujuh Batalyon termasuk Italia, Ghana, Finlandia-Irlandia, Malaysia, Indonesia, Spanyol dan India. Pelatihan ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pelaksanaan tugas CIMIC di UNIFIL. Menurut Mayor Arh Choirul Huda, diperlukan pengembangan kapasitas melalui training untuk personel CIMIC yang profesional dan memahami pelaksanaan tugasnya sehingga mampu memenangkan hati dan pikiran masyarakat Lebanon. Pemberian materi ini bukan hanya dari internal UNIFIL melainkan juga *UN Agency* dan NGO seperti UNMAS, UNDP, UNHCR, WFP, AVSI dan Lebanese Red Cross. Adapun kegiatan *market walked* secara spesifik turut memberikan pengembangan kapasitas untuk para *female peacekeeper* mengingat UNIFIL mengagendakan hal ini untuk seluruh personel perempuan secara bergantian. Pengalaman seperti ini belum tentu didapatkan oleh semua personel. Dengan demikian, *female peacekeeper* yang bergabung ke dalam misi sudah merupakan satu upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme TNI yang baik.

Sebagai salah satu bentuk diplomasi pertahanan, peningkatan kapasitas melalui training di UNIFIL juga berkolaborasi dengan *Lebanese Armed Forces*. Kolaborasi ini semakin intensif sejak awal tahun 2008.¹⁴³

¹⁴³ UNIFIL, "Unifil Operations", 10 Juni 2016, dalam <https://unifil.unmissions.org/unifil-operations>, diakses pada 9 November 2018.

Personel dari negara kontributor juga melakukan latihan militer bersama, pelatihan dan pertukaran pengalaman melalui *joint lecture programme*. Latihan bersama ini dilakukan di Level Batalyon, Sektor, dan *Headquarter*. Selain itu, kedua pihak juga berpartisipasi dalam kegiatan seperti seminar dan konferensi dalam berbagai isu seperti manajemen konflik dan kewaspadaan antar budaya, *mass casualties* dan berbagai jenis rencana kontingensi lainnya seperti bencana alam. *Female peacekeeper* Indonesia dalam hal logistik misalnya turut berpartisipasi dalam *logistic conference* di Nepbat UNP 8-33 dan Indobatt UNP 7-1. Terlepas dari materi-materi yang didapatkan para *female peacekeeper* Indonesia, secara tidak langsung mereka turut belajar tentang komunikasi dan menjadi duta yang baik untuk Indonesia.

Adapun rangkuman hasil penelitian mengenai dampak partisipasi *female peacekeeper* Indonesia terhadap diplomasi pertahanan Indonesia dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Hasil Penelitian Dampak Partisipasi *Female Peacekeeper* Indonesia terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia

| No. | Variabel | Hasil/Temuan Penelitian |
|-----|------------------------------------|--|
| 1. | <i>Confidence Building Measure</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Indonesia menjadikan partisipasi <i>female peacekeeper</i> sebagai salah satu pendekatan <i>soft diplomacy</i> dalam diplomasi pertahanan pada ranah kerjasama multilateral; - Majelis Umum PBB digunakan Indonesia sebagai forum komunikasi untuk membangun CBM melalui partisipasi <i>female peacekeepers</i> Indonesia sebagai alat diplomasi; - <i>Female peacekeepers</i> Indonesia menjadi <i>role model</i> partisipasi perempuan dalam misi perdamaian pada diskusi panel DPKO - Berdasarkan proposal Indonesia ke dalam DK PBB, komitmen meningkatkan partisipasi <i>female peacekeeper</i> masuk dalam agenda penting sebagaimana Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB tahun 2019-2020 sebagai wujud kepercayaan dan keberpihakan global terhadap Indonesia. |

| No. | Variabel | Hasil/Temuan Penelitian |
|-----|--------------------------|--|
| 2. | <i>Capacity Building</i> | Partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia berdampak pada pengembangan kapasitas personel mengenai misi pemeliharaan perdamaian dan cara kerja standar PBB melalui pelatihan-pelatihan: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pre-Deployment Training (PDT)</i> dengan materi <i>Core Pre-Deployment Training Module (CPTM)</i> dari tentang sistem PBB, <i>peacekeeping</i>, budaya, gender, hak asasi manusia, HIV/AIDS, standar operasional, hingga tentang penggunaan peralatan standar PBB, - <i>Induction Training</i> dengan materi tambahan dari PDT seperti mandat, tentang UNIFIL dan lingkungan, pengelolaan binatang peliharaan di UNIFIL, kewaspadaan terhadap ranjau, <i>community outreach</i> hingga prosedur pelaporan, - Seminar dan Konferensi: melatih kemampuan personel dalam berkomunikasi dan memperoleh pengetahuan baru tentang posisi masing-masing, dan - Kelas Bahasa termasuk Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. |

Sumber: Olahan Peneliti

4.3 Pembahasan

4.3.1 Partisipasi *Female Peacekeeper* Indonesia dalam Misi UNIFIL Tahun 2015-2017

Partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL 2015-2017 tergambar dalam hal implementasi kegiatan, kebermanfaatan dan evaluasi. Dalam hal implementasi kegiatan, *female peacekeeper* Indonesia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan posisi masing-masing baik di dalam bagian *military staff* maupun satuan tugas di dalam Kontingen Garuda. Adapun dalam hal kebermanfaatan, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia memberi manfaat baik untuk misi UNIFIL, masyarakat lokal, maupun mereka sendiri sebagai personel perempuan. Sedangkan dalam hal evaluasi, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia turut memberikan poin-poin penting dalam laporan

pelaksanaan tugas baik dalam bentuk saran atau masukan kepada intitusi terkait sepulangnya mereka dari misi.

Hal ini sejalan dengan teori partisipasi yang disampaikan oleh Cohen dan Uphoff bahwa jenis partisipasi antara lain partisipasi dalam pembuatan keputusan, implementasi, kebermanfaatan dan evaluasi.¹⁴⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017 relevan dalam tiga jenis partisipasi tersebut yaitu implementasi, kebermanfaatan dan evaluasi. Penelitian ini menemukan bahwa dalam implementasi tugas, posisi yang dimiliki *female peacekeeper* Indonesia didominasi pada posisi pendukung (*supporting*) daripada posisi substansial seperti *military observer* dan *military staff*. Posisi pendukung ini yaitu sebagai satuan tugas di dalam Kontingen Garuda termasuk MPU, FPC, Yonmek, FHQSU, Level II Hospital dan MCOU. Adapun ketidakhadiran posisi *military observer* Indonesia dalam misi ini dikarenakan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Posisi penugasan ini sesuai dengan konsep *peacekeeping* PBB bahwa salah satu komponen pasukan pemelihara perdamaian adalah mereka yang berseragam dan ditempatkan dalam posisi *military staff*, *observer*, dan kontingen.

Lebih lanjut, dalam hal implementasi, *female peacekeeper* Indonesia menunjukkan *resource contributions* dengan partisipasinya sebagai tenaga kerja dan berkontribusi dalam menyebarkan informasi. Sebagai tenaga kerja, *female peacekeeper* Indonesia terikat dengan serangkaian standar prosedur PBB dan rutinitas administrasi dalam rangka melaporkan pelaksanaan tugas baik dalam periode harian, mingguan maupun bulanan. Standar prosedur ini penting dijadikan rujukan personel untuk menindaklanjuti suatu kondisi. Selanjutnya, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam hal implementasi juga terlihat dengan kontribusinya menyebarkan informasi. Hal ini sebagaimana didapat dalam hasil penelitian bahwa *female peacekeeper* Indonesia turut

¹⁴⁴ J. Cohen dan N. Uphoff, *op.cit.* hlm. 8.

melakukan kunjungan baik ke sekolah, pasar, maupun wilayah setempat dalam rangka memberikan informasi mengenai misi UNIFIL, pengenalan tentang *blue line* hingga informasi mengenai keselamatan berlalu lintas.

Jenis partisipasi selanjutnya yang relevan dengan partisipasi ini yaitu dalam hal kebermanfaatan. Berdasarkan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff, kebermanfaatan ini dapat dilihat antara lain secara material, sosial dan personal. Secara material, jelas bahwa *female peacekeeper* Indonesia mendapatkan manfaat dari pendapatan yang diberikan oleh PBB. Sedangkan manfaat sosial yaitu berkaitan dengan kontribusi *female peacekeeper* Indonesia terhadap masyarakat seperti membantu akses kesehatan, pendidikan, dan informasi. Masyarakat lokal turut merasa terbantu dengan kehadiran para personel ini karena misalnya terkait *blue line*, anak-anak senang bermain di dekat garis tersebut dan dikhawatirkan menjadi pelanggaran terhadap resolusi DK PBB 1701. Adapun secara personal, hasil penelitian melalui wawancara dengan *female peacekeeper* Indonesia, Mayor Caj. (K) Erna Nuraeni, menyebutkan bahwa manfaat yang ia dapat antara lain:

- a. Mendapat kesempatan untuk menjadi duta PBB dan duta negara Republik Indonesia untuk berkolaborasi dan bekerjasama dengan komponen militer dan sipil baik dari Indonesia, negara lain, maupun masyarakat lokal dengan prinsip saling menghormati dan kebersamaan;
- b. Melalui tugas-tugas yang dilaksanakan, *female peacekeepers* dapat mengimplementasikan kemampuan (*skill*) yang dimilikinya dan melatih manajemen pelaksanaan tugas menyesuaikan dengan budaya dan pola pikir yang berbeda dengan staf dari negara lain.
- c. Mendapat pengalaman terkait penggunaan peralatan standar PBB seperti *digital sender*, *intranet*, *outlook* dan *share point*;
- d. Menambah pengetahuan tentang mekanisme kerja dan prosedur sesuai dengan SOP yang berlaku; dan

e. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris baik *listening*, *speaking* dan *writing*. Bahkan, personel juga dapat menambah pengetahuan bahasa asing lainnya seperti Bahasa Arab yang digunakan di Lebanon.

Setelah mendapat manfaat, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia turut terlihat dalam partisipasi evaluasi. Para personel turut menyampaikan hambatan dan memberikan masukan kepada institusi terkait misi pemeliharaan perdamaian yang dijalaninya. Secara garis besar, hasil penelitian menunjukkan tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan tugas. Hanya saja, untuk memulai tugas, *female peacekeeper* Indonesia memerlukan proses serah terima dan pengenalan tugas yang lebih tertata lagi mengingat hambatan rotasi jabatan yang mengakibatkan keterlambatan penempatan posisi. Dengan memperhatikan lingkungan strategis misi UNIFIL juga, personel akhirnya memperoleh masukan seperti penambahan materi PDT tentang *environmental management*, memperkuat pemahaman terhadap MoU dan mandat PBB, menambah kontribusi Wan TNI, dan berkontribusi terhadap pemeliharaan *Indo House* di Markas Besar UNIFIL. Untuk itu, partisipasi dalam hal evaluasi menjadi relevan dalam penelitian ini.

Lebih jauh, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia juga dapat ditinjau dari tangga partisipasi yang disebutkan oleh Arnstein (Lihat Gambar 2.1). Tangga partisipasi ini terdiri dari delapan jenis dimulai dari partisipasi manipulasi, terapi, pemberian informasi, konsultasi, *placation*, kemitraan (*partnership*), *delegated power*, dan *citizen control*.¹⁴⁵ Partisipasi manipulasi yaitu dimana kehadiran seseorang atau representasi suatu pihak tidak memiliki legitimasi personal dan kehadirannya hanya untuk memanipulasi fungsi sesuai yang diinginkan pemilik kekuasaan. Sedangkan partisipasi terapi berarti memberikan pemulihan. Begitupun dengan tangga informasi berarti memberikan informasi seperti program kegiatan; konsultasi ditandai dengan adanya diskusi bersama elemen publik; *placation* berarti penentraman; *partnership*

¹⁴⁵ Norad, *op.cit.* hlm. 11.

yaitu kemitraan; *delegated power* berarti partisipasi yang dilakukan berdasarkan pendelegasian kekuasaan, dan; *citizen control* yang berarti publik telah mendominasi partisipasi.

Berdasarkan tangga partisipasi tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017 melakukan lima tangga partisipasi yaitu terapi, pemberian informasi, konsultasi, kemitraan, dan *delegated power*. Dalam partisipasi terapi, *female peacekeeper* Indonesia dalam misi ini melakukan upaya pemulihan secara medis melalui pelayanan kesehatan dan interaksi dengan masyarakat lokal di kamp pengungsi. Adapun partisipasi dalam pemberian informasi sebagaimana dibahas relevansinya dengan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff bahwa *female peacekeeper* Indonesia berkontribusi dalam penyebaran informasi mengenai misi, *blue line*, keselamatan berlalulintas dan sebagainya. Lebih lanjut, partisipasi konsultasi tercermin dalam kegiatan rutin *female peacekeeper* Indonesia yang melakukan diskusi baik dengan *stakeholder* di dalam misi seperti komandan maupun masyarakat lokal dalam kegiatan *community outreach*. Pelaksanaan program kegiatan yang diikuti *female peacekeeper* Indonesia ini dilakukan dalam kerangka kemitraan bersama sekolah, komunitas setempat, dan *stakeholder* terkait. Akhirnya, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia juga relevan dengan tangga *delegated power* bahwa mereka berpartisipasi secara *mandatory* berdasarkan mandat PBB No. 1701 dan penugasan negara yang diperintahkan secara resmi oleh Panglima TNI. Dengan demikian, *female peacekeeper* Indonesia adalah delegasi militer yang merepresentasikan kehadiran Indonesia di dalam misi UNIFIL.

Membahas lebih lanjut, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia mendukung pengarusutamaan gender dalam misi pemeliharaan perdamaian. Hal ini mengacu pada langkah PBB yang mengadopsi Resolusi No. 1325 Tahun 2000 mengenai *Women, Peace, and Security*. Sebagai negara anggota

PBB, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam implementasi resolusi tersebut dan ini ditunjukkan dengan partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL yang semakin meningkat dari tahun 2015-2017. Hal ini sesuai dengan konsep feminis internasionalisme bahwa negara mengadopsi strategi *top-down* dalam menyelesaikan masalah. Masalah dalam hal ini yaitu keterbatasan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian. Dalam konsepnya, untuk memperbaiki posisi perempuan diperlukan elaborasi prinsip-prinsip dan standar transnasional. Untuk itu, Indonesia mengambil Resolusi No. 1325 sebagai landasan terhadap urgensi pengiriman *female peacekeeper* dimana secara kuantitas Indonesia menyumbang 6-10% *female peacekeeper* di dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017.

Bagaimanapun, upaya ini bukan berjalan tanpa hambatan. Dalam konsep pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*), upaya kesetaraan gender dalam misi pemeliharaan perdamaian juga memiliki hambatan dan tantangan. Untuk itu perlu diberikan prioritas untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. PBB sendiri juga memahami bahwa setiap negara memiliki keunikan hambatan masing-masing sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Adapun Indonesia, berdasarkan hasil penelitian ini, memiliki hambatan dalam perekrutan *female peacekeeper* sebagai berikut:

a. Kapasitas individu

Menurut PMPP TNI, kemampuan bahasa merupakan tantangan terbesar bagi seluruh *peacekeepers* yang di negaranya tidak menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa ibu.¹⁴⁶ Menurut peneliti persoalan bahasa bukan merupakan alasan utama keterbatasan partisipasi *female peacekeepers* Indonesia dalam hal perekrutan. Kemampuan bahasa pada umumnya juga dialami oleh personel laki-laki. Jika bahasa dijustifikasi menjadi alasan utama, hal ini justru

¹⁴⁶ Narasi jawaban PMPP TNI yang diberikan kepada peneliti pada wawancara di Kantor PMPP TNI Sentul, Bogor, 3 Oktober 2018.

menimbulkan pertanyaan terkait akses pendidikan bagi para personel perempuan. Persoalan bahasa pada umumnya tidak lagi menjadi persoalan utama dalam perekrutan Wan-TNI ke dalam *peacekeeping operations*. Identifikasi selanjutnya justru terkait dengan keterbatasan jumlah Wan-TNI.

b. Keterbatasan Jumlah Wan-TNI

Menurut Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Indonesia, personel militer perempuan di Indonesia hanya terdapat 3-4% dari total personel TNI di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴⁷ Ini turut diafirmasi oleh Letkol Ikwon Achmadi selaku Kasi Misi Damai, Kerjasama Multilateral, Direktorat Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan bahwa "*personel perempuan di seluruh angkatan bersenjata manapun kurang dari 4%*".¹⁴⁸ Hal ini menyebabkan kesulitan tersendiri untuk merekrut *female peacekeepers* sebagai salah satu proses penyiapan. Namun, dalam pandangan Wendi Budi Raharjo, data yang didapat dari TNI tercatat 769 personel perempuan berpangkat Kapten dan 998 berpangkat Mayor. Jumlah ini baginya cukup untuk mencapai target pemenuhan 15% *military observer* dan *military staff* dari 70 milobs dan milstaff yang ada saat ini.¹⁴⁹ Namun, konsep pemenuhan target tersebut tidak semudah yang diperhitungkan dimana keterbatasan jumlah Wan-TNI ini memiliki kaitan secara institusi tentang tanggung jawab Wan-TNI terhadap pekerjaan yang sedang dijalaninya. Hal ini teridentifikasi menjadi *institutional constraint* terhadap Wan-TNI mengingat kehadiran perempuan dalam militer pun mengalami keterbatasan

¹⁴⁷ dalam tulisan Agnes Anya, "Low Numbers Hamper Indonesia's Pledge to Send More Women Peacekeeper", The Jakarta Post, 26 Juni 2018, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2018/06/25/low-numbers-hamper-indonesias-pledge-to-send-more-women-peacekeepers.html>, diakses pada 12 November 2018.

¹⁴⁸ Wawancara peneliti dengan Kasi Misi Damai, Ditstrahan Kemhan, Letkol Ikwon Achmadi di Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, 9 Oktober 2018.

¹⁴⁹ Wawancara peneliti dengan Ketua Pelaksana Harian TKMPP, di Kantor Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri, 4 September 2018.

sehingga menjadi salah satu penyebab sedikitnya jumlah Wan-TNI. Keterbatasan tersebut termasuk baru dibolehkannya perempuan masuk Akademi Militer (Akmil) pada tahun 2013 dimana sebelumnya hanya diterima melalui Sekolah Calon Bintara (Secaba) dan Sekolah Calon Perwira (Secapa).¹⁵⁰ Dalam konsep pengarusutamaan gender yang dimaknai oleh ECOSOC, hal ini menjadi pendorong bahwa perlu diterapkan kebijakan yang mengakomodir baik perempuan dan laki-laki mengingat adanya kebutuhan yang berbeda antara keduanya, termasuk dalam wilayah militer.

c. Persoalan izin atasan dan atau suami

Persoalan ini hadir berkaitan dengan poin sebelumnya bahwa setiap personel yang ingin mengikuti seleksi *peacekeeper* perlu mendapat izin dari atasan masing-masing. Keterbatasan jumlah Wan-TNI menjadi pertimbangan bahwa akan terjadi kekosongan jabatan atau harus mencari pengganti dengan kapasitas yang sesuai. Lebih lanjut, jika atasan memberi dukungan izin, Wan-TNI juga akan berhadapan pada persoalan izin suami bagi mereka yang sudah berkeluarga sebagai salah satu syarat berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1000/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015. Di Indonesia, perempuan sangat berperan dalam urusan domestik keluarga seperti mengurus anak dan rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa Wan-TNI kerap terhambat oleh persoalan ini. Hal ini diakui oleh Letkol Sus. Ratih, AKBP Yuli, Mayor Caj. (K) Erna, dan Mayor Ckm. (K) Sarah bahwa teman-teman Wan-TNI menghadapi hambatan ini. Berbeda dengan mereka seperti Letkol Sus. Ratih dan Mayor Caj. Erna yang belum berkeluarga, dan AKBP Yuli serta Mayor Ckm. Sarah yang memiliki keluarga *supportive* dalam tujuan mereka.¹⁵¹

¹⁵⁰ detikNews, "Pertama Kali, Akmil TNI AD Rekrut Perempuan", 21 Maret 2013, dalam <https://news.detik.com/berita/2199892/pertama-kali-akmil-tni-ad-rekrut-perempuan>, diakses pada 5 Desember 2018.

¹⁵¹ Wawancara peneliti dengan *Female Peacekeeper* Indonesia, Letkol Sus. Ratih Pusparini, di Cijantung, 6 September 2018.

Dalam hal ini, budaya ketimuran adalah nilai yang dijunjung keluarga sehingga menjadi pertimbangan bagi setiap personel.

d. Budaya ketimuran sebagai nilai perempuan Indonesia

Bekerja sebagai seorang tentara masih dilabeli sebagai wilayah pekerjaan laki-laki dan bersifat maskulin. Suatu kebanggaan bagi perempuan bahwa mereka menjadikan keluarga sebagai prioritas utama, menjaga anak-anak, dan menyiapkan keperluan domestik keluarga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bahwa personel perempuan enggan untuk meninggalkan keluarga untuk sebuah misi pemeliharaan perdamaian baik dengan masa tugas satu tahun maupun enam bulan seperti yang sudah disediakan oleh PBB. Menurut Nussbaum, perempuan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang bernilai. Bukan hanya tentang memberdayakan dirinya sendiri tetapi juga orang lain dan lingkungannya. Hambatan bagi perempuan bukan hanya tentang sumber daya yang tidak memadai tetapi ada pembatasan tersendiri berdasarkan budaya. Ini sejalan dengan fenomena yang terjadi terkait keterbatasan partisipasi Wan-TNI ke dalam misi pemeliharaan perdamaian bahwa ada nilai-nilai budaya yang dipercaya perlu untuk diikuti.

e. Potensi Kehilangan Jabatan

Di Indonesia, menjadi seorang *peacekeeper* berarti meninggalkan pekerjaan sebelumnya atau kehilangan jabatan. Seorang personel perlu menunggu selama enam bulan atau lebih sampai ia dipromosikan ke dalam posisi struktural minimal setara dengan jabatan sebelumnya.¹⁵² Konsekuensi ini bukan merupakan suatu masalah bagi mereka yang memang antusias dan memiliki minat yang besar untuk menjadi seorang *peacekeeper*, namun tidak untuk pertimbangan menghambat pencapaian karir. Hal ini dapat terlihat

¹⁵² Wawancara peneliti dengan Ketua Pelaksana Harian TKMPP, di Kantor Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri, 4 September 2018.

dalam data pada sub-bab hasil penelitian bahwa 88% *female peacekeepers* Indonesia di UNIFIL tahun 2015-2017 adalah mereka yang berpangkat sersan termasuk sersan mayor (3 personel), sersan kepala (18 personel), sersan satu (30 personel), dan sersan dua (37 personel). Hal ini memperhatikan syarat kepangkatan atau masa dinas serta posisi yang dibutuhkan.

- f. Tidak ada kebijakan yang memaksa terkait keterlibatan Wan-TNI Target 15% yang disampaikan oleh PBB melalui UNDPKO merupakan persentase yang diharapkan tercapai terhadap jumlah partisipasi *female peacekeeper* di dunia khususnya untuk posisi *military staff* dan *observer*. Dalam menerjemahkan target ini, Indonesia sendiri tidak menetapkan kebijakan angka khusus untuk pelibatan *female peacekeeper* di setiap misi atau per tahunnya. Menurut Wakil Komandan PMPP, hal ini karena Indonesia menyesuaikan dengan setiap mandat PBB dan menyadari keterbatasan serta tantangan yang dihadapi secara domestik. Menurutnya, PBB juga menyadari kesulitan setiap negara kontributor sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Bagaimanapun, Indonesia terus berupaya dan misi UNIFIL adalah salah satu misi dengan partisipasi *female peacekeepers* terbesar untuk Indonesia. Absennya kebijakan ini membuat kandidat *female peacekeeper* mengandalkan penugasan atau secara sukarela mengajukan kepada atasan untuk mengikuti seleksi, tidak seperti pertama kali partisipasi *female peacekeeper* yaitu Letkol Sus. Ratih yang masih bisa menggunakan kebijakan yang bersifat imperatif.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hal penyiapan *female peacekeeper* Indonesia, dapat disoroti bahwa upaya institusi belum maksimal dalam meningkatkan partisipasi *female peacekeeper* Indonesia. Secara institusi, penyiapan sejak sosialisasi hanya dilakukan kepada *main body*, diseminasi informasi juga belum sepenuhnya menjangkau Wan-TNI yang berada di pelosok, serta institusi masih membatasi partisipasi Wan-TNI untuk mengikuti seleksi mengingat kekhawatiran terhadap

kekosongan struktur organisasi. Program pendidikan bahasa Inggris pun berbeda-beda dalam setiap matra sehingga kemampuan bahasa setiap personel juga belum benar-benar difokuskan. Persoalan ini sejalan dengan apa yang disoroti dalam konsep pengarusutamaan gender bahwa perlu dilakukan pengorganisasian dalam kebijakan atau kegiatan, termasuk misi pemeliharaan perdamaian. Memberdayakan perempuan dalam setiap proses kegiatan adalah kebutuhan, bukan untuk membangun pemisahan antara laki-laki dan perempuan, tetapi untuk mewujudkan program dan perdamaian yang inklusif.

Terlebih, dalam perspektif feminisme, partisipasi perempuan dalam ranah militer merupakan hal esensial. Secara empiris bahwa keterwakilan perempuan dalam militer tidak lebih dari 4% menandakan misrepresentasi perempuan dalam institusi. Hal ini memiliki konsekuensi logis terhadap proses pengambilan kebijakan hingga pelaksanaan yang cenderung bersifat *male-dominated* sehingga perhatian terhadap kelompok perempuan dan anak-anak di dalam konflik misalnya masih kurang terjangkau. Kurangnya representasi perempuan dalam ranah militer ini juga setidaknya menyebabkan individu di dalam institusi militer tidak terbiasa memiliki personel perempuan dengan keunikannya. Padahal, kontribusi perempuan dalam militer dan wilayah konflik sangat dibutuhkan kaitannya dengan penanganan korban berbasis gender, perempuan mantan kombatan, pendekatan terhadap masyarakat lokal, dan membuka akses bagi perempuan maupun anak-anak. Seperti yang disebutkan dalam tulisan Heywood bahwa perempuan dapat membentuk politik dunia termasuk dalam konsep keamanan dan perdamaian.¹⁵³

Selanjutnya, dalam proses penyiapan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya pelatihan terhadap setiap personel terpilih. Untuk mendukung misi yang ramah gender, materi *Pre-Deployment Training (PDT)* setidaknya sudah memasukkan materi *gender equality in peacekeeping* dan *sexual exploitation and abuse*. Lebih dari itu, materi

¹⁵³ Andrew Heywood, *loc.cit.*

selama *induction training* juga turut membahas baik perlindungan anak, HIV/AIDS, gender, kewaspadaan budaya, hubungan sipil-militer, dan sebagainya. Hal ini mendukung perspektif gender dimana materi yang diberikan penting untuk menyesuaikan kebutuhan dari setiap individu. Komunikasi dengan perempuan dan anak-anak memerlukan pendekatan tertentu untuk memperoleh informasi. Sehingga pelatihan dengan materi gender menjadi penting untuk diberikan kepada *female peacekeeper* Indonesia. PMPP TNI telah menunjukkan perkembangan terkait pengarusutamaan gender dalam misi pemeliharaan perdamaian bahwa pelatih PDT sudah mulai melibatkan perempuan sejak tahun 2015 dimana sebelumnya materi PDT diberikan oleh pelatih laki-laki.

Akhirnya, pembahasan mengenai partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi *United Nations Interim Forces in Lebanon* tahun 2015-2017 dapat dilihat ringkasannya dalam tabel diskusi teori di bawah ini:

Tabel 4.8 Diskusi Teori dan Temuan Penelitian Partisipasi *Female Peacekeeper* Indonesia dalam Misi UNIFIL tahun 2015-2017

| No. | Teori | Temuan Penelitian |
|-----|--|---|
| 1. | Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff terdiri dari empat jenis utama: 1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan, 2) Partisipasi dalam implementasi, 3) Partisipasi dalam hal kebermanfaatan, dan 4) Partisipasi dalam hal evaluasi | <i>Female peacekeeper</i> Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017 menjalankan tiga jenis partisipasi: 1) Partisipasi dalam implementasi: <i>female peacekeeper</i> Indonesia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam posisi <i>military staff</i> dan satgas Kontingen, serta implementasi program kegiatan termasuk CIMIC, logistik, medis dan <i>community outreach</i> . 2) Partisipasi dalam hal kebermanfaatan: manfaat secara materi melalui pendapatan, sosial melalui penyebaran informasi/kegiatan sipil-militer, dan personal melalui diperolehnya kesempatan, pengetahuan dan kemampuan. |

| No. | Teori | Temuan Penelitian |
|-----|--|---|
| | | 3) Partisipasi dalam hal evaluasi: <i>female peacekeeper</i> memberikan evaluasi hambatan dalam misi termasuk keterlambatan rotasi tugas dan memberi masukan terkait perlunya peningkatan <i>female peacekeeper</i> , materi PDT mengenai <i>environmental management</i> , serta kontribusi Indonesia terhadap <i>Indo House</i> di Markas Besar PBB. |
| 2. | 8 Tangga Partisipasi menurut Arnstein: 1) Manipulasi 2) Terapi 3) Pemberian informasi 4) Konsultasi 5) <i>Placation</i> 6) Kemitraan 7) <i>Delegated power</i> 8) <i>Citizen control</i> | <i>Female peacekeeper</i> Indonesia berpartisipasi dalam lima tangga partisipasi: 1) Terapi: memberikan pemulihan secara medis dalam pelayanan kesehatan dan interaksi dengan masyarakat lokal di kamp pengungsi, 2) Pemberian informasi: diseminasi informasi mengenai misi UNIFIL, <i>blue line</i> , keselamatan berlalulintas, dan program terkait sipil-militer, 3) Konsultasi: diskusi dengan <i>stakeholder</i> UNIFIL termasuk komandan, diskusi dengan masyarakat melalui kegiatan sipil-militer, 4) Kemitraan: kerjasama dengan sekolah, komunitas setempat/ <i>stakeholder</i> terkait, dan 5) <i>Delegated power</i> : partisipasi secara <i>mandatory</i> berdasarkan mandat PBB No. 1701 dan perintah negara melalui Panglima TNI. |
| 3. | Feminis Internasionalisme: Strategi <i>top-down</i> | Partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia mengadopsi strategi <i>top-down</i> dimulai dari adanya resolusi DK PBB No. 1325 tahun 2000 tentang <i>Women, Peace and Security</i> dan strategi gender UNDPKO yang menetapkan target 15% untuk komponen militer (<i>military staff</i> dan <i>observer</i>). Ini diterjemahkan dengan upaya TKMPP untuk meningkatkan partisipasi <i>female peacekeeper</i> |

| No. | Teori | Temuan Penelitian |
|-----|-------|---|
| | | ditunjukkan dengan kuantitas yang semakin meningkat dari tahun 2015-2017. |

Sumber: Olahan Peneliti

4.3.2 Dampak Partisipasi *Female Peacekeepers* Indonesia terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia

Pembahasan mengenai dampak partisipasi *female peacekeepers* Indonesia terhadap diplomasi pertahanan Indonesia ditinjau peneliti menggunakan variabel *confidence building measures (CBM)* dan *capacity building* yang diambil dari konsep diplomasi pertahanan. CBM ini sendiri lebih lanjut ditinjau melalui indikator komunikasi dalam tipologi CBM menurut Baviera (2001). Sedangkan *capacity building* ditinjau melalui indikator pelatihan.

Baviera menjelaskan bahwa penggunaan CBM saat ini lebih luas lagi tidak hanya bersifat tradisional tentang mengubah *potential adversary* dari suatu aksi militer atau serangan mendadak, tetapi juga mempromosikan komunikasi yang baik di setiap pihak khususnya dalam sektor militer. Lebih lanjut, Baviera memberikan empat wilayah CBM sebagai indikator dalam ranah multilateral yaitu komunikasi, transparansi, konsultasi, *good will*, dan *constraints*.¹⁵⁴ Komunikasi misalnya dengan adanya dialog; transparansi dengan adanya publikasi terkait pertahanan; konsultasi seperti adanya aktivitas *joint commission*; *good will* melalui penerbitan *code of conduct*, dan; *constraint* seperti adanya kesepakatan *disarmament/demilitarization*. Berdasarkan 4 area tersebut, peneliti mengambil indikator komunikasi dalam menganalisis dampak terhadap diplomasi pertahanan Indonesia.

Dalam hal komunikasi, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia memberikan *bargaining position* dan *leverage* dalam pelaksanaan diplomasi. Seperti disampaikan oleh TKMPP dan PMPP TNI bahwa pengiriman personel misi pemeliharaan perdamaian tidak akan istimewa

¹⁵⁴ Aileen S.P. Baviera, *loc.cit.*

untuk PBB jika yang dikerahkan hanya personel laki-laki. PBB turut mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam hal partisipasi *female peacekeeper* ini sehingga salah satu permintaan Indonesia terkait semacam *premium rewards* terhadap pelaksanaan tugas dikabulkan oleh PBB. Ini sesuai dengan karakteristik dalam konsep diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Forster bahwa diplomasi pertahanan merupakan cara untuk mengejar tujuan keamanan dan luar negeri yang lebih luas melalui dukungan dari negara lain.¹⁵⁵

Berkaitan dengan konsep tersebut, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia juga berkontribusi terhadap pencapaian Indonesia memperoleh status anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020. Hal ini dilakukan dalam rangkaian kampanye Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB sejak tahun 2016. *Female peacekeeper* Indonesia bahkan menjadi narasumber yang turut merepresentasikan komitmen Indonesia terhadap perspektif gender dalam misi pemeliharaan perdamaian. Kampanye yang melibatkan *female peacekeeper* Indonesia ini salah satunya dilakukan dalam sidang, diskusi panel *Special Committee for Peacekeeping Operations (C-34)* di Markas Besar PBB, New York. Hal ini sesuai dengan indikator komunikasi dalam konsep CBM, bahwa terjadi diskusi seperti di dalam forum komunikasi tersebut. Ini berdampak pada konstruksi CBM Indonesia.

Diskusi panel C-34 ini berlangsung pada 22 Februari 2017.¹⁵⁶ Dalam panel tersebut, Indonesia direpresentasikan oleh Letkol Sus. Ratih Pusparini dan AKBP Yuli Cahyanti turut mengkampanyekan partisipasi *female peacekeepers* Indonesia sebagai rekam jejak positif. Pada pertemuan tersebut, diakui oleh Letkol Sus. Ratih dan AKBP Yuli bahwa respon peserta dari negara lain begitu menghormati Indonesia, bahkan menyampaikan kebanggaannya terhadap *female peacekeepers*

¹⁵⁵ Andrew Cottey dan Anthony Forster, *op.cit.* hlm. 17.

¹⁵⁶ Tama Salim, *loc.cit.*

Indonesia.¹⁵⁷ Melalui cerita pengalaman kedua *female peacekeepers* Indonesia ini, para peserta ikut tersentuh dengan niat baik yang menjadi pendorong mereka ikut dalam misi perdamaian. Sebagai salah satu rangkaian kampanye Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB, hal ini mempromosikan komitmen Indonesia dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan di dalam misi pemeliharaan dunia. Ini sesuai dengan salah satu indikator CBM UNODA yaitu adanya komunikasi. Diskusi panel ini menunjukkan adanya proses komunikasi antara *female peacekeeper* yang merepresentasikan Indonesia dengan delegasi lainnya. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia, termasuk upaya untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Menurut UNODA, dalam membangun *confidence building measures*, komunikasi adalah salah satu hal yang dapat dilakukan negara baik melalui dialog, penunjukkan kontak militer, dan pertukaran informasi. Dalam hal informasi, Indonesia turut mengkomunikasikan informasi dan agenda utamanya di dalam DK PBB melalui proposal Indonesia untuk DK PBB. Indonesia menarasikan posisi Indonesia di dalam Dewan Keamanan PBB bahwa *“Indonesia consistently puts emphasis on the promotion and protection of human rights as well as the protection of civilians in armed conflicts, including women and children. Therefore, Indonesia will continue to pursue the development of capacity building for mediation and post-conflict peacebuilding.”*¹⁵⁸ Disini, Indonesia akan melanjutkan perannya sebagai suara moderat dan penjemabatan antar negara anggota DK PBB dan di dalam sistem PBB yang lebih luas. Lebih lanjut, Indonesia juga menekankan pada posisinya yang telah 60 tahun aktif berkontribusi kepada *peacekeeping* PBB dengan turut mengikutsertakan partisipasi perempuan berdasarkan perspektif gender. Pengerahan *female*

¹⁵⁷ Wawancara Peneliti dengan *Female Police* Indonesia, AKBP Yuli Cahyanti, di Cinere, 14 September 2018.

¹⁵⁸ Kemlu-RI, “Indonesia: Candidate for the United Nations Security Council 2019-2020”, Jakarta, hlm. 8.

peacekeepers Indonesia ini diarahkan untuk mampu mengimplementasikan kemampuan *community building* termasuk di Lebanon Selatan.

Pada 8 Juni 2018, Indonesia secara resmi terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode tahun 2019-2020. Komitmen Indonesia dalam keanggotaan tidak tetap DK PBB ini adalah dengan memegang teguh prinsip dan tujuan piagam PBB serta hadir sebagai *bridge-builder*. Prioritas Indonesia antara lain:¹⁵⁹

- (1) Memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global melalui:
 - a. Mempromosikan penyelesaian masalah dengan cara damai termasuk dengan memperkuat peran dan kemitraan regional
 - b. Memperkuat *UN Peacekeeping* dan *Peacebuilding* termasuk peran perempuan
- (2) Membangun sinergi antara perdamaian yang berkesinambungan dan agenda pembangunan melalui:
 - a. Memastikan perdamaian, keamanan dan stabilitas untuk mengimplementasikan Agenda Pembangunan 2030, termasuk Afrika
 - b. Memperkuat kerjasama global dalam menyelesaikan implikasi keamanan dari tantangan ekonomi, kesehatan dan lingkungan
- (3) Memerangi terorisme, radikalisme dan ekstrimisme kekerasan melalui:
 - a. Membentuk pendekatan komprehensif global dalam memerangi terorisme, radikalisme dan ekstrimisme
 - b. Menyelesaikan penyebab terorisme, radikalisme dan ekstrimisme.

Dari daftar prioritas tersebut, poin (1) b menjadi relevan dalam penelitian ini. Majelis Umum PBB menjadi forum komunikasi yang digunakan oleh Indonesia dalam membangun *Confidence Building Measures* dan diperkuat dengan partisipasi *female peacekeepers* sebagai alat diplomasi pertahanan dalam meraih keberpihakan global agar Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

¹⁵⁹ *Ibid.*

Keberpihakan ini pada akhirnya terbukti dengan 144 suara yang mendukung Indonesia dari 190 negara anggota Majelis Umum PBB.¹⁶⁰ Adapun negara lain yang terpilih yaitu Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika. Terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB bukan semata-mata sebuah kebanggaan tetapi juga kewajiban untuk berkontribusi menjaga perdamaian dan keamanan. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, dalam pidatonya pasca Indonesia berhasil terpilih dalam Majelis Umum PBB.¹⁶¹

Komunikasi merupakan hal penting yang diidentifikasi Baviera dalam *confidence building measures*. Dalam konsep misi pemeliharaan dunia PBB, sistem *mandatory* berjalan dari adanya mandat DK PBB, dikomunikasikan dengan Perwakilan Tetap RI (PTRI) di New York, berlanjut kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia, dikomunikasikan juga kepada Kementerian Pertahanan, sehingga berlanjut pada Mabes TNI dan secara operasional diterima oleh PMPP TNI. Dalam perkembangannya, PBB juga menggunakan sistem *pledge* dalam misi pemeliharaan perdamaian. Dalam sistem ini, Indonesia merumuskan rencana pengerahannya yang dibahas dalam TKMPP sebagai tim khusus yang membahas cara untuk meningkatkan partisipasi dan mengantisipasi lingkungan strategis misi pemeliharaan perdamaian dunia. Setelah disepakati, usulan Indonesia disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri kepada PTRI dan berlanjut ke PBB. Untuk itu, komunikasi Indonesia dalam rangkaian diplomasi baik dalam UNDPKO dan Majelis Umum PBB adalah hal esensial untuk menyukseskan usulan Indonesia.

Lebih lanjut, dalam membangun CBM, *United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA)* juga menyebutkan komunikasi sebagai ukuran CBM.¹⁶² Ini sejalan dengan contoh yang dijelaskan Baviera bahwa

¹⁶⁰ Ardi Priyatno Utomo, *loc.cit.*

¹⁶¹ United Nations, "Retno Lestari Priansari Marsudi (Indonesia) – General Assembly Media Stakeout 8 June 2018", dipublikasikan dalam laman resmi YouTube United Nations, diakses pada 15 November 2018.

¹⁶² UNODA, *loc.cit.*

komunikasi ini antara lain melalui adanya sistem komunikasi atau dialog antara kepala negara, menteri pertahanan, komandan militer atau representasi lainnya. Hal ini terlihat dengan pertemuan-pertemuan negara anggota dalam sidang Majelis Umum PBB, UNDPKO, dan pertemuan lainnya di Markas Besar PBB dalam membicarakan status dan perkembangan misi perdamaian di dunia. Dalam konsep CBM UNODA, beberapa indikator komunikasi yang relevan antara lain: a) membentuk sistem komunikasi langsung antara kepala negara, kementerian pertahanan, panglima militer dan atau komandan, b) menunjuk representasi militer/pertahanan untuk melakukan komunikasi, c) memberi notifikasi terhadap latihan militer, perpindahan pasukan dan kegiatannya, dan d) melakukan rapat rutin untuk pertukaran informasi. Adapun dalam kerangka kerjasama, pengerahan personel perempuan juga disebutkan UNODA sebagai langkah membangun CBM.

Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini menemukan relevansinya dimana dilakukan penunjukkan komandan untuk Kontingen Garuda serta *female peacekeeper* Indonesia baik di dalam markas besar UNIFIL maupun kontingen untuk mendukung pelaksanaan tugas dan membuka akses informasi di dalam misi UNIFIL. Kehadiran personel militer ini upayanya dapat membuka komunikasi langsung dengan *stakeholder* misi terkait notifikasi perpindahan prajurit, pelaksanaan pelatihan, rotasi pasukan dan kegiatan-kegiatan di misi lainnya. Hal ini didapat melalui pertemuan atau rapat rutin yang melibatkan negara kontributor, termasuk Indonesia.

Pengerahan *female peacekeepers* Indonesia ke wilayah misi pemeliharaan perdamaian dunia sudah merupakan realisasi dari penggunaan komponen militer dalam masa damai pada ranah kerjasama multilateral atau *peacekeeping operations* di bawah naungan PBB. Mengingat peneliti meninjau lebih dekat pada Wan-TNI yang terlibat dalam misi UNIFIL 2015-2017, aktor utama yang teridentifikasi dalam diplomasi pertahanan ini adalah Kementerian Pertahanan. Bukan hanya itu,

Kementerian Pertahanan Indonesia turut berkolaborasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah lainnya dalam mengurus misi pemeliharaan perdamaian ini, termasuk tentang partisipasi *female peacekeepers*. Salah satu kementerian lainnya adalah Kementerian Luar Negeri yang menjadi aktor dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, tidak terkecuali dalam hal keamanan internasional dan kerjasama multilateral.

Hal ini sejalan dengan konsep diplomasi pertahanan yang disebutkan Cottey dan Forster (2004) bahwa diplomasi pertahanan merupakan penggunaan pasukan bersenjata dan infrastruktur terkait dalam masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan.¹⁶³ Pemahaman ini telah menjadi sorotan keamanan internasional pasca perang dingin termasuk untuk Indonesia. Adapun pelaksanaannya tidak terlepas dari upaya mencapai kepentingan nasional seperti pandangan Singh bahwa diplomasi pertahanan berupaya mengutamakan cara damai untuk mempromosikan kepentingan nasional. Komitmen untuk ikut serta dalam perdamaian dan ketertiban dunia jelas disebut dalam konstitusi dan Indonesia berkepentingan untuk mengimplementasikan hal tersebut.

Jejak rekam positif partisipasi *female peacekeeper* Indonesia yang semakin meningkat setidaknya membantu Indonesia untuk lebih didengar tentang usulan untuk memilih misi, menambah pasukan, menarik pasukan atau bahkan memindahkan pasukan. Lobi ini turut dibantu oleh representasi Indonesia di PTRI, New York. Terlebih, sistem *pledge* yang ada saat ini untuk ikut serta dalam misi pemeliharaan perdamaian menunjukkan bahwa negara kontributor perlu melakukan diplomasi kepada UNDPKO atau DK PBB melalui forum/sidang/pertemuan resmi lainnya dalam menjalin komunikasi. Tanpa diplomasi, sebagai *ways to participate*, pencapaian target 4.000 *peacekeeper* akan sulit tercapai.

Lobi-lobi di level PBB dirasa penting mengingat Indonesia memiliki kepentingan pada ranah pertahanan dimana target pada tahun 2019 ingin mencapai 4.000 pengerahan *peacekeeper*. Angka ini tentu juga bicara

¹⁶³ Andrew Cottey dan Anthony Forster, *op.cit.* hlm. 6.

tentang keterlibatan *female peacekeeper*. Untuk itu, segenap representasi Indonesia bekerja dan berkolaborasi bersama dalam mewujudkan hal ini. Terlebih, Indonesia juga menyadari perkembangan situasi lingkungan strategis terkait *peacekeeping operations* bahwa beberapa misi mengalami *downsizing*. *Downsizing* yang dimaksud disini adalah pengurangan jumlah pasukan di dalam misi PBB. Ini akan berpengaruh pada proyeksi pencapaian pengerahan 4.000 *peacekeepers* Indonesia, sehingga Indonesia perlu mengelola komunikasi dan lobi-lobi pada level PBB dengan baik.

Lebih lanjut, menurut TKMPP, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia juga membawa dampak positif terhadap peluang komunikasi Indonesia pada level PBB. Indonesia dianggap layak untuk dilibatkan dalam pembahasan isu gender, resolusi, dan sebagainya. Indonesia memiliki akses untuk masuk ke tataran pembahasan baik *Women, Peace and Security, Human Rights, Economy Social and Culture*, UNESCO, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan situasi perempuan yang masih minoritas di dalam misi pemeliharaan perdamaian, keberadaan *female peacekeepers* ini menjadi begitu terasa. Dengan demikian, partisipasi *female peacekeepers* Indonesia juga terlihat di permukaan dalam setiap statistik gender PBB.

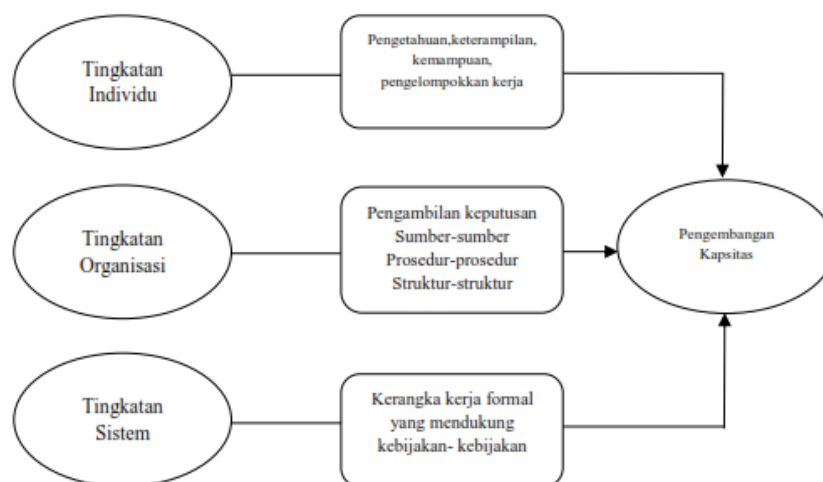
Selanjutnya, partisipasi *female peacekeeper* membawa dampak terhadap diplomasi pertahanan Indonesia terkait *capacity building*. Menurut Cottey dan Forster, diplomasi pertahanan juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pertahanan dengan melibatkan kerjasama. Ini sesuai dengan partisipasi *female peacekeeper* Indonesia yang terlibat dalam kerangka kerjasama multilateral yaitu misi pemeliharaan perdamaian dunia. Sejak penyiapan hingga pelaksanaan, *female peacekeeper* Indonesia mengambil manfaat injeksi pengetahuan melalui berbagai pelatihan. Hal ini turut berkontribusi terhadap pembentukan profesionalisme Wan-TNI. Bahkan, pengembangan kapasitas yang didapat oleh setiap personel ini dinilai berharga karena mampu

mengimplementasikan standar operasional milik PBB. Tidak hanya itu, setiap personel juga mengambil pelajaran tentang budaya asing dan bagaimana harus bersikap dalam situasi tertentu. Ini sejalan dengan Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015 bahwa misi pemeliharaan perdamaian sebagai salah satu bentuk kerjasama pertahanan ditujukan bukan hanya untuk mencegah konflik tetapi juga membangun kemampuan pertahanan untuk peningkatan profesionalisme TNI melalui pendidikan dan latihan. Ini sesuai dengan konsep *capacity building* menurut World Bank bahwa hal ini dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui pelaksanaan pelatihan (*training*). Adapun penelitian ini menemukan relevansinya dimana setiap personel menerima pelatihan sejak *pre-deployment*, *induction training*, hingga kegiatan pelatihan dari UN Agency.

Berdasarkan konsep *capacity building* dalam tulisan Prof. Riyadi Soeprapto (2006), lembaga internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa turut menjadikan *capacity building* sebagai bagian dari pembahasannya. Adapun dimensi *capacity building* yang dirujuk oleh PBB antara lain: a) Mandat dan struktur legal, b) Struktur kelembagaan, c) pendekatan manajerial, d) kemampuan organisasional dan teknis, e) kemampuan fiskal lokal, dan f) Aktivitas-aktivitas program. Ini sesuai dengan partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL bahwa mereka turut memperoleh dimensi *capacity building* termasuk mandat dan struktur legal, struktur kelembagaan, dan aktivitas-aktivitas program. Dalam hal mandat dan struktur legal, *female peacekeeper* Indonesia mendapat pelatihan dan materi baik tentang mandat UNIFIL (425, 426, dan 1701) maupun struktur legal terkait misi pemeliharaan perdamaian. Dalam hal struktur kelembagaan, para personel mendapat penjelasan mengenai organisasi komponen militer UNIFIL yang terdiri dari sembilan satuan/unit yang berada di bawah kendali *Force Commander*. Akhirnya, pada dimensi aktivitas-aktivitas program dapat diidentifikasi dari materi pelatihan baik *pre-deployment* maupun *induction training* bahwa

female peacekeeper turut menerima pengetahuan mengenai standar operasional pelaksanaan kerja, aktivitas-aktivitas sosial, administrasi, kegiatan berbasis gender, dan sebagainya.

Lebih lanjut, *capacity building* dalam misi pemeliharaan perdamaian ini utamanya berfokus pada pengembangan kapasitas personel atau *peacekeeper* itu sendiri termasuk *female peacekeeper*. Ini sesuai dengan satu dari tiga tingkatan *capacity building* yang disebut oleh Prof. Riyadi Soeprapto yaitu tingkatan individu (lihat Gambar 4.9). Adapun tingkatan lainnya adalah tingkatan organisasi dan sistem. Namun, mengingat penelitian ini fokus pada *female peacekeeper*, maka tingkatan yang relevan adalah tingkatan individu. *Capacity building* dalam tingkatan individu ini antara lain melalui keterampilan individu, persyaratan-persyaratan individu, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi pekerjaan individu di dalam organisasi.



Gambar 4.9 Tingkatan Capacity Building

Sumber: H.R. Riyadi Soeprapto, *The Capacity Building for Local Government Toward Good Governance*, Artikel dalam Workshop Reformasi Birokrasi di Kendari, 2006, hlm.16

Pada tataran individu ini, *female peacekeeper* Indonesia setidaknya dilatih keterampilannya dalam hal mengemudi, pengetahuan *basic life support*, penggunaan *digital sender*, *intranet*, *Outlook*, *share point*, *Global Positioning System (GPS)*, dan *Night Vision Goggles (NVG)*. Lebih dari itu,

sejak bergabung dalam misi, *female peacekeeper* telah dihadapkan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar mampu menjalankan tugas sebagai *peacekeeper*. Sebagai contoh, persyaratan tersebut adalah kemampuan bahasa Inggris sehingga mendorong *female peacekeeper* untuk meningkatkan kemampuannya bahkan pada pelaksanaan tugas kemampuan berbahasa Inggris ini secara praktis juga dilatih baik *speaking, listening, dan writing*. Pengetahuan mengenai mandat, operasi PBB, perlindungan terhadap korban, dan setiap standar prosedur operasional di dalamnya juga merupakan bagian dari pengembangan kapasitas individu militer. Dengan demikian, setiap personel dapat menjalankan tugas sesuai dengan posisi masing-masing berdasarkan pengetahuan yang didapat dan pada pelaksanaannya turut menjadi tempat melatih profesionalisme.

Peacekeeping secara luas diasumsikan memiliki dampak transformatif terhadap sektor keamanan dan pertahanan dengan implikasi positif terhadap hubungannya dengan negara lain.¹⁶⁴ Sebagai tempat latihan internasional, *peacekeeping* dapat membuat kontak komunikasi antar *security and defense officials*. Adanya komunikasi ini membuka peluang terhadap sikap positif satu sama lain dan pada akhirnya dapat digunakan untuk membangun kerjasama. Bagaimanapun, terbatasnya jumlah *female peacekeepers* di misi membuat personel lebih mudah mengingat rekan-rekan dari negara lain, membangun interaksi, berbagi pengalaman, dan menjadi duta bagi negara sendiri. *Female peacekeepers* layaknya seorang diplomat yang memperkenalkan Indonesia beserta keunggulannya.

Dalam pandangan tersebut, *peacekeeping* dilihat sebagai isu *soft security* yang hadir untuk memfasilitasi kerjasama keamanan. Bukan hanya pada tingkat global PBB tetapi juga regional. Secara regional partisipasi *female peacekeeper* Indonesia juga memberikan citra positif

¹⁶⁴ David Capie, "Evolving Attitudes to Peacekeeping in ASEAN", *Proceedings International Symposium on Security Affairs; New Trends in Peacekeeping: In Search of a New Direction*, (Tokyo: National Institute for Defence Studies, 2014).

dan mendorong kepercayaan negara-negara kawasan untuk membentuk *ASEAN Female Peacekeeper Network*. Ini disampaikan oleh Wakil Komandan PMPP TNI dalam wawancara dengan peneliti. Wadan PMPP TNI menyampaikan hal ini pasca pertemuannya dalam *ASEAN Peace Training Center Network*. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa akan terbentuk jaringan *female peacekeeper* ASEAN dan Indonesia siap menerima ini.

Akhirnya, partisipasi *female peacekeeper* membuka peluang terhadap komunikasi, membuka koneksi dengan *stakeholder* keamanan internasional, menciptakan kewaspadaan terhadap budaya, bahasa dan narasi perdamaian. Sebagai negara kontributor, Indonesia dapat meningkatkan citra global, *international prestige*, dan *soft power* melalui partisipasi.¹⁶⁵ Analisis dampak partisipasi *female peacekeepers* Indonesia terhadap Diplomasi pertahanan Indonesia dalam level PBB dapat dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.9 Diskusi Konsep dan Temuan Penelitian Dampak Partisipasi *Female Peacekeepers* Indonesia terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia

| Konsep | Temuan Penelitian |
|---|---|
| Diplomasi Pertahanan (Cotter dan Forster) Diplomasi pertahanan sebagai cara untuk mengejar kepentingan pertahanan dan luar negeri yang lebih luas melalui dukungan dari negara lain. | <ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi <i>Female Peacekeeper</i> Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian memperkuat <i>bargaining power</i> Indonesia dalam melakukan diplomasi di PBB dan komunikasi dengan UNDPKO terkait kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian. - Partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia menjadi bagian dari komitmen dan kampanye Indonesia hingga terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020. |
| <i>Confidence Building Measures</i> | Partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia berdampak pada pembangun <i>confidence</i> |

¹⁶⁵ Matt Armstrong, "U.N. Peacekeeping as Public Diplomacy", 19 Mei 2010 dalam *World Politics Review*, <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/5561/u-n-peacekeeping-as-public-diplomacy>, diakses pada 18 November 2018.

| Konsep | Temuan Penelitian |
|---|--|
| <p>Baviera dengan indikator komunikasi</p> <p>UNODA dengan indikator komunikasi</p> | <p><i>building measures</i> Indonesia ditunjukkan melalui beberapa aktivitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi dalam forum multilateral termasuk UNDPKO, diskusi panel <i>Special Committee for Peacekeeping Operations (C-34)</i> - Komunikasi dalam Majelis Umum PBB untuk mempromosikan partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia dan memperoleh dukungan negara lain dalam rangka keanggotaan tidak tetap DK PBB <ul style="list-style-type: none"> - Penunjukkan <i>female peacekeeper</i> dalam misi sebagai <i>military staff</i> dan satgas Kontingen membangun komunikasi/dialog antar pihak - <i>Female peacekeeper</i> Indonesia berkoordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait kegiatan misi - Bagian <i>military staff</i> turut memperhatikan notifikasi perpindahan pasukan, menerima informasi pelatihan dan rotasi - <i>Female peacekeeper</i> Indonesia hadir dalam pertemuan/rapat yang ditentukan termasuk mingguan dan bulanan. |
| <p><i>Capacity Building: Pelatihan</i></p> | <p>Partisipasi <i>female peacekeepers</i> Indonesia turut membentuk profesionalisme Wan-TNI dan berkontribusi terhadap <i>capacity building</i> melalui berbagai pelatihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pre Deployment Training - Induction Training oleh unit J-7 - Seminar dan Konferensi Batalyon - Joint training/FAST training - Kursus bahasa Inggris dan Arab <p><i>Female Peacekeeper</i> Indonesia dibekali pengetahuan tentang misi, prosedur standar PBB, materi-materi keamanan, gender, penggunaan peralatan standar PBB, hingga secara tidak langsung tentang cara berkomunikasi dan berdiplomasi.</p> |

Sumber: Olahan Peneliti

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Partisipasi *Female Peacekeeper* Indonesia dalam Misi UNIFIL 2015-2017

Partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi *United Nations Interim Forces in Lebanon* tahun 2015-2017 sudah berjalan baik dimana dari segi kuantitas *female peacekeeper* Indonesia mengalami peningkatan dengan total 100 personel dari total 134 yang diberangkatkan ke sembilan misi perdamaian dunia. Angka partisipasi *female peacekeepers* Indonesia di UNIFIL ini mewakili 74.6% sebaran pasukan di seluruh misi pemeliharaan dunia yang diikuti Indonesia pada tahun 2015-2017. Namun, posisi penugasan *female peacekeeper* Indonesia masih belum ditempatkan pada posisi substansial. *Female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL lebih banyak ditempatkan pada posisi pendukung yaitu Satuan Tugas di dalam Kontingen daripada *military staff*. Walau demikian, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia mendapat apresiasi dalam misi ini karena kemampuannya dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat termasuk perempuan dan anak-anak khususnya dalam kegiatan sipil-militer dan *community outreach*.

Secara garis besar, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia masih belum maksimal dalam mendukung target 15% komposisi gender dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena terdapat hambatan dalam proses penyiapan. Hambatan tersebut utamanya berkaitan dengan kurang siapnya institusi militer dalam menyiapkan Wan-TNI termasuk kurangnya pendidikan dan pelatihan, aturan terkait ijin suami/atasan, dan absennya kebijakan. Namun, jika dibandingkan dengan kontribusi negara lain di dalam misi UNIFIL, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia ini sudah sangat baik dimana Indonesia menempati posisi negara kontributor *female peacekeeper* terbesar ketiga setelah Ghana dan Perancis.

5.1.2 Dampak Partisipasi *Female Peacekeeper* Indonesia terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia

Partisipasi *female peacekeeper* Indonesia berdampak meningkatkan *leverage* Indonesia dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan. Partisipasi ini turut membangun *confidence building measure* Indonesia sehingga terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Lebih lanjut, partisipasi *female peacekeeper* Indonesia memperkuat *bargaining position* Indonesia dalam melakukan komunikasi dan lobi-lobi internasional dalam beberapa forum seperti Majelis Umum PBB dan UNDPKO untuk mencapai kepentingan nasional termasuk agenda pencapaian 4.000 *peacekeepers* Indonesia.

Partisipasi *female peacekeeper* Indonesia juga berdampak terhadap pengembangan kapasitas (*capacity building*) personel perempuan (Wan-TNI). Melalui pelatihan yang diikuti dan pelaksanaan tugas selama di misi, *female peacekeepers* Indonesia dapat mengembangkan kapasitas individu, kemampuan menggunakan peralatan berstandar PBB dan meningkatkan profesionalisme kerja. Secara garis besar, melibatkan perempuan dalam misi perdamaian dunia mendukung pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia yang handal untuk mencapai kepentingan nasional.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Partisipasi *Female Peacekeepers* Indonesia di UNIFIL Tahun 2015-2017: Dampak Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi secara teoritis dan praktis.

5.2.1 Rekomendasi Teoritis

Penelitian mengenai perempuan dalam misi perdamaian masih memerlukan pengembangan. *Female peacekeepers* Indonesia sendiri tersebar ke dalam berbagai misi di dunia. UNIFIL adalah misi yang relatif aman, peneliti mengambil ini melihat tren partisipasi *female peacekeepers* Indonesia didominasi dalam misi UNIFIL. Untuk itu, peneliti

merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat meninjau misi-misi yang lebih menantang dengan melihat peran dan kontribusi perempuan di wilayah misi tersebut. Selain itu, hal ini penting agar peneliti dapat melihat peran *female peacekeepers* di dalam posisi *military observer*, urgensi pengirimannya dan manfaat bagi Indonesia. Dengan begitu diharapkan semakin banyaknya perspektif akademis terhadap pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian dan tinjauannya terhadap isu gender. Perlu kajian lebih lanjut tentang diplomasi pertahanan dalam hal *peacekeeping operations*

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan elaborasi data yang diperoleh peneliti, berikut adalah rekomendasi praktis yang dapat disampaikan:

- a. Pada level strategis, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan perlu merumuskan kebijakan strategi tentang peningkatan jumlah *female peacekeeper* yang didukung dengan perspektif gender dan dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
- b. Secara operasional, melalui PMPP TNI, perlu dilakukan penguatan pelatihan terhadap *female peacekeeper* Indonesia terkait PBB sebagai *institutional knowledge* personel, tugas dan fungsi, budaya setempat, sampai kemampuan diplomasi dan komunikasi, serta *trauma healing*;
- c. Secara taktikal, perlu dipersiapkan *early training* terhadap Wan-TNI mengenai kemampuan bahasa Inggris, dan
- d. Setiap institusi/lembaga perlu mengaplikasikan perspektif gender dalam setiap kebijakannya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang ramah gender dan inklusif. Untuk itu, diperlukan *gender unit* atau *gender focal point* yang secara khusus membidangi perhatian terhadap kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bhatia, Vinod., Vijai S. Chaudhari, dan Ranjit Singh. 2016. *Defence Diplomacy and International Military Co-Operation*. New Delhi: Centre for Joint Warfare Studies.
- Carreiras, Hellena dan Gerhard Kummel (ed.). 2008. *Women in the Military and in Armed Conflict*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Cottey, Andrew dan Anthony Forster. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. London: Oxford University Press for The International Institute for Strategic Studies.
- Creswell, John W. 2008. *Educational Research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson-Prentice Hall.
- Creswell, John W. 2014 *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edition. SAGE Publication, Inc.
- Du Plessis, Anton. 2008. *Defence Diplomacy: Conceptual and Practical Dimensions with Specific Reference to South Africa*. University of Pretoria: Department of Political Sciences.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Edisi 1 Cetakan ke-2. Jakarta: Rajawali Press.
- Heywood, Andrew. 2011. *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Isabelle Geuskens. 2014. *Gender and Militarism: Analyzing the Links to Strategize for Peace*. Den Hag: Women Peacemakers Program (WPP).
- J. R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI

- Kementerian Pertahanan. 2014. *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kerr, Alexandra. 2017. *Effective, Legitimate, Secure: Insights for Defense Institution Building*. Washington DC: Center for Complex Operations. Institute for National Strategic Studies. National Defense University.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *“Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook”*, Third Edition, SAGE Publications, Inc.
- Neimanis, Astrida. 2005. *Gender Mainstreaming in Practice: A HANDBOOK UNDP Regional Centre for Europe and the CIS (UNDP RBEC)*. 2nd Edition.
- Norad. 2013. *A Framework for Analysing Participation in Development*. Oslo: Norad Evaluation Department. Report 1.
- PMPP TNI. 2011. *TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian: Peran PMPP TNI dalam Menyiapkan Kontingen Garuda*. Jakarta: PMPP-TNI.
- Radtke, J., et.al. 2018. *Concepts, Formats, and Methods of Participation: Theory and Practice*. dalam buku *Handbuch Energiewende und Partizipation*. Wiesbaden: Springer.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Soeprapto, H.R. Riyadi. 2010. *The Capacity Building for Local Government Toward Good Governance*. World Bank
- UNDPKO. 2010. *Integrating a Gender Perspective into the Work of the United Nations Military in Peacekeeping Operations*. New York: Department of Peacekeeping Operations.
- United Nations. 2002. *Women, Peace and Security*. New York: United Nations Publication.
- United Nations. 2003. *Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations*. New York: United Nations Publication.

United Nations. 2016. *UN Military Roles and Responsibilities, Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards Module*. United Nations Publication.

Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan dan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan

Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jurnal/Artikel:

Baviera, Aileen S.P. 2001. "Bilateral Confidence Building with China in Relation to the South China Seas Dispute: A Philippine Perspective". *International Security Research and Outreach Programme*.

Bishwambhar Ghimire. 2017. "Contributions and Challenges: Female Participations in UN Peacekeeping Missions". *International Journal of Humanities and Social Sciences*. USA: Center for Promoting Ideas. Vol. 7, No. 3. Maret.

Capie, David. 2014. "Evolving Attitudes to Peacekeeping in ASEAN". *Proceedings International Symposium on Security Affairs: New Trends in Peacekeeping: In Search of a New Direction*. Tokyo: National Institute for Defence Studies.

Capie, David. 2016. "Indonesia as an Emerging Peacekeeping Power: Norm Revisionist or Pragmatic Provider?". *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* Vol. 38. No. 1.

- Charlesworth, Hilary. 2000. "Martha Nussbaum's Feminist Internationalism". *Ethics*. The University of Chicago Press. Vol. 111. No. 1.
- Cohen, J. dan Uphoff N. 1980. "Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity". *World Development*. 1980.
- CSS. 2015. "Regional Defence Diplomacy: What is it and What are its Limits?". *CSS Strategic Background Paper*. New Zealand: CSS.
- Hadi, A.P. 2013. "Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan". Jakarta: Yayasan Agribisnis/*Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*.
- Hutabarat, Leonard F. 2017. "Peningkatan Female Peacekeepers Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB". *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Volume 7 Nomor 2.
- Lopes, Hayley. 2011. "Militarized Masculinity in Peacekeeping Operations: An Obstacle to Gender Mainstreaming". *Background Paper Peacebuilding and Conflict Prevention Consultation Series. Peacebuild*.
- Pramasatya, Satwika, 2015. "Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco", *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, Vol. 2, No. 1.
- Timur, Fitri Bintang. 2016. "The Tales of Three Asian Countries: How Indonesia, India and the Philippines Recruited Women for UN Peacekeeping Missions". *Global*. Vol. 18. No. 1.

Dokumen Lembaga:

- Kemlu-RI. "Indonesia: Candidate for the United Nations Security Council 2019-2020". Jakarta: Kemlu-RI.
- Nuraeni, Erna. 2016. "*Laporan Pelaksanaan Tugas JLOC OPSS01 UNIFIL HQ Naqoura-Lebanon*". PMPP TNI.

- PMPP TNI. 2016. "Profil Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI". dalam <https://ppid.tni.mil.id/view/32435571/profil-pmpp-tni.html> diunduh pada 14 November 2018.
- PMPP TNI. 2018. "Sejarah Pembentukan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI". dalam <https://ppid.tni.mil.id/view/32436077/data-pmpp-tni.html>, diunduh pada 14 November 2018.
- UNDPKO. 2017. "Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations". Dalam <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>, diunduh pada 11 November 2018.
- UNIFIL. 2006. "Press Release Indonesia Joins UNIFIL", dalam https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/docs/pr072_2.pdf, diunduh pada 10 September 2018.
- UNIFIL. 2014. "*Women, Peace and Identifying Security: Piloting Military Gender Guidelines in UNIFIL*". Final Report.
- United Nations Security Council. 2000. "*Resolution 1325 (2000): Women, Peace and Security*". No. S/RES/1325.
- United Nations Security Council. 2006. "*Resolution 1701: The Situation in The Middle East*". No. S/RES/1701.
- United Nations. 2002. "*Gender Mainstreaming: An Overview*". New York: Office of the Special Adviser on Gender Issues.
- United Nations. 2008. "*United Nations Peacekeeping Operations Principle and Guidelines*". New York: United Nations.

Tesis dan Disertasi:

- Salma, Mutia Zakia. 2018. "Pengarusutamaan Gender pada Misi Pemeliharaan Perdamaian oleh Indonesia (Studi Keterlibatan Wanita Tentara Nasional Indonesia)". *Tesis Magister*. Jakarta: Program Magister Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan.

Pedrason, Rodon. 2015. "ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?". *Disertasi*. Heidelberg: Institut Fur Politische Wissenschaft, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

Internet/Website:

Any, Agnes Anya. 2018. "Low Numbers Hamper Indonesia's Pledge to Send More Women Peacekeeper". *The Jakarta Post*. dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2018/06/25/low-numbers-hamper-indonesias-pledge-to-send-more-women-peacekeepers.html>, diakses pada 12 November 2018.

Armstrong, Matt. 2010. "U.N. Peacekeeping as Public Diplomacy". dalam *World Politics Review*, <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/5561/u-n-peacekeeping-as-public-diplomacy>, diakses pada 18 November 2018.

Badereddine, Suzane dan Zeina Ezzeddine. 2018. "UNIFIL Female Assessment/Analysis Support Team (FAST) Patrols in Rmeish". dalam <https://unifil.unmissions.org/unifil-female-assessmentanalysis-support-team-fast-patrols-rmeish>, diakses pada 30 Oktober 2018.

CSIS. 2015. "Overview". dalam <https://www.csis.or.id/about/overview.html>, diakses pada 14 November 2018.

detikNews. 2013. "Pertama Kali, Akmil TNI AD Rekrut Perempuan", dalam <https://news.detik.com/berita/2199892/pertama-kali-akmil-tni-ad-rekrut-perempuan>, diakses pada 5 Desember 2018

Kemlu-RI. 2015. "Indonesia and The United Nations", dalam <https://www.kemlu.go.id/newyork-un/en/indonesia-united/default.aspx>, diakses pada 10 November 2018.

Kemlu-RI. 2016. "Kementerian Luar Negeri Jelaskan Esensi Prinsip Bebas Aktif di Polugri RI". Dalam

- <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/bebas-aktif.aspx>, diakses pada 14 November 2018.
- Marsudi, Retno LP. 2018. "Indonesia dan Perdamaian Dunia", dalam <https://kompas.id/baca/opini/2018/06/11/indonesia-dan-perdamaian-dunia/>, diakses pada 18 Juni 2018.
- Maulana, Victor. 2018. "Indonesia Masuk 10 Besar Negara Penyumbang Pasukan Perdamaian PBB". dalam <https://international.sindonews.com/read/1284306/40/indonesia-masuk-10-besar-negara-penyumbang-pasukan-perdamaian-pbb-1519291328>. diakses pada 26 April 2018.
- O'Sullivan, Aoibheann. 2017. "'Mr. and Mrs. Blue Barrel' Educate Young Children on Blue Line Safety". dalam <https://unifil.unmissions.org/%E2%80%9Cmr-and-mrs-blue-barrel%E2%80%9D-educate-young-children-blue-line-safety>, diakses pada 6 November 2018.
- peacekeeping.un.org. "Civilians". dalam <https://peacekeeping.un.org/en/civilians> diakses pada tanggal 25 Mei 2018
- Pokharel, Tilak. 2018. "Advancing Women Peacekeepers Role in UNIFIL". dalam <https://unifil.unmissions.org/advancing-women-peacekeepers-role-unifil>, diakses pada 2 November 2018.
- Schouten, P. & Dunham, H. 2012. 'Theory Talk #48: Cynthia Enloe on Militarization, Feminism, and the International Politics of Banana Boats'. Theory Talks. dalam <http://www.theorytalks.org/2012/05/theory-talk-48.html>, diakses pada 2 Juli 2018.
- Allison, Simon. 2015. "Are Women Better Peacekeepers? These UN Officers Think So". Theguardian. dalam <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/17/women-better-peacekeepers-un-officers-think-so>, diakses pada 30 April 2018.

- Salim, Tama. 2018. Chances rare for Indonesian women peacekeepers".
The Jakarta Post. dalam
<http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/28/chances-rare-for-ri-women-peacekeepers.html>, diakses pada 26 April 2018.
- Thejakartapost. 2018. "Female Peacekeepers Lift RI's Image in Lebanon".
dalam
<https://indonesia4unsc.kemlu.go.id/index.php/component/k2/female-peacekeepers-lift-ri-s-image-in-lebanon>. diakses pada 23 April 2018
- Tim Wallis. 2010. "Civilian Peacekeeping" Nonviolent Peace force, Oxford Encyclopedia of Peace, dalam
<https://www.globalpolicy.org/security-council/peacekeeping/peacekeeping-reform/49571-civilian-peacekeeping.html>. diakses pada 25 Mei 2018.
- Un.org. "Chapter VII; Action with Respect to Threats to The Peace, Breaches of The Peace and Acts of Aggression". dalam
<http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html>.
diakses pada 2 Juli 2018
- UNIFIL, "UNIFIL Mandate", dalam <https://unifil.unmissions.org/unifil-mandate>, diakses pada 28 September 2018.
- UNIFIL. 2016. "New UNIFIL Initiative to Ensure Gender Perspective in Host Communities". dalam <https://unifil.unmissions.org/new-unifil-initiative-ensure-gender-perspective-host-communities>, diakses pada 9 Oktober 2018.
- UNIFIL. 2016. "Unifil Operations". dalam <https://unifil.unmissions.org/unifil-operations>, diakses pada 9 November 2018.
- UNIFIL. 2018. Advancing Women Peacekeepers Role in UNIFIL. dalam <https://unifil.unmissions.org/advancing-women-peacekeepers-role-unifil>, diakses pada 15 November 2018.

- unifil.unmissions.org. "UNIFIL Mandate". dalam <https://unifil.unmissions.org/unifil-mandate>. diakses pada 23 April 2018.
- United Nations. "Brief Introduction to UN Peacekeeping". dalam Civil Affairs Handbook. UNDPKO. <http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/civilhandbook/Chapter1.pdf>. diakses pada 2 Juli 2018.
- United Nations Peacekeeping. 2017. "UN Peacekeeping sets new targets for female police, military observers and staff officers". dalam <https://peacekeeping.un.org/en/un-peacekeeping-sets-new-targets-female-police-military-observers-and-staff-officers>. diakses pada 26 April 2018.
- UNMissions. 2018. "Training". dalam <https://conduct.unmissions.org/prevention-training>, diakses pada 10 November 2018.
- UNODA, "Repository of Military Confidence-Building Measures", dalam <https://www.un.org/disarmament/cbms/repository-of-military-confidence-building-measures/>, diakses pada 13 Agustus 2018.
- Utomo, Ardi Priyatno. 2018. "Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB untuk Kali Keempat". dalam <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/09/03170051/indonesia-terpilih-jadi-anggota-dewan-keamanan-pbb-untuk-kali-keempat>, diakses pada 15 November 2018.

Sumber Lain:

- Pusparini, Ratih. 2017. "The Role of Women Peacekeepers in UN Peacekeeping Operations: Lesson Learned", Presentasi dalam Side Event UNDPKO, Special Committee for Peacekeeping Operations (C-34), New York.

United Nations. 2018 “Retno Lestari Priansari Marsudi (Indonesia) – General Assembly Media Stakeout”. dipublikasikan dalam laman resmi YouTube United Nations, diakses pada 15 November 2018.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 2101 / VIII /2018

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan izin penelitian dan
permintaan data

Bogor, 21 Agustus 2018


Kepada

Yth. Pejabat Dalam Lampiran

di

Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Diploması Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2017/2018.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai persyaratan kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Diploması Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan atas nama Sarah Astried NIM: 120170103022, bermaksud menyusun tesis dengan judul: *Partisipasi Female Peacekeeper Indonesia dalam Misi United Nations Interim Forces in Lebanon Tahun 2018: Dampak Terhadap Diploması Pertahanan Indonesia.*
3. Berknaan dengan hal tersebut mohon mahasiswa dimaksud diizinkan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara.
4. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sarah Astried NIM: 120170103022, nomor HP. +6282112547930, e-mail : sarah.astried@idu.ac.id dan sarahastried@gmail.com.
5. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M. Eng
Pembina Utama IV/a

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Dirjen Kerjasama Multilateral Kemlu
3. Dirjen Strahan Kemhan
4. Komandan PMPP
5. Dekan FSP Unhan
6. Karo Aka. dan Kemahasiswaan Unhan
7. Ses Prodi Diploması Pertahanan FSP Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Bogor Tlp 021 - 29618758

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/ 161 /VII/2018
Tanggal : 21 Agustus 2018

DAFTAR NAMA PEJABAT:

1. Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP),
Ditjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI
2. Direktur Keamanan Internasional dan Perucutan Senjata, Ditjen Kerjasama
Multilateral Kementerian Luar Negeri RI
3. Direktur Kerjasama Internasional, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan,
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
4. Direktur Pembinaan Kerjasama Internasional dan Informasi PMPP TNI, Pusat Misi
Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI
5. Military Advisor, Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York
6. Atase Pertahanan Lebanon untuk Indonesia, Kedutaan Besar Lebanon di Jakarta
7. Fitri Bintang Timur, Ph.D., *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS)
Indonesia

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warak Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M. Eng
Pembina Utama IV/e

LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA

“Partisipasi *Female Peacekeeper* Indonesia dalam Misi *United Nations Interim Forces in Lebanon* Tahun 2015-2017: Dampak terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia”

Sarah Astried, Prodi Diplomasi Pertahanan,
(NIM. 120170103022) Universitas Pertahanan, 2018

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dalam empat tingkatan informan sebagai berikut:

A. Strategis

- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Luar Negeri
- Mabes TNI/POLRI
- PTRI

B. Operasional

- PMPP TNI

C. Taktikal

- Personel Militer

D. Lainnya

- Akademisi/Peneliti lain

Pedoman wawancara selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan pembagian tingkatan tersebut (A, B, C, dan D), dilakukan dalam sifat semi-terstruktur dan *open-ended*.

PEDOMAN WAWANCARA

“Partisipasi *Female Peacekeeper* Indonesia dalam Misi *United Nations Interim Forces in Lebanon* Tahun 2015-2017: Dampak terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia”



**Sarah Astried – Diplomasi Pertahanan – 120170103022
Universitas Pertahanan**

Gambaran Umum Penelitian:

Indonesia merupakan salah satu negara kontributor pengirim *peacekeeper* PBB terbesar di dunia. Pasukannya tersebar di berbagai wilayah konflik termasuk Lebanon dalam misi *United Nations Interim Forces in Lebanon*. Dalam misi tersebut, Indonesia turut mengirimkan *female peacekeeper* baik dari satuan TNI, Polisi dan Sipil. Ini penting mengingat komitmen Indonesia untuk turut serta dalam perdamaian dunia dan mengacu pada adanya Resolusi DK PBB 1325. Partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dapat dilihat baik secara kuantitas maupun kompetensi personil serta aspek lainnya yang mendukung persiapan, implementasi dan hasil partisipasi. Hal ini kemudian menjadi salah satu poin penting untuk posisi Indonesia secara internasional sebagai mitra strategis. Sebuah pencapaian bahwa Indonesia berhasil terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap DK PBB Tahun 2019-2020 dengan menyampaikan salah satu komitmennya yaitu meningkatkan peran perempuan dalam menjaga perdamaian di berbagai misi PBB.

Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan utama yaitu:

1. Bagaimana partisipasi *female peacekeeper* Indonesia dalam misi UNIFIL tahun 2015-2017?
2. Bagaimana dampak partisipasi *female peacekeeper* Indonesia terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia?

Subyek Penelitian : Kemhan/Kemlu

Tujuan:

- Mengetahui visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi struktur terkait,
- Mengetahui kebijakan terkait pengiriman *female peacekeeper*,
- Mengetahui target kuantitas dan kompetensi pengiriman *female peacekeeper*,
- Mengetahui informasi mengenai koordinasi/kerjasama kelembagaan dan kementerian terkait topik penelitian,
- Mengetahui perspektif kementerian terkait diplomasi pertahanan melalui pengiriman *female peacekeeper* Indonesia.

Estimasi Keluaran Data:

- Dokumen organisasi terkait kebijakan dan program
- Rekaman dan transkrip wawancara
- Data audio visual: Foto dan Video

Metode Wawancara:

Semi terstruktur, peneliti berupaya melakukan wawancara dengan pertanyaan bersifat *open-ended* sehingga peneliti dan informan dapat fleksibel dalam memberikan pertanyaan/jawaban serta terkontrol melalui pedoman wawancara sebagai acuan.

Pedoman Wawancara

| Partisipasi <i>Female Peacekeeper</i> Indonesia dalam Misi UNIFIL Tahun 2015-2017 | | | |
|---|---|--|---|
| No. | Kebijakan | Implementasi | Evaluasi |
| 1. | Bagaimana urgensi Indonesia dalam mengirimkan <i>female peacekeeper</i> ke wilayah operasi pemeliharaan perdamaian PBB seperti UNIFIL? | Bagaimana angka keterwakilan <i>female peacekeeper</i> Indonesia dalam misi PBB secara keseluruhan? | Apakah tanggapan yang diterima Indonesia oleh negara lain/markas PBB terkait partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia? |
| 2. | Bagaimana strategi K/L Indonesia dalam memaksimalkan partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia? | Apakah proporsi pengiriman <i>female peacekeeper</i> Indonesia ke UNIFIL merepresentasikan target gender? | Bagaimana pencapaian tugas dan kewajiban <i>female peacekeeper</i> Indonesia dalam misi UNIFIL 2015-2017? |
| 3. | Bagaimana mekanisme perekrutan <i>female peacekeeper</i> dari TNI, Polisi dan Sipil? Siapa yang bertanggung jawab terhadap proses tersebut? | Bagaimana penempatan <i>female peacekeeper</i> Indonesia (posisi struktural/organisasi dan wilayah tempat) dalam misi PBB, khususnya UNIFIL? | Apakah produk yang dihasilkan oleh <i>female peacekeeper</i> Indonesia selama bertugas di UNIFIL? |
| Dampak Partisipasi <i>Female Peacekeeper</i> terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia | | | |
| No. | Motivasi | CBM | Capacity Building |
| 1. | Apakah faktor pendorong pengiriman <i>female peacekeeper</i> Indonesia? | Bagaimana respon Kontingen negara lain di wilayah operasi terhadap keberadaan <i>female peacekeeper</i> Indonesia? | Bagaimana produk yang dihasilkan dari partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia? |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 2. | Bagaimana Indonesia menyikapi Resolusi 1325 tentang <i>Women, Peace and Security</i> ? | Bagaimana konteks diplomasi pertahanan dalam pengiriman <i>female peacekeeper</i> tersebut? | Bagaimana tindak lanjut Indonesia terhadap keberlanjutan pengiriman <i>female peacekeeper</i> ? |
|----|--|---|---|

Subyek Penelitian: PMPP TNI

| Partisipasi <i>Female Peacekeeper</i> Indonesia dalam Misi UNIFIL Tahun 2015-2017 | | | |
|---|---|--|---|
| No. | Kebijakan/ <i>Decision Making</i> | Implementasi | Evaluasi |
| 1. | Bagaimana regulasi terhadap wanita TNI untuk berpartisipasi dalam <i>peacekeeping operations</i> ? | Berapa jumlah personil wanita TNI yang dikirimkan dalam misi UNIFIL 2015-2017? | Bagaimana tanggapan markas PBB terhadap kinerja Kontingen Garuda di UNIFIL 2015-2017? |
| 2. | Bagaimana mekanisme rekrutmen wanita TNI dalam seleksi <i>peacekeeper</i> ? Adakah kesulitan dalam merekrut <i>female peacekeeper</i> ? | Bagaimana penempatan (posisi) tugas <i>female peacekeeper</i> Indonesia di wilayah operasi UNIFIL 2015-2017? | Bagaimana pencapaian tugas dan kewajiban <i>female peacekeeper</i> Indonesia dalam misi UNIFIL 2015-2017? |
| 3. | Bagaimana ketentuan proporsi perempuan dalam Kontingen yang akan dikirimkan ke dalam misi operasi PBB? | Apakah tantangan dan hambatan yang dihadapi <i>female peacekeeper</i> dalam menjalankan misi operasi? | Apakah produk yang dihasilkan oleh partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia, khususnya UNIFIL 2015-2017? |
| 4. | Bagaimana proses pembekalan kompetensi/keahlian (PDT) yang diberikan PMPP TNI terhadap <i>female peacekeeper</i> ? Adakah materi khusus tentang gender? | Bagaimana <i>female peacekeeper</i> Indonesia berinteraksi dengan Kontingen negara lain dan para penduduk sipil? | Apakah kelebihan dan kekuatan pengiriman personil perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB? |
| Dampak Partisipasi <i>Female Peacekeeper</i> terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia | | | |
| No. | Motivasi | CBM | Capacity Building |
| 1. | Apakah faktor pendorong pengiriman <i>female peacekeeper</i> Indonesia menurut PMPP TNI? | Bagaimana respon Kontingen negara lain di wilayah operasi terhadap keberadaan <i>female peacekeeper</i> Indonesia? | Bagaimana produk yang dihasilkan dari partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia? |
| 2. | Bagaimana Indonesia mengambil pelajaran dari Kontingen negara lain terkait pengiriman <i>female peacekeeper</i> ? | Bagaimana konteks diplomasi pertahanan dalam pengiriman <i>female peacekeeper</i> tersebut? | Bagaimana tindak lanjut Indonesia terhadap keberlanjutan pengiriman <i>female peacekeeper</i> ? |

Subyek Penelitian: *Female Peacekeeper*

| Partisipasi <i>Female Peacekeeper</i> Indonesia dalam Misi UNIFIL Tahun 2015-2017 | | | |
|---|--|--|--|
| No. | Perencanaan/Persiapan | Implementasi | Evaluasi |
| 1. | Bagaimana anda memutuskan untuk mengikuti seleksi <i>peacekeeper</i> ? | Apa saja tugas dan kewajiban anda sebagai <i>female peacekeeper</i> dalam misi UNIFIL? | Bagaimana hambatan dan tantangan yang anda temui selama bertugas di UNIFIL? |
| 2. | Bagaimana materi-materi yang diberikan kepada anda pada masa PDT? | Bagaimana keterlibatan <i>female peacekeeper</i> Indonesia dalam posisi <i>Military Observer/Staff/Police/CIMIC</i> ? | Apa saja kesulitan yang dihadapi <i>female peacekeeper</i> Indonesia dan apa yang dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut? |
| 3. | Apa yang anda ketahui tentang pertimbangan wilayah-wilayah untuk penempatan perempuan di wilayah operasi? | Bagaimana interaksi anda dengan sesama personil di dalam Kontingen Garuda dan dengan Kontingen dari negara lainnya? | Bagaimana pendapat anda tentang kelebihan dan kekurangan pengiriman <i>female peacekeeper</i> Indonesia? |
| 4. | Menurut anda, apa yang perlu dipersiapkan <i>female peacekeeper</i> Indonesia untuk siap melaksanakan tugas di misi operasi? | Bagaimana interaksi dan kegiatan anda dengan penduduk sipil setempat? | Apa saran anda terhadap pemerintah Indonesia terkait pengerahan <i>female peacekeeper</i> ? |
| Dampak Partisipasi <i>Female Peacekeeper</i> terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia | | | |
| No. | CBM | Capacity Building | |
| 1. | Bagaimana anda sebagai <i>female peacekeeper</i> Indonesia memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang cinta damai? | Bagaimana lingkungan sekitar Kontingen Garuda berkolaborasi dengan Kontingen negara lainnya atau unit DPKO tertentu dimana ada partisipasi <i>female peacekeeper</i> ? | |
| 2. | Bagaimana respon Kontingen negara lain di wilayah operasi terhadap keberadaan <i>female peacekeeper</i> Indonesia? | Pelatihan apa saja yang anda dapatkan sejak penyiapan hingga pelaksanaan misi? Apa saja pelajaran yang anda dapatkan dari posisi yang didelegasikan kepada anda? | |

Subyek Penelitian: Akademisi/Peneliti lain

| Partisipasi <i>Female Peacekeeper</i> Indonesia dalam Misi UNIFIL Tahun 2015-2017 | |
|---|---|
| No. | Pertanyaan |
| 1. | Bagaimana pendapat anda tentang partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB? |
| 2. | Bagaimana pendapat anda tentang <i>roadmap vision 4.000 peacekeeper</i> Indonesia yang ingin dicapai dari tahun 2015-2019? |
| 3. | Apakah kelebihan dan kelemahan dari partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia? |
| 4. | Bagaimana dengan tantangan dan kendala yang dihadapi <i>female peacekeeper</i> Indonesia di wilayah operasi, khususnya UNIFIL? |
| 5. | Apa saja hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengiriman <i>female peacekeeper</i> Indonesia? |
| 6. | Menurut anda, apakah pembekalan kompetensi dan pengetahuan <i>female peacekeeper</i> Indonesia sudah mencukupi kebutuhan di lapangan? Materi apa saja yang penting untuk diberikan pada masa <i>Pre Deployment Training</i> ? |
| 7. | Bagaimana menurut anda landasan hukum yang ada di Indonesia dalam hal pengarusutamaan gender dan keterlibatan perempuan pada misi pemeliharaan perdamaian? Apakah diperlukan suatu kebijakan mengenai keharusan mengirim perempuan pemelihara perdamaian dengan kuota tertentu? |
| 8. | Menurut anda, bagaimana <i>gender mainstreaming</i> dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB diterapkan oleh Indonesia? |
| 9. | Menurut anda, apa yang perlu diperhatikan bagi <i>stakeholder</i> level strategis dalam mendorong peningkatan partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia? |
| Dampak Partisipasi <i>Female Peacekeeper</i> terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia | |
| No. | Pertanyaan |
| 1. | Menurut anda, bagaimana partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia dapat berperan dalam diplomasi pertahanan Indonesia? |
| 2. | Apakah kepentingan Indonesia dalam mengirimkan <i>female peacekeeper</i> ke misi perdamaian PBB? |
| 3. | Bagaimana partisipasi perempuan dalam misi PBB dapat berdampak pada proposal Indonesia ke dalam anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB? |
| 4. | Bagaimana kaitan partisipasi <i>female peacekeeper</i> Indonesia terhadap upaya menciptakan kepercayaan dunia dan upaya peningkatan kapabilitas personel? |